



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2023**



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

2023

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Pada masa periode Renstra 2020-2024 ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mempunyai tugas penting Kementerian Perindustrian untuk membina dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri. Tugas berat namun sangat mulia ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, kreatif, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian khususnya agar seluruh sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan, dapat tercapai secara optimal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri selama tahun 2023, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Mudah-mudahan, penyajian LAKIP ini menjadi cermin bagi aparatur khususnya aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2024

Kepala BPSDMI



MASROKHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I	1
P E N D A H U L U A N	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Sistematika Penyajian	9
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Kinerja	10
2.1.1 Rencana Strategis Organisasi	10
2.1.2 Rencana Kinerja.....	34
2.1.3 Indikator Kinerja Utama BPSDMI	36
2.2 Dukungan Anggaran.....	37
BAB III	42
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023.....	42
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	42
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah	42
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	45
3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	50
3.2 Realisasi Anggaran 2023.....	147
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	155
3.4 Kendala dan Tindak Lanjut.....	160
3.4.1 Kendala.....	160
3.4.2 Tindak Lanjut.....	160
BAB IV.....	162
P E N U T U P	162

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian (BPSDMI) selama tahun 2023. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) BPSDMI 2020-2024 pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Perindustrian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM Industri dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi Industri. Renstra memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMI.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, BPSDMI pada tahun 2023 telah melakukan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSDMI 2023. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 sudah dapat dicapai oleh BPSDMI. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran yang telah dijalankan selama periode tahun anggaran berjalan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja BPSDMI tercapai dan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang. BPSDMI akan selalu berusaha mengembangkan secara berkelanjutan program diklat bermutu, pengelola diklat yang profesional, pelayanan diklat yang prima, widyaiswara yang kompeten, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah Kementerian Perindustrian dalam membawa negara Indonesia menjadi negara industri tangguh di dunia. BPSDMI merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian di bidang pembangunan sumber daya manusia industri. Peran tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu BPSDMI dituntut untuk selalu mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan SDM industri berbasis kompetensi, sehingga dapat menyiapkan SDM industri yang kompeten serta SDM aparatur yang handal, profesional serta mampu melaksanakan tugasnya dengan baik pada unit kerjanya masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas Kementerian Perindustrian, di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur, BPSDMI senantiasa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, yang mengamanatkan bahwa diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan aparatur industri; diklat memiliki keterkaitan dengan pengembangan karir aparatur; sistem diklat meliputi proses analisis kebutuhan, desain program, penyelenggaraan, dan evaluasi diklat; mempersiapkan aparatur industri agar memenuhi persyaratan jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kaderisasi. Sedangkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM industri, senantiasa berdasarkan kebijakan pembangunan industri nasional, dan renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 dimana salah satu programnya adalah program peningkatan kemampuan SDM Industri.

Dalam upaya mempersiapkan dan mewujudkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mampu mendorong peningkatan produktifitas SDM Industri dan daya saing sektor industri. Pada tahun anggaran 2023, telah dilakukan berbagai kegiatan pendidikan dan

pelatihan baik bagi SDM Aparatur maupun SDM Industri.

Sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga yang mencakup entitas Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi sampai dengan Satuan Kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPSDMI Kementerian Perindustrian Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

LAKIP BPSDMI ini disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas, dan manfaat diklat. LAKIP ini disusun bersifat rutin sekali dalam setahun, dan disampaikan secara bertahap dan berjenjang pada setiap akhir tahun anggaran. Sehingga dengan demikian LAKIP ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BPSDMI juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan untuk mengambil keputusan, utamanya dalam upaya peningkatan mutu SDM Industri maupun SDM Aparatur.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas BPSDMI adalah menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugas, BPSDMI menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- b) Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas Kementerian dalam pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia industri dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDMI menetapkan visi **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh”**.

Dalam rangka mewujudkan visi BPSDMI 2020-2024, BPSDMI menetapkan arah kebijakan BPSDMI 2020-2024, yaitu memperkuat kelembagaan vokasi industri. Untuk menguatkan kelembagaan vokasi industri, BPSDMI memiliki delapan arah kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Dual System bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional
2. Pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri.
3. Pembangunan Balai Diklat Industri sebagai Center of Excellences pembangunan Tenaga Kerja Industri
4. Pembangunan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai HUB dan Ecosystem Center Industri 4.0
5. Pengembangan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri
6. Pembangunan Digital ASN and Knowledge Management Center sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri
7. Pembangunan pusat pengembangan (Development Center) infrastruktur kompetensi

Industri

8. Pembangunan wadah (HUB Center) sinergi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Adapun kebijakan penguatan tiga kelembagaan dijelaskan pada bagian berikut:

- 1) Penguatan Kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri
 - a) Pengembangan pendidikan dual system dengan STEM Learning Model
 - b) Melaksanakan Penelitian Terapan problem solving leading sektor industri prioritas
 - c) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM
 - d) Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0
 - e) Membangun kelembagaan Inkubator bisnis industri yang terintegrasi.
 - f) Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP.
 - g) Mengembangkan kelas industri
- 2) Penguatan Kelembagaan SMK Industri
 - a) Penyelenggaraan pendidikan dual system dengan STEM learning model berstandar internasional
 - b) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM.
 - c) Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI
 - d) Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP
 - e) Mengembangkan kelas industri.
- 3) Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri
 - a) Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
 - b) Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi
 - c) Penyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (skilling, upskilling, dan reskilling) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1.
 - d) Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP.
 - e) Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional.
 - f) Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis.

- g) Membangun smart training facility.
- h) Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai, BPSDMI telah melaksanakan 2 program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BPSDMI dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi 4 unit Eselon II (unit pusat) yang terdiri atas:

a) Sekretariat Badan

Memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;

b) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur

Memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan jabatan fungsional bidang industri dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;

c) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri

Memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;

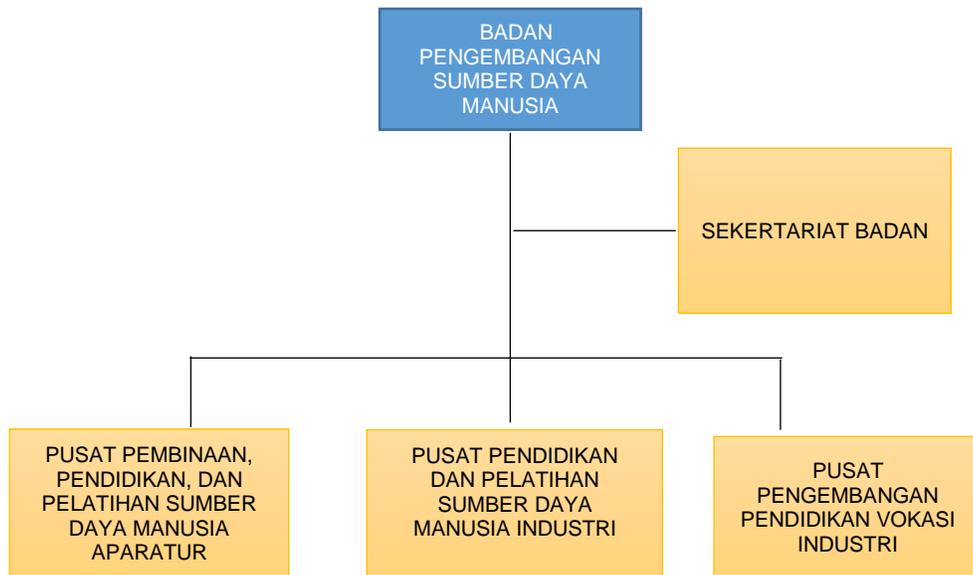
d) Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

Memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri.

Selain unit kerja pusat, BPSDMI juga didukung oleh 29 satuan kerja daerah yang terdiri dari 7 Balai Diklat Industri (BDI), 9 Sekolah Menengah Kejuruan SMK, 2 Akademi

Komunitas (Akom) Industri, dan 11 Politeknik Industri. Satuan Kerja tersebut mempunyai peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas yang menjadi amanat dari Kementerian Perindustrian yaitu menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.

Struktur organisasi BPSDMI Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:



Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja BDI berfokus pada pelatihan industri sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja SMK dan Politeknik/Akom berfokus pada pendidikan vokasi industri dengan kompetensi sebagai berikut:

No	SATKER	SPESIALISASI		
		KELOMPOK/ BIDANG INDUSTRI	PRIORITAS	PENUNJANG
1	BDI MEDAN	Kimia Dasar dan Pangan	Kimia, Oleo Chemical (Sawit)	Industri berbasis Pangan dan Produk karet
2	BDI PADANG	Pangan, Hulu Agro, Farmasi, Tekstil dan Aneka	Agro, pangan, dan Fitopharmaca	Industri berbasis Bordir dan Desain Kemasan Industri
3	BDI JAKARTA	Alat Transportasi, Barang Modal, Komponen, Logam dan Tekstil	Otomotif, Komponen, dan Logam	Industri berbasis Tekstil/Fesyen

No	SATKER	KELOMPOK/ BIDANG INDUSTRI	SPESIALISASI	
			PRIORITAS	PENUNJANG
4	BDI YOGYAKARTA	Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Aneka dan Alat Kesehatan	Alas Kaki, Furnitur, dan Plastik	Industri berbasis Tekstil dan Alat Kesehatan
5	BDI SURABAYA	Elektronika, Barang Modal, Tekstil dan Aneka	Elektronika, Mekanik, dan Permesinan	Industri berbasis Tekstil dan Desain Kemasan Industri
6	BDI DENPASAR	Telematika dan Aneka	Animasi, Digital Content dan IIOT	Industri berbasis Aplikasi, Pengembangan Permainan dan Kriya
7	BDI MAKASSAR	Pangan, Hulu Agro, Farmasi dan Aneka	Agro, Pangan, dan Fitopharmaca	Desain Kemasan Industri

No	SMK	Konsentrasi Keahlian
1	SMK SMTI Makassar	Kimia Industri
		Pengawasan Mutu
		Mekatronika
2	SMK SMTI Bandar Lampung	Kimia Industri
		Analisis Pengujian Laboratorium
3	SMK SMTI Padang	Kimia Industri
		Otomasi Industri
4	SMK SMTI Yogyakarta	Teknik Kimia Industri
		Teknik Mekatronika
		Kimia Analisis .
5	SMK SMTI Pontianak	Kimia Industri
		Pemesinan
		Analisis Pengujian Laboratorium
		Otomasi Industri
6	SMK SMTI Banda Aceh	Kimia Industri
		Analisis Pengujian Laboratorium
		Teknik Mekanik Industri
7	SMK SMAK Makassar	Kimia Analisis
8	SMK SMAK Bogor	Kimia Analisis
9	SMK SMAK Padang	Kimia Analisis

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
1	Politeknik PTKI Medan	Teknik Kimia
		Teknik Mekanika
		Agribisnis Kelapa Sawit
2	Politeknik ATI Padang	Analisis Kimia

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
		Teknik Industri Agro
		Teknik Kimia Bahan Nabati
		Manajemen Logistik Industri Agro
		Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan
		Program Setara D1 Distribusi dan Transportasi
3	Politeknik STTT Bandung	Rekayasa Tekstil dan Apparel
		Teknik Tekstil
		Kimia Tekstil
		Produksi Garmen
		Produksi Garmen Konsentrasi Fashion Design
		Program Setara D1 Teknologi Pertenunan
		Program Setara D1 Teknologi Penyempurnaan Tekstil
4	Politeknik AKA Bogor	Analisis Kimia
		Penjaminan Mutu Industri Pangan
		Pengolahan Limbah Industri
		Nanoteknologi Pangan
5	Politeknik APP Jakarta	Manajemen Logistik Industri Elektronika
		Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT
		Manajemen Pemasaran Industri Elektronika
		Program Setara D1 Logistik
6	Politeknik STMI Jakarta	Teknik Industri Otomotif
		Sistem Informasi Industri Otomotif
		Teknik Kimia Polimer
		Administrasi Bisnis Otomotif
		Teknologi Rekayasa Otomotif
		Prodi Setara D1 Teknologi Kertas
		Program Setara D1 Manufaktur Alat Berat
		Program Setara D1 Proses Manufaktur
7	Politeknik ATK Yogyakarta	Teknologi Pengolahan Kulit
		Teknologi Pengolahan Produk Kulit
		Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik
		Program Setara D1 Produk Kulit
8	Politeknik ATI Makassar	Teknik Industri Agro
		Teknik Manufaktur Industri Agro
		Otomasi Sistem Permesinan
		Teknik Kimia Mineral
9	Politeknik Industri Logam Morowali	Teknik Perawatan Mesin
		Teknik Listrik dan Instalasi
		Teknik Kimia Mineral
10	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	Teknik Pembuatan Benang
		Teknik Pembuatan Kain Tenun
		Teknik Pembuatan Garmen
11	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	Teknik Perawatan Mesin
		Teknik Listrik dan Instalasi

No	Perguruan Tinggi	Program Studi
		Analisis Kimia
12	Politeknik Industri Furnitur dan Produk Kayu Kendal	Teknik Produksi Furnitur
		Desain Furnitur
		Manajemen Bisnis Industri Furnitur
		Program Setara D1 Teknik Finishing
13	Politeknik Industri Petrokimia Banten	Teknologi Proses Industri Petrokimia
		Teknologi Mesin Industri Petrokimia
		Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPSDMI selama tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LAKIP BPSDMI Kementerian Perindustrian tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, arah kebijakan dan struktur organisasi BPSDMI.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran BPSDMI tahun 2023 meliputi Renstra BPSDMI 2020-2024, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPSDMI dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP BPSDMI tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana strategis (Renstra) BPSDMI 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah BPSDMI yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BPSDMI beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra BPSDMI telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kebijakan pengembangan industri nasional khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya manusia industri. Secara ringkas substansi Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A. Visi

Visi BPSDMI adalah **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh”**.

Sejalan dengan visi tersebut, BPSDMI juga senantiasa menjunjung nilai-nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif. Lima nilai ini disebut INSAN OKE yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparatur Kemenperin ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan vokasi industri dual system bertaraf global sebagai

- referensi model pendidikan vokasi nasional;
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
 3. Membangun Balai Diklat Industri sebagai Center of Exellences pembangunan tenaga kerja industri;
 4. Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai hub dan ecosystem center industri 4.0;
 5. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;
 6. Membangun Digital ASN Talent Pool and Knowledge Management Center sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri;
 7. Membangun pusat pengembangan (development center) infrastruktur kompetensi industri;
 8. Membangun wadah (hub center) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

C. Tujuan

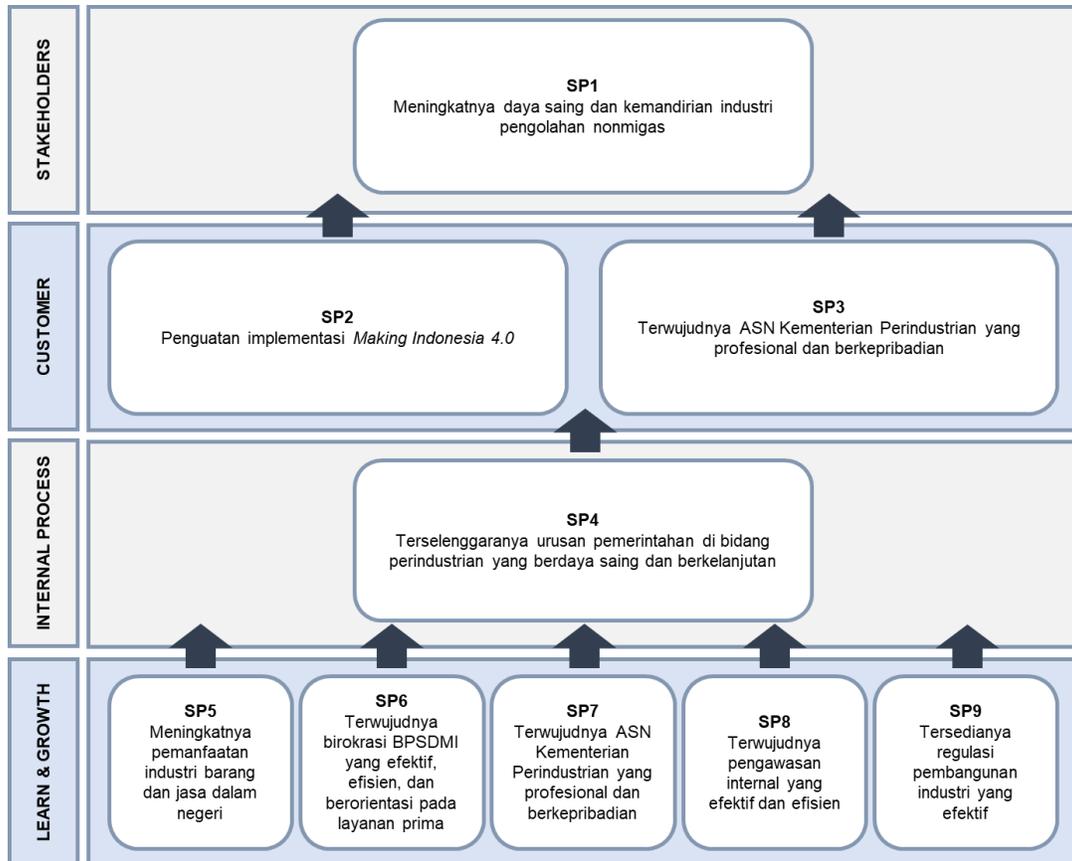
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan SDM industri seperti disebutkan di atas, BPSDMI menetapkan tujuan pembangunan SDM industri 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

“Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.”

D. Sasaran Program BPSDMI 2020-2024

Sasaran program pembangunan SDM Industri BPSDMI merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BPSDMI sebagai suatu *impact/outcome* dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMI. Dalam penyusunannya, BPSDMI menjabarkan masing-masing sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran program tersebut diukur

melalui indikator kinerja program. Peta strategi BPSDMI dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar Peta Strategi BPSDMI Tahun 2020-2024

Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

- **Sasaran program pertama (SP1)** yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas”, dengan indikator kinerja:
 1. Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas
 2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja
 3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas
 4. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi meningkat
 5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan

Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

- **Sasaran program kedua (SP2)** yang akan dicapai adalah “Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*”, dengan indikator kinerja:
 1. Jumlah SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya
 2. Jumlah implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi meningkat
 3. Persentase utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0
- **Sasaran program ketiga (SP3)** yang akan dicapai adalah “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian”, dengan indikator kinerja:
 1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik
 2. Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional

Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran program pada perspektif proses internal merupakan sasaran yang dicapai melalui proses yang dilakukan oleh BPSDMI.

- **Sasaran Program keempat (SP4)**, yaitu “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:
 1. Infrastruktur kompetensi industri (SKKNI) di bidang industri
 2. Jumlah fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri
 3. Jumlah asesor kompetensi dan lisensi
 4. Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat
 5. Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik
 6. Jumlah penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional
 7. Jumlah inkubator bisnis industri yang tumbuh

Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas,

dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output, outcome*, maupun *impact* dari kinerja BPSDMI. Terdapat 5 (lima) sasaran program yang akan dicapai, yakni:

- **Sasaran program kelima (SP5)**, yaitu “Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri”, dengan indikator kinerja:

1. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI

- **Sasaran program keenam (SP6)**, yaitu: “Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai laporan keuangan BPSDMI
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPSDMI
3. Nilai kearsian BPSDMI

- **Sasaran program ketujuh (SP7)**, yaitu “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN BPSDMI

- **Sasaran program kedelapan (SP8)**, yaitu “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti
2. Level Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) meningkat dari level 3

- **Sasaran program kesembilan (SP9)**, yaitu “Tersedianya regulasi terkait SDM industri yang efektif”, dengan indikator kinerja:

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI

E. Arah Kebijakan dan Strategi BPSDMI

Dalam rangka mewujudkan visi BPSDMI 2020-2024, yaitu menjadi vokasi industri bertaraf global yang mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh, BPSDMI menetapkan arah kebijakan Penguatan kelembagaan vokasi industri melalui:

- 1) Penguatan kelembagaan politeknik dan akademi komunitas industri

- 2) Penguatan kelembagaan SMK industri
- 3) Penguatan kelembagaan Balai Diklat Industri

Untuk menguatkan kelembagaan vokasi industri, BPSDMI memiliki delapan arah kebijakan, yaitu:

- 1. Mengembangkan pendidikan vokasi industri *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional.**

Dalam upaya mendukung industrialisasi di Indonesia, pendidikan vokasi diharapkan dapat menerapkan pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Pada implementasinya, penyelenggaraan pendidikan vokasi perlu berkolaborasi dengan industri dengan menitikberatkan proses pembelajaran di dua tempat, yaitu di sekolah/kampus dan di industri. Penyelenggaraan pendidikan sistem ganda dapat mendorong pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab yang lebih besar, serta mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang terampil dan berpengetahuan tinggi (*high skilled & know how*).

- 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri.**

Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja industri saat ini dihadapkan pada tantangan besar dan aneka ragam kebutuhan pelatihan kerja di berbagai sektor industri. Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan untuk merespons terjadinya disrupsi di berbagai bidang pekerjaan. Pada saat yang sama, upaya yang dilakukan juga harus merespon ledakan penduduk usia produktif (bonus demografi) yang perlu disiapkan kompetensinya agar dapat siap kerja. Belakangan bahkan ditambah dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran. Kondisi ini menuntut perlunya dikembangkan jenis dan sistem pelatihan yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri, salah satunya dengan mengembangkan jenis pelatihan *triple skilling* mencakup:

- a. Pelatihan *skilling* yang bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada calon tenaga kerja industri.
- b. Pelatihan *up-skilling* ditujukan bagi para tenaga kerja industri untuk meningkatkan keahlian teknis mereka ke level yang lebih tinggi dari keahlian yang sudah dimiliki.
- c. Pelatihan *re-skilling* bertujuan untuk menambah keahlian baru bagi para angkatan kerja untuk bidang keahlian lain sesuai dengan kebutuhan industri.

Untuk dapat menyelenggarakan pelatihan yang profesional, perlu dikembangkan sistem yang mencakup: perencanaan pelatihan yang terstruktur dan sistematis, penyediaan SDM penyelenggara dan instruktur yang kompeten, penyiapan fasilitas sarana dan prasarana yang modern dan memadai, pemanfaatan sistem informasi pelatihan yang terintegrasi, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi pelatihan.

3. Membangun Balai Diklat Industri sebagai *center of excellences* pembangunan tenaga kerja industri.

Pengembangan SDM industri, utamanya tenaga kerja industri, pada era yang dinamis dan fleksibel ini memaksa adanya penguasaan keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan industri. Oleh sebab itu, pelatihan vokasi industri di Balai Diklat Industri (BDI) menyelenggarakan pelatihan jenis *triple skilling* yang mencakup pelatihan *skilling*, *up-skilling*, dan *re-skilling*. Sistem penyelenggaraan pelatihan vokasi industri ditetapkan menggunakan sistem *3-in-1*, meliputi: pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan industri agar terbentuk *link-and-match* antara lembaga pelatihan dengan perusahaan industri agar menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan siap kerja.

Selain tenaga kerja industri, BDI juga diarahkan untuk menyiapkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis dan menjalin kemitraan pengelolaan inkubator bisnis dengan pihak lain seperti: politeknik, asosiasi industri, komunitas industri,

serta kementerian/lembaga terkait. BDI juga diarahkan untuk menyelenggarakan pelatihan/diklat bagi pembina industri, khususnya pelatihan jabatan fungsional yang jumlahnya meningkat seiring peralihan jabatan struktural menjadi fungsional pada akhir tahun 2020. Untuk menjalankan perannya, BDI harus dapat menjadi *center of excellences* dalam pembangunan SDM industri khususnya melalui jalur pelatihan vokasi industri. Pengelolaan manajemen dan fasilitas pelatihan pada BDI harus diarahkan agar mampu mendukung pencapaian visi dan tujuan BDI.

4. Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai *hub* dan *ecosystem center* industri 4.0.

Pembangunan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) merupakan bagian dari implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0*. PIDI 4.0 menerapkan lima pilar dalam mendukung transformasi industri 4.0, yaitu:

- *Showcase center* yang berfungsi untuk meningkatkan *awareness* industri terhadap pentingnya penerapan industri 4.0.
- *Capability center* untuk membangun keahlian teknologi industri 4.0.
- *Ecosystem center* yang menghubungkan para *stakeholder* industri.
- *Delivery center* untuk transformasi perusahaan industri dalam penerapan teknologi 4.0.
- *Innovation center* dalam berbagai proyek uji coba dan *brokerage* di sektor industri.

Untuk memperluas jangkauan dan manfaat PIDI 4.0, serta penguatan peran unit pendidikan Kemenperin dalam penyediaan tenaga kerja industri yang adaptif terhadap revolusi industri 4.0, pembangunan satelit PIDI 4.0 dengan teknologi kunci yang berbeda dan spesifik di beberapa politeknik. Satelit PIDI 4.0 akan menjalankan setidaknya dua pilar layanan PIDI 4.0, yaitu sebagai *showcase center* dan *capability center* sesuai dengan spesialisasi industri di masing-masing politeknik.

5. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri.

Saat ini tingkat kewirausahaan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yaitu berada di angka 3,47%, di bawah Singapura (hampir 9%) atau Malaysia dan Thailand (hampir 5%). Untuk menjadi negara maju, dibutuhkan setidaknya 4% jumlah wirausaha. Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan wirausaha industri memerlukan intervensi dan dukungan dari pemerintah, tidak hanya dalam bentuk fasilitasi peralatan dan pendanaan, tetapi juga pembentukan SDM wirausaha yang berdaya saing.

Peran pembentukan SDM wirausaha industri dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri di politeknik/akademi komunitas Kemenperin. Keduanya telah dilengkapi dengan laboratorium dan *teaching factory* yang dapat digunakan sebagai sarana inkubasi. Sehingga, selain meluluskan tenaga kerja kompeten, politeknik dan akademi komunitas juga perlu membentuk wirausaha. Pengembangan peran sebagai inkubator bisnis tersebut tentunya perlu dilakukan dengan membangun kolaborasi dengan para *stakeholder* terkait, antara lain: Ditjen IKMA Kemenperin, BDI, lembaga pembiayaan, serta asosiasi industri.

6. Membangun *Digital ASN* dan *Knowledge Management Center* sebagai pusat pembinaan ASN pembina industri.

UU No. 3/2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa pembangunan SDM industri meliputi pembangunan pembina industri, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi di bidang industri. ASN bidang industri merupakan pemeran utama dalam pembangunan industri yang berdaya saing global di era revolusi industri 4.0. Untuk itu, pembangunan ASN pembina industri sebagai *Digital ASN* perlu disiapkan dan diprioritaskan untuk mendukung transformasi birokrasi digital di era revolusi industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pembangunan *Digital ASN* yang inovatif, adaptif, dan progresif, membutuhkan program pengembangan dengan pendekatan yang lebih

strategis serta mengintegrasikan optimalisasi sistem informasi dan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat diakomodasi dengan mewujudkan *Corporate University* Kemenperin. Strategi untuk mendukung terwujudnya *Corporate University* BPSDMI Kemenperin antara lain:

1. Mengembangkan kompetensi pejabat administratif dan fungsional melalui:
 - 1) Pengembangan kompetensi pejabat administratif melalui program pelatihan dan pendidikan.
 - 2) Pengembangan kompetensi pejabat fungsional melalui *job formation mapping*, *talent mapping*, sistem elektronik Daftar Usulan Perhitungan Angka Kredit (DUPAK), dan pola pengembangan jabatan fungsional.
2. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan ASN yang berbasis kompetensi melalui:
 - 1) Pengembangan program pendidikan dalam dan luar negeri.
 - 2) Pengembangan pelatihan ASN industri berbasis kompetensi
 - 3) Pengembangan infrastruktur pendidikan dan pelatihan SDM aparatur bidang industri.
3. Menyelenggarakan *smart training* dan sertifikasi kompetensi bagi ASN melalui:
 - 1) *e-Self learning*
 - 2) *Classical learning*
 - 3) *Blended learning*
4. Mengembangkan sinergi pembinaan jabatan fungsional melalui kerja sama antar satuan kerja dan unit pembina teknis jabatan fungsional di lingkungan Kemenperin.
5. Mengembangkan *Knowledge Management Center* ASN pembina industri.

7. Membangun pusat pengembangan (*development center*) infrastruktur kompetensi industri.

UU No. 3/2014 mengamanatkan pembangunan SDM industri dilakukan untuk menghasilkan SDM yang kompeten. Amanat tersebut dapat diartikan bahwa untuk mengukur capaian kinerja pembangunan SDM industri perlu dikembangkan

infrastruktur kompetensi. Infrastruktur kompetensi meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan tenaga asesor kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang sudah distandarkan dalam SKKNI pun perlu dikualifikasikan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar memudahkan penerapan baik dalam hal pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

Upaya pembangunan infrastruktur kompetensi tidak dapat dilakukan hanya oleh BPSDMI, tetapi juga kolaborasi dari seluruh pihak, terutama: industri, asosiasi industri, K/L terkait, serta setiap direktorat pembina industri di Kemenperin. Guna mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan pengembangan standar kompetensi dan kualifikasi kompetensi sektor industri, telah dibentuk Komite Standar Kompetensi melalui Kepmenperin No. 1456/2019. Melalui keberadaan komite tersebut, masing-masing direktorat pembina industri di Kemenperin memiliki peran yang sama dalam membangun infrastruktur kompetensi, khususnya SKKNI dan KKNI, di lingkup industri binaannya di bawa koordinasi ketua komite (Kepala BPSDMI) dan sekretariat komite (Pusdiklat SDM Industri). Komite Standar Kompetensi akan dikembangkan menjadi pusat pengembangan infrastruktur kompetensi di BPSDMI.

8. Membangun wadah (*hub center*) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh *stakeholder* nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Arah kebijakan ini dilakukan melalui:

1) Pengembangan sinergi kolaborasi dan kerja sama dengan *stakeholder*.

Kemenperin melalui BPSDMI memimpin inisiatif pengembangan *link and match* antara dunia industri dengan dunia pendidikan dengan mengkoordinasikan dan menjadi inspirasi untuk mendorong peran aktif sektor terkait.

2) Penguatan kerja sama luar negeri bidang vokasi industri.

Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu

akademik institusi dan SDM yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

- **Arah kebijakan Penguatan kelembagaan vokasi industri melalui:**

1) Penguatan Kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri

Untuk memperkuat kelembagaan politeknik dan akademi komunitas industri, BPSDMI memiliki tujuh arah kebijakan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan *dual system* dengan *STEM learning model* berstandar global.

Strategi implementasi arah kebijakan ini akan menyorot tiga aspek, yaitu:

- 1) Pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Untuk mewujudkan pendidikan sistem ganda, tahapan yang wajib dilakukan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
 - b. penerapan kurikulum *link and match* dengan industri;
 - c. revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penerapan *teaching factory/teaching industri*;
 - e. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;
 - f. penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi;
 - g. pengembangan laboratorium *teaching factory* dan lokakarya (*workshop*) terintegrasi;
 - h. pengembangan *smart* dan *cyber campus*; dan
 - i. pengembangan program studi baru.
- 2) Model pembelajaran STEM (science, technology, engineering, and mathematics) yang mengintegrasikan empat bidang dalam sekali pengalaman belajar. Model ini diterapkan dalam perkuliahan/pembelajaran agar dapat mendorong mahasiswa untuk mendesain, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi; mengasah kognitif, manipulatif dan afektif; serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain

sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi.

- 3) Pengembangan pendidikan berstandar global dengan mendorong politeknik/akademi komunitas untuk mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN (the Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) melalui empat tahapan, yaitu:
 - a. evaluasi dan sertifikasi institusional;
 - b. *workshop* dan pelatihan; dan
 - c. sertifikasi; serta
 - d. pasca-akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan).

2. Melaksanakan penelitian terapan *problem solving* di leading sektor industri prioritas.

Arah kebijakan ini diimplementasikan melalui enam strategi, yaitu:

- 1) Penelitian terapan *problem solving* pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu: 1) industri pangan; 2) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; 4) industri alat transportasi; 5) industri elektronika dan telematika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri.
- 2) Implementasi hasil penelitian di industri dengan tujuan meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas, serta meningkatkan kemampuan industri dalam negeri. Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan inovasi teknologi;
 - b. peningkatan mutu dan diversifikasi produk/proses;
 - c. implementasi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa industri untuk IKM; dan
 - d. komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.
- 3) Perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten hasil penelitian.
- 4) Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional.

5) Kompetisi nasional untuk inovasi vokasi industri.

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM.

Implementasi arah kebijakan ini dilakukan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Mengembangkan ekosistem industri kecil menengah.
- 2) Membangun kemitraan.

Adapun jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan di politeknik/akademi komunitas antara lain:

- a. pendampingan teknologi;
- b. pelatihan;
- c. pelayanan konsultasi industri; dan
- d. penyuluhan.

4. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0.

Pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui penyiapan politeknik dan akademi komunitas sebagai *showcase center* dan *capability center* industri 4.0 khususnya untuk industri kecil dan menengah.

Arah kebijakan ini diselenggarakan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Pembangunan satelit PIDI 4.0.
- 2) Implementasi kurikulum dan modul pembelajaran 4.0.

5. Membangun kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi.

Unit pendidikan tinggi di Kemenperin memiliki tugas tidak hanya untuk menciptakan tenaga kerja kompeten, tetapi juga menghasilkan wirausaha industri. Untuk mewujudkan ini, maka perlu dibangun inkubator bisnis yang terintegrasi. Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta inkubasi (*tenant*). *Tenant* inkubator bisnis di perguruan tinggi adalah mahasiswa tingkat akhir yang telah

memiliki prospektif usaha. Dalam penyelenggaraannya, politeknik/akademi komunitas perlu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, BDI, asosiasi industri, dan pihak terkait lainnya.

Saat ini seluruh politeknik pendidikan vokasi Kemenperin memiliki program inkubator bisnis dengan beragam spesialisasi komoditi industri yang dikembangkan. Selain itu, berbagai K/L juga memiliki program penyiapan wirausaha yang dapat dikolaborasikan. Di Kemenperin sendiri, upaya penciptaan wirausaha baru banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dalam bentuk bimbingan, pendampingan dan bantuan peralatan. Penyelenggaraan inkubator bisnis yang mencakup fase pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi dapat dilakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut.

6. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP.

Saat ini hampir seluruh politeknik dan akademi komunitas telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian yang diselenggarakan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan politeknik dan akademi komunitas dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi adalah:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi.
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK).
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi.
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

7. Mengembangkan kelas industri.

Kelas industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis sesuai standar industri tertentu yang akan langsung bekerja pada industri. Penyiapan kelas industri dilakukan melalui program pendidikan setara D1/D2 dan kelas khusus program pendidikan D3/D4.

2) Penguatan Kelembagaan SMK Industri

Untuk memperkuat kelembagaan SMK industri, BPSDMI memiliki lima arah kebijakan, yaitu:

1. **Menyelenggarakan pendidikan *dual system* dengan *STEM learning model* berstandar global.**

Strategi implementasi arah kebijakan ini akan menyorot tiga aspek, yaitu:

- 1) Pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Untuk mewujudkan pendidikan sistem ganda, tahapan yang wajib dilakukan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
 - b. penerapan kurikulum *link and match* dengan industri;
 - c. revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penerapan *teaching factory/teaching industri*;
 - e. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;
 - f. penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi;
- 2) Pengembangan laboratorium *teaching factory* dan lokakarya (*workshop*) terintegrasi melalui:
 - a. kemitraan strategis dengan DUDI;
 - b. penataan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. lingkungan kampus.
- 3) Model pembelajaran STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*) yang mengintegrasikan empat bidang dalam sekali pengalaman belajar. Model ini diterapkan dalam perkuliahan/pembelajaran agar dapat mendorong siswa untuk mendesain, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi; mengasah kognitif, manipulatif dan afektif; serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi.

- 4) Pengembangan pendidikan bertaraf internasional. Pengembangan pendidikan bertaraf internasional sangat diperlukan sebagai “proof of concept” yang menegaskan bahwa pendidikan nasional telah setara dengan dunia internasional agar dapat membangun reputasi dan bagian upaya “international alignment”. Pengembangan pendidikan bertaraf internasional juga merupakan salah satu media strategis karena langsung menunjukkan kualitas outcome pendidikan.
- 5) Pengembangan smart dan cyber school, yaitu komunitas pengetahuan yang kreatif dan berjiwa wirausaha (creative-entrepreneurial knowledge community), sehingga komunitas sekolah menjadi cerdas dalam mencapai tujuan akademisnya berkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui smart school, komunitas, program dan aktivitas, fasilitas fisik, dan sumber daya berada dalam fungsi cyber. Dalam fungsi cyber ini, diharapkan dapat menyediakan layanan informasi, komputasi, dan komunikasi secara terintegrasi pada semua anggota komunitas sekolah.

2. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM.

Dalam upaya pengembangan kompetensi, SMK diharapkan dapat terlibat pengembangan ekosistem IKM. Kerja sama dengan IKM dilakukan dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama diselenggarakan dalam rangka:

- menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan diutamakan berupa pemanfaatan hasil penelitian secara konkret;
- mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai.

Jenis kerja sama yang dapat diterapkan di SMK adalah sebagai berikut:

- 1) Pendampingan teknologi
- 2) Pelatihan

- 3) Pelayanan konsultasi industri
- 4) Penyuluhan

3. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0.

Pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui penyiapan politeknik dan akademi komunitas sebagai *showcase center* dan *capability center* industri 4.0 khususnya untuk industri kecil dan menengah.

Arah kebijakan ini diselenggarakan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Pembangunan satelit PIDI 4.0.
- 2) Implementasi kurikulum dan modul pembelajaran 4.0.

4. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP.

Saat ini hampir seluruh SMK telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian yang diselenggarakan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan SMK dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi adalah:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi.
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK).
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi.
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

5. Mengembangkan kelas industri.

Kelas industri merupakan kelas khusus yang diselenggarakan bekerjasama dengan industri dengan tujuan membekali calon tenaga kerja atau lulusan dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk bidang pekerjaan tertentu.

3) Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri

Untuk memperkuat kelembagaan Balai Diklat Industri (BDI), BPSDMI memiliki delapan arah kebijakan, yaitu:

1. Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri

Sejalan dengan perkembangan industri nasional dan global serta mempertimbangkan tugas pokok BDI, maka kompetensi BDI dalam menyelenggarakan diklat bagi SDM industri perlu terus dikembangkan. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri dari sisi jenjang/level/jabatan (okupasi) serta jumlah tenaga kerja. Langkah pemetaan tersebut dilakukan untuk:

- mendapatkan potret kebutuhan tenaga kerja Industri dari 7 (tujuh) sektor industri prioritas serta pola peningkatan kualitas SDM industri yang dibutuhkan.
- mengetahui potret kekuatan internal BDI dalam melaksanakan pelatihan untuk menjawab potret kebutuhan tersebut.

2. Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan salah satu model program pengembangan SDM industri dilaksanakan sejak tahun 2016 BDI. PBK dilakukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja industri agar sesuai dengan kebutuhan pada sektor industri terkait. Sehingga, tercipta *link and match* antara *supply* tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. PBK menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan standar kompetensi yang diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing. Dengan ditetapkannya ruang lingkup dan spesialisasi BDI, masing-masing BDI harus melengkapi program dan modul pelatihan berbasis kompetensi agar dapat melaksanakan amanah pelatihan vokasi industri dengan sistem *3-in-1* (pelatihan, uji kompetensi, dan penempatan pada sektor industri).

3. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, upskilling, dan re-skilling*) tenaga kerja industri dengan sistem *3-in-1*

Penyelenggaraan pelatihan vokasi industri di BDI dilakukan dengan sistem *3-in-1*, yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan penempatan lulusan pelatihan. Untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi industri dengan sistem *3-in-1*, langkah yang perlu dilakukan BDI yaitu:

- 1) *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama dengan industri
- 2) Rekrutmen peserta pelatihan
- 3) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi
- 4) Penempatan kerja
- 5) *Tracer study* alumni peserta pelatihan

4. Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP

Saat ini seluruh BDI telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai jenis diklat yang dilakukan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan diklat, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan BDI dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi antara lain:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK)
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 5) Sistem digitalisasi uji kompetensi

5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional

Selain menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah dilisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) seperti yang selama ini dilakukan, BDI perlu melakukan peninjauan kerja sama dengan sertifikasi yang berlaku di negara lain ataupun diakui secara internasional. Ke depan, BDI diharapkan dapat menjadi *Authorized Training Body* (ATB) pada sektor-sektor industri sesuai spesialisasi kompetensinya. Langkah yang dapat dilakukan BDI untuk mencapai hal tersebut, yaitu:

- 1) Identifikasi standar kompetensi internasional
- 2) Identifikasi lembaga sertifikasi internasional
- 3) Kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional

6. Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis

Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja industri kompeten, BDI juga berperan dalam penyiapan wirausaha industri melalui jalur inkubator bisnis. Penyelenggaraan inkubator bisnis di BDI harus tetap mempertimbangkan spesialisasi kompetensi serta kompetensi inti yang terdapat di wilayahnya. Tahapan pengembangan inkubator bisnis yang dapat dilakukan BDI adalah:

- 1) Menjalin kemitraan dengan asosiasi, pelaku industri, politeknik, dan K/L terkait sebagai akselerator pengembangan inkubator bisnis vokasi industri.
- 2) Mendorong peserta pelatihan menjadi wirausaha.
- 3) Memfasilitasi kemitraan dengan industri besar.
- 4) Pengembangan fasilitas inkubator bisnis.
- 5) Pengembangan SDM inkubator bisnis (*coach, trainer, pengelola*).

7. Membangun *smart training facility*

Pelatihan yang diselenggarakan bagi para SDM industri sudah sepatutnya perlu disesuaikan dengan era industri 4.0 yang menjadi tren global maupun nasional. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi industri 4.0, dimulai dengan membangun fasilitas pelatihan yang cerdas (*smart training facility*). *Smart training facility* memanfaatkan teknologi terkini sebagai fasilitas penyelenggaraan pelatihan. Ragam komponen *smart training facility* yang dimaksudkan mencakup *smart infrastructure* (perangkat), *smart classroom*, dan *smart monitoring* peserta pelatihan. Dalam membangun *smart training facility*, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BDI, yaitu:

- 1) Mengembangkan infrastruktur berbasis *smart*/industri 4.0.
- 2) Mengembangkan model *smart training*.
- 3) Mengembangkan *Learning Management System* (LMS) yang terintegrasi.

8. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian

Pembina industri merupakan salah satu unsur SDM industri selain tenaga kerja industri dan wirausaha industri. Kebijakan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah diambil pemerintah berdampak pada peningkatan kebutuhan pelatihan pada setiap jenjang jabatan fungsional. Arah kebijakan pengembangan dan pembinaan pembina industri baik di tingkat pusat maupun daerah telah disusun oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Sebagai unit kerja pelatihan yang dimiliki Kemenperin, BDI juga mendapatkan mandate untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pembina industri pusat dan daerah, khususnya bagi jabatan fungsional yang berada di lingkungan Kemenperin. Langkah yang dilakukan BDI sebagai penyelenggara pelatihan bagi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu:

- 1) Rekrutmen peserta
- 2) Penyiapan tenaga pengajar
- 3) Penyiapan sarana prasana
- 4) Penyiapan Tempat Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional

F. Program dan Kegiatan

BPSDMI kementerian perindustrian menetapkan 2 program yang dilaksanakan yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen melalui 5 kegiatan yaitu Pelatihan Vokasi Industri, Pendidikan Tinggi Vokasi Industri, Pendidikan Menengah Kejuruan Industri, ASN, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, dan Peningkatan Kompetensi ASN.

Adapun kegiatan rincian output (KRO) BPSDMI yang dilakukan untuk mencapai kegiatan dan program tersebut:

1. Pelatihan Vokasi Industri (4957)

- a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (BDB)

- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri
- b. Pelatihan Bidang Industri (DCH)
 - Asessor Lisensi dan Asessor Kompetensi
 - Layanan Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
- c. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (FAI)
 - Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi
- d. Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (PBK)
 - Rancangan SKKNI Sektor Industri
 - Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi
- e. Sertifikasi Profesi dan SDM (PDI)
 - Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi
- f. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (QDC)
 - Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri
- g. Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan (RBL)
 - Peralatan Pelatihan Vokasi Industri
- h. Pelatihan Bidang Industri (SCH)
 - Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)
 - Pelatihan Vokasi Industri Upskilling dan Reskilling
 - Tenaga Kerja Industri 4.0

2. Pendidikan Tinggi Vokasi Industri (4958)

- a. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (FAI)
 - Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi
- b. Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (RBJ)
 - Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri
 - Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri
- c. Pendidikan Vokasi Bidang Industri (SAG)
 - Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler
 - Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerjasama Industri

3. Pendidikan Menengah Vokasi Industri (4959)

- a. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (FAI)
 - Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi
 - Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Industri yang Terbentuk dan Beroperasi
 - Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri yang Terbentuk dan Beroperasi
- b. Kerja sama (PEC)
 - SMK yang Link And Match dengan Industri
- c. Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (RBI)
 - Bangunan/Gedung Pendidikan Menengah Vokasi Industri
 - Peralatan Pendidikan Menengah Vokasi Industri
- d. Pendidikan Vokasi Bidang Industri (SAG)
 - SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri

4. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (6043)

- a. Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA)
 - Layanan Perkantoran
- b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (EBB)
 - Layanan Sarana dan Prasarana
- c. Layanan Manajemen Kinerja internal
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal BPSDMI Pusat
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal SMK Industri
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat Industri

5. Peningkatan Kompetensi ASN (6893)

- a. Layanan Manajemen SDM Internal (EBC)
 - SDM Aparatur Lulusan Diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis Industri
 - Layanan Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional

- Layanan Pengembangan Program Digital ASN
- Layanan Pendidikan dan Pelatihan

2.1.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini merupakan pembabakan dan penjabaran dari Renstra BPSDMI, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan BPSDMI selama satu tahun. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Kinerja Tahun 2023, BPSDMI menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional, dengan Indikator Tujuan Tersedianya SDM Industri yang kompeten sebanyak 34.000 orang.

- **Perspektif Stakeholder**

- **Sasaran Program 1** Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja:

1. Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas 21,01 Juta Orang
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja sebanyak 15,20%
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 117,50 Rp Juta/orang/tahun
4. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi 26.500 orang
5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sebesar 81%

- **Perspektif Customer**

- **Sasaran Program 2** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja:

1. SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya sebanyak 600 orang
2. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi sebanyak 21 Implementasi
3. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 sebesar 90%

- **Sasaran Program 3** Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian, dengan indikator kinerja:
 1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik sebesar 87%
 2. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional sebesar 80%

- **Perspektif Internal Process**
- **Sasaran Program 4** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 1. Infrastruktur kompetensi industri sebanyak 7 SKKNI
 2. Fasilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri sebanyak 20 LSP
 3. Asesor kompetensi dan lisensi sebanyak 145 orang
 4. Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitas sertifikasi kompetensi sebanyak 1.500 orang
 5. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat sebanyak 21 perusahaan
 6. Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik senilai 334
 7. Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional sebanyak 170 penelitian
 8. Inkubator Bisnis industri yang tumbuh sebanyak 60 tenant

- **Perspektif Learn & Growth**
- **Sasaran Program 5** Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:
 1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 70%
- **Sasaran Program 6** Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
 1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

senilai 76

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 76
 3. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri senilai 79
- **Sasaran Program 7** Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian, dengan indikator kinerja:
 1. Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN BPSDMI senilai 71
 - **Sasaran Program 8** Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja:
 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sebesar 92%
 2. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) selevel 2,89
 - **Sasaran Program 9** Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, dengan indikator kinerja:
 1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 78%

2.1.3 Indikator Kinerja Utama BPSDMI

Dari sasaran program dan indikator kinerja diatas, BPSDMI menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator pada perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas 21,01 Juta Orang
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja sebanyak 15,20%
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 117,50 Rp Juta/orang/tahun
4. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi 26.500 orang
5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sebesar 81%
6. SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya sebanyak 600 orang
7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik sebesar 87%
8. Infrastruktur kompetensi industri sebanyak 7 SKKNI

9. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 70%

2.2 Dukungan Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja BPSDMI, pada tahun anggaran 2023 alokasi anggaran final Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (Pusat) sendiri adalah sebesar 226.234.349.000. Sedangkan untuk anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan Satuan Kerja di Lingkungan BPSDMI adalah Rp. 967.749.902.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan BPSDMI dan Satuan Kerja yang berada di lingkungan BPSDMI, dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	967.749.902.000
579331	POLITEKNIK AKA BOGOR	43.030.334.000
579332	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK BOGOR	21.775.383.000
579333	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	29.780.834.000
579334	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI YOGYAKARTA	19.361.299.000
579335	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	27.352.311.000
579336	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI MAKASSAR	19.272.008.000
579337	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK MAKASSAR	16.866.259.000
579338	POLITEKNIK STTT BANDUNG	34.715.979.000
579339	BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA	38.978.409.000
579340	BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN	29.263.406.000
579341	BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR	35.208.413.000
579342	BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR	31.416.804.000
579343	BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG	24.381.195.000
579344	BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA	39.863.294.000
579345	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDA ACEH	17.254.429.000
579346	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN	30.391.482.000
579347	POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI	12.665.445.000
579348	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFaktur BANTAENG	12.703.498.000
579349	POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL	13.827.883.000
579350	POLITEKNIK STMI JAKARTA	35.109.284.000
579351	POLITEKNIK APP JAKARTA	29.352.019.000

Kode	Uraian	Pagu
579352	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA	16.591.003.000
579355	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PADANG	16.267.903.000
579356	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDAR LAMPUNG	18.664.765.000
579357	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PONTIANAK	18.098.851.000
579358	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK PADANG	21.604.634.000
579359	POLITEKNIK ATI PADANG	31.952.402.000
579360	BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA	40.069.401.000
579361	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	226.234.349.000
619101	POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN	15.696.626.000

Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pengembangan sumber daya manusia industri. BPSDMI pada tahun 2023 memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp. 994.645.664.000 yang dialokasikan untuk membiayai dua program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen. Namun pada perjalanannya pagu anggaran BPSDMI beberapa kali mengalami perubahan hingga pada akhirnya pagu anggaran final BPSDMI turun menjadi Rp. 967.749.902.000 yang mayoritas disebabkan oleh penarikan blokir Automatic Adjustment oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada BPSDMI di dasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk (DIPA) Nomor SP DIPA-019.10-0/2023 tanggal 30 November 2022. Selama periode berlangsung BPSDMI melakukan 8 (delapan) kali perubahan anggaran dengan detail sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Pagu

Kode	Uraian	Jan	Peb	Apr	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	994.645.664.000	995.628.138.000	997.115.597.000	954.446.738.000	959.599.196.000	959.611.196.000	931.996.344.000	936.083.836.000	967.749.902.000
4957.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.740.000.000	2.740.000.000	2.740.000.000	2.740.000.000	2.740.000.000	2.740.000.000	2.553.926.000	2.572.112.000	2.572.112.000
4957.DCH	Pelatihan Bidang Industri	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4957.FAI	Peningkatan Manaiemen Lembaga Pemerintahan	1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000	1.100.000.000	1.162.144.000	1.162.144.000
4957.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.229.500.000	5.229.500.000	5.229.500.000	5.229.500.000
4957.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4957.QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	2.800.835.000	2.800.835.000	2.800.835.000
4957.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.549.370.000	2.549.370.000
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	206.000.000.000	206.000.000.000	206.000.000.000	206.000.000.000	206.000.000.000	205.770.500.000	201.067.049.000	197.951.905.000	197.951.905.000
4958.FAI	Peningkatan Manaiemen Lembaga Pemerintahan	16.804.227.000	17.204.227.000	17.204.227.000	17.204.227.000	17.204.227.000	17.204.227.000	15.738.299.000	16.369.258.000	16.369.258.000
4958.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	31.064.641.000	31.064.641.000	32.552.100.000	32.552.100.000	36.704.558.000	36.704.558.000	36.204.558.000	36.863.500.000	36.863.500.000
4958.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	79.503.921.000	79.925.965.000	79.925.965.000	79.925.965.000	79.925.965.000	79.925.965.000	76.652.263.000	77.361.035.000	77.361.035.000
4959.FAI	Peningkatan Manaiemen Lembaga Pemerintahan	7.736.251.000	7.736.251.000	7.736.251.000	7.736.251.000	7.736.251.000	7.736.251.000	6.806.963.000	6.752.489.000	6.752.489.000
4959.PEC	Kerja sama	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000
4959.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	94.306.909.000	95.289.383.000	95.289.383.000	95.289.383.000	95.289.383.000	95.289.383.000	94.637.790.000	95.002.278.000	95.002.278.000
4959.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	34.591.690.000	34.591.690.000	34.591.690.000	34.591.690.000	34.591.690.000	34.591.690.000	28.873.171.000	28.540.381.000	28.540.381.000
6043.EBA	Layanan Dukungan Manaiemen Internal	452.297.359.000	451.457.915.000	451.544.788.000	408.875.929.000	408.365.929.000	408.377.929.000	406.476.587.000	408.069.459.000	440.075.525.000
6043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	650.000.000	650.000.000	636.932.000	636.932.000	1.646.932.000	1.646.932.000	1.646.932.000	3.922.987.000	3.922.987.000
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	38.746.276.000	38.763.676.000	38.689.871.000	38.689.871.000	38.189.871.000	38.189.871.000	32.254.081.000	31.982.193.000	31.642.193.000
6893.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	11.054.390.000	11.054.390.000	11.054.390.000	11.054.390.000	11.054.390.000	11.054.390.000	11.004.390.000	11.004.390.000	11.004.390.000
KETERANGAN			Tambahan pematangan lahan SMAK Bogor	Tambahan BLU AKA Bogor	Penarikan Blokir AA Belanja Barang dan Belanja Modal	Tambahan BLU AKA Bogor	Tambahan PNBPNBP	Penarikan Blokir AA Belanja Pegawai	Tambahan BLU dan PNBPNBP	Tambahan kekurangan Belanja Pegawai

Dengan anggaran DIPA Induk BPSDMI tersebut kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen BPSDMI Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

a) Pelatihan Vokasi Industri

Pelatihan Vokasi Industri memiliki pagu anggaran sebesar Rp 218.265.866.000 dengan output:

1. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga sebesar Rp. 2.572.112.000
2. Pelatihan Bidang Industri sebesar Rp. 3.000.000.000
3. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan Rp. 1.162.144.000
4. Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM sebesar Rp. 5.229.500.000
5. Sertifikasi Profesi dan SDM sebesar Rp. 3.000.000.000
6. Fasilitasi dan Pembinaan Start Up sebesar Rp. 2.800.835.000
7. Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan sebesar Rp. 2.549.370.000
8. Pelatihan Bidang Industri sebesar Rp. 197.951.905.000

b) Pendidikan Tinggi Vokasi Industri

Pendidikan Tinggi Vokasi Industri memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 130.593.793.000 dengan output:

1. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan sebesar Rp. 16.369.258.000
2. Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi sebesar Rp. 36.863.500.000
3. Pendidikan Vokasi Bidang Industri sebesar Rp. 77.361.035.000

c) Pendidikan Menengah Kejuruan Industri

Pendidikan Menengah Kejuruan Industri memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 132.245.148.000 dengan output:

1. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan sebesar Rp. 6.752.489.000
2. Kerja sama sebesar Rp. 1.950.000.000
3. Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp. 95.002.278.000

4. Pendidikan Vokasi Bidang Industri sebesar Rp. 28.540.381.000

d) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 475.640.705.000 dengan output:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp. 440.075.525.000
2. Layanan Sarana Internal sebesar Rp. 3.922.987.000
3. Layanan Manajemen Kinerja Internalsebesar Rp. 31.642.193.000

e) Peningkatan Kompetensi ASN

Peningkatan Kompetensi ASN memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 11.004.390.000 dengan output:

1. Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp. 11.004.390.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah

BPSDMI sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Perindustrian, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri (Pasal 248). Sejalan dengan pelaksanaan tersebut dan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2020-2024 yang pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kementerian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM industri dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri. Rencana strategis (renstra) memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMI.

Tabel Target Kinerja Renstra BPSDMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2022	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya peran SDM industri dalam perekonomian nasional							
		Tersedia SDM industri yang kompeten	orang	29000	54000	36000	34.000	128000
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas							
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,01	21,94
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,20	15,65
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	117,50	124,73
	4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17000	43000	27600	26.500	100000
	5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2022	2022	2023	2024
SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>							
	1	SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400
	2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	21	9
	3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	30	50	70	90	95
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90
	2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	Persen	0	70	75	80	85
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan							
	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8	8	10	7	10
	2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	5	6	20	15	20
	3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	145	320
	4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	4	6	8	21	12
	5	Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	334 (B)	361 (A)
	6	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200
	7	Inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70
SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
SP6	Terwujudnya Birokrasi BPSDMI yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	1	Nilai laporan keuangan BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BPSDMI	Persen	70	72	74	76	78
	3	Nilai kearsipan BPSDMI	Nilai	0	75	77	79	80
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Indeks	70	71	73	71	80
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92	93
SP9	Tersedianya Regulasi terkait SDM Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Persen	-	72	74	78	78

Rencana anggaran BPSDMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis /	Satuan	Alokasi (dalam milyar rupiah)						Unit Terkait	
	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		2019	2020	2022	2022	2023	2024		
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri										
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas									
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	0	0	0	0	0	0	Set. BPSDMI
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	0	0	0	0	0	0	Set. BPSDMI
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	0	0	0	0	0	0	Set. BPSDMI
	4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	139.021403	13.741571	8.351605	27	35	35	Pusdiklat SDM Industri dan BDI
	5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	Persen	5	3.728	4.6699	9.25622	10	12	PPPVI, SMK, dan Politeknik
SP2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>									
	1	SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang			0.487395	4.2	10	10	Pusdiklat SDM Industri
	2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1.7	0	0	0	0	0	PPPVI, SMK, dan Politeknik
	3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	211.5558	47.154287	167.193984	52.408889	160	80	Pusdiklat industri dan PPPVI
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian									
	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	17.406716	13.488987	7.584581	11.28339	44.334366	50	Pusbindiklat SDM Aparatur
	2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	Persen	0	0.282655	2.388029	1.71661	10	10	Pusbindiklat SDM Aparatur
SP4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan									
	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8.82845	2.685414	2.711667	3	8	8	Pusdiklat SDM Industri
	2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	LSP dan TUK	0.4619	0.5	0.532116	2	3	3	Pusdiklat SDM Industri
	3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	3.36675	1.88295	2	2	9.5	9.5	Pusdiklat SDM Industri
	4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	26.087333	6.338215	2.874704	4.354584	5	5	PPPVI
	5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	2.759595	3.85636	3.165052	4.010146	5	5	PPPVI

6	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasiikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	2.430973	2.077421	0.955018	2.4	3	3	PPPVI dan Politeknik/ Akom
7	Inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	0	0	0	0	0	0	Pusdiklat SDM Industri dan Politeknik/ Akom
SP5 Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri									
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Persen	217.38549	35.965637	97.868034	81.6096	96.806909	51.903456	Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSDMI
SP6 Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima									
1	Nilai laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	0.936334	1.442173	1.100342	3.3615	4	4	Set. BPSDMI
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	4.013321	2.545148	3.834002	5.887707	5.25	5.25	Set. BPSDMI
3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0.15838	0.13385	0.602531	0.806035	1	1	Set. BPSDMI
SP7 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian									
1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Indeks	2.109735	1.17487	1.054132	2.343612	2.5	2.5	Set. BPSDMI
SP8 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	0.429971	0.335406	0.372643	0.367578	0.5	0.5	Set. BPSDMI
2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	0	0.08216	0.173149	0.12638	0.25	0.25	Set. BPSDMI
SP9 Tersedianya regulasi terkait SDM industri yang efektif									
1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Persen	0	0.480327	0.581068	1.386388	1.5	1.5	Set. BPSDMI
1	Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Orang	8.9462	2	2.599852	3	15	15	Pusdiklat Industri
1	Gaji, Tunjangan, dan Operasional		31.124763	30.695201	32.371346	42.573278	47	69.8	Set. BPSDMI

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi BPSDMI yaitu "Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh".

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2023 dengan realisasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 sudah dapat dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini sebagaimana pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilakukan oleh pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada akhir tahun 2023 yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPSDMI Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	%	Keterangan
PERSPEKTIF STAKEHOLDER								
SP 1	Meningkatny Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	21,01	Juta Orang	19,29	91,81%	Tenaga kerja industri pengolahan non migas
		2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	15,20	Persen	13,80	90,79%	Tenaga kerja industri pengolahan non migas
		3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	117,50	Rp Juta /orang/ tahun	88,30	75,15%	Tenaga kerja industri pengolahan non migas namun masih menggunakan PDB triwulan III
		4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	26.500	Orang	33.094	124,88%	BDI Surabaya 5.268 orang BDI Makassar 5.255 orang BDI Medan 3.350 orang BDI Jakarta 6.700 orang BDI Padang 3.045 orang BDI Denpasar 2.996 orang BDI Yogyakarta 6.030 orang Pusdiklat 450 orang
		5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	81	Persen	91,43	112,88%	Total lulusan SMK 2.041 lulusan tahun 2022 dengan 2.015 lulusan telah terserap Total lulusan Politeknik 4.072 lulusan tahun 2022 dengan 3.574 lulusan telah terserap
PERSPEKTIF CUSTOMER								
SP 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	600	Orang	763	127,17%	Microcontrollers Arduino Batch 1 18 Pelatihan Dasar Robot Industri (Robot 4 Axis) Batch 1 21 Data Scientist Batch 1 39 Cloud Computing Engineer 40 Pneumatik dan Hidrolik Batch 1 22 Pneumatik dan Hidrolik Batch 2 29 Pelatihan Pengoperasian Internet of Things (IoT) Batch 1 30 Pelatihan Pengoperasian Internet of Things (IoT) Batch 2 27 Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 1 47 Pelatihan Data Analyst Batch 1 19 Pelatihan Data Analyst Batch 2 20 Pelatihan Data Analyst Batch 3 20 Pelatihan Dasar Robot Industri (Robot 4 Axis) Batch 2 21 Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 2 45 Pneumatik dan Hidrolik Batch 3 20 Pneumatik dan Hidrolik Batch 4 20 Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 3 54 Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 4 51 Supervisor Mekatronika Batch 1 25 Supervisor Mekatronika Batch 2 25 Supervisor Mekatronika Batch 3 15 Project Management 56 Software, Cybersecurity, Sustainability 30 Cyber Resilience Building a Secure Tomorrow 27 Lean Manufacturing 4.0 21 Lean Manufacturing 4.0 21
		2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	21	Implementasi	24	114,29%	STMI Jakarta 1 STTT Bandung 3

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	%	Keterangan
								AKA Bogor 1 PTKI Medan 3 ATI Padang 1 APP Jakarta 1 ATI Makassar 1 Akom Surakarta 1 PIL Morowali 1 PIFPK Kendal 1 Akom Bantaeng 1 Poltek Banten 2 SMAK Bogor 1 SMAK Padang 1 SMAK Makassar 0 SMTI Makassar 1 SMTI Yogyakarta 1 SMTI Bandar Lampung 2 SMTI Padang 1
		3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	90	Persen	92,34	102,60%	Realisasi Gedung Realisasi Alat Realisasi Kegiatan yang Terencana
SP 3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Kompeten dan Profesional	1	Presentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik (pendidikan & pelatihan)	87	Persen	98,41	113,11%	Pelatihan Web Programming Diklat Teknis Video dan Audio Editing Basic Program IELTS Preparation and International Pelatihan Auditor Halal Pelatihan PFPP tingkat dasar Pelatihan Pembuatan Content Creation
		2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	80	Persen	94,01	117,51%	Kuisisioner Jabatan Fungsional
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS								
SP 4	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1	Infrastruktur kompetensi industri	7	SKKNI	8	114,29%	1. SKKNI Industri Tekstil Non Woven 2. SKKNI Semikonduktor 3. SKKNI Maintenance Alat Berat 4. RKKNI Bidang Pembuatan Molds and Dies 5. RKKNI Bidang Pembuatan Jigs and Fixtures 6. RKKNI Industri Manufaktur Otomotif Roda 4 7. RKKNI Industri Petrokimia 8. RSKKNI Jabatan Verifikator TKDN
		2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	20	Unit	38	190%	Fasilitasi CLSP 1. LSP Lean Manufaktur Indonesia Unggul (Asosiasi Industri Automotive Industrial People Development / IAIPD) 2. LSP Agroindustri Unggul (Asosiasi Industri Asosiasi Agroindustri Indonesia / AGRIN) 3. LSP Pengolahan Atsiri (Asosiasi Profesi Asosiasi Peneliti Atsiri Indonesia / APAI) 4. LSP Industri Penyamakan Kulit (Asosiasi Industri Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia / APKI) 5. LSP Industri Karoseri Indonesia (Asosiasi Industri Asosiasi Karoseri Indonesia / ASKARINDO) 6. LSP Kriyalist (Asosiasi Industri Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta / KP3Y) 7. LSP Mega Andalan Kalasan (Perusahaan Industri PT Mega Andalan Kalasan) Fasilitasi Pengembangan LSP berupa workshop penyusunan Skema dan MUK: 1. LSP Elektroteknika

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	%	Keterangan
								2. LSP Pengolahan Kopi 3. LSP Pos Logistik Indonesia 4. LSP Kimia Industri 5. LSP Garment 6. LSP Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI) 7. LSP Persemenan Indonesia 8. LSP Industri Otomotif Indonesia (LSP IOI) Fasilitasi Pengembangan LSP berupa Pelatihan Pengelolaan LSP : 9. LSP Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan 10. LSP SMK SMTI Padang 11. LSP Politeknik ATI Padang 12. LSP Politeknik STMI Jakarta 13. LSP Politeknik APP Jakarta 14. LSP Politeknik AKA Bogor 15. LSP Politeknik Industri Furniture Kendal 16. LSP Politeknik ATK Yogyakarta 17. LSP Politeknik ATI Makassar 18. LSP AK-Tekstil Solo 19. LSP AK-Manufaktur Bantaeng 20. LSP SMK-SMTI Banda Aceh 21. LSP SMK-SMTI Bandar Lampung 22. LSP SMK-SMAK Bogor 23. LSP SMK-SMTI Pontianak 24. LSP SMK-SMAK Makassar 25. LSP BDI Padang 26. LSP BDI Jakarta 27. LSP BDI Yogyakarta 28. LSP BDI Surabaya 29. LSP BDI Denpasar 30. LSP BDI Makassar 31. LSP BPIPI
		3	Asesor Kompetensi	145	Orang	191	131,72%	Diklat asesor 96 orang Diklat RCC asesor 95 orang
		4	Tenaga Kerja Industri yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	1.500	Orang	4.355	290,33%	Sertifikasi kompetensi pada sektor industri tekstil dan produk tekstil, elektronika, kreatif/animasi, otomotif, logam mesin, kimia, agro
		5	Perusahaan yang memanfaatkan layanan Industri dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat	21	Perusahaan/ Industri	128	609,52%	STMI Jakarta 20 STTT Bandung 4 AKA Bogor 37 PTKI Medan 10 ATI Padang 7 ATK Yogyakarta 13 APP Jakarta 1 ATI Makassar 4 PIFPK Kendal 6 Akom Bantaeng 6 Poltek Banten 1 SMAK Bogor 2 SMAK Makassar 5 SMTI Banda Aceh 2 SMTI Yogyakarta 2 SMTI Bandar Lampung 3 SMTI Padang 2 SMTI Pontianak 3
		6	Nilai minimum akreditasi program studi	334	Nilai	336	100,60%	Akreditasi 11 Politeknik dan 2 akademi komunitas di lingkungan BPSDMI
		7	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	170	Penelitian	264	155,29%	Seminar nasional 3 Seminar Internasional 50 Jurnal Nasional 174 Jurnal Internasional 37

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	%	Keterangan
		8	Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh	60	Tenant	86	143,33%	BDI Denpasar 22 BDI Makassar 10 BDI Medan 4 BDI Surabaya 2 BDI Jakarta 5 BDI Padang 10 BDI Yogyakarta 4 STTT Bandung 15 AKA Bogor 4 STMI Jakarta 6 PTKI Medan 1 ATI Padang 2 APP Jakarta 1 PIL Morowali 1
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH								
SP 5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	70	Presentase	86,70	123,86%	Presentase capaian pada intranew kementerian perindustrian
SP 6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	76	Nilai	77,75	102,30%	Penilaian laporan keuangan oleh Biro Keuangan
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	76	Nilai	74,15	97,57%	Penilaian LAKIP oleh inspektorat jenderal
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	79	Nilai	82,24	104,10%	Penilaian kearsipan oleh ANRI
SP 7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	71	Indeks	71,00	100,00%	Nilai IP ASN 4 pusat, 7 BDI, 9 SMK, 13 Politeknik/Akom
SP 8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92	Presentase	98,55	107,12%	Rekomendasi hasil pengawasan internal oleh inspektorat jenderal yang telah ditindaklanjuti
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	2,89	Level	3,45	119,20%	Nilai tingkat Kementerian
SP 9	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	78	Presentase	86,00	110,26%	Kuisisioner untuk KKNI Bidang Otomasi Industri (Permenperin No. 49 Tahun 2018) KKNI Bidang Otomotif Subbidang Body Repair (Permenperin No. 38 Tahun 2020) KKNI Bidang Otomotif Subbidang Komponen (Permenperin No. 37 Tahun 2020) KKNI Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan (Permenperin No. 34 Tahun 2020)

3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2020, terdapat 4 (empat) Perspektif, 9 (sembilan) Sasaran

Progran, dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja. Pada capaian kedua puluh enam indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yang realisasi dibawah target dikarenakan keterbatasan anggaran yang diperoleh serta penarikan blokir automatic adjustment oleh kemenkeu di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang berakibat pada kurang maksimalnya output yang dihasilkan, detail capaian tersebut berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional, memiliki indikator tujuan:

1. Tersedianya SDM Industri yang kompeten

Indikator Tersedianya SDM Industri yang kompeten merupakan jumlah lulusan politeknik dan SMK pada tahun 2023, jumlah orang SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya, jumlah orang yang mengikuti diklat teknis, diklat fungsional, rintisan gelar, jumlah orang dalam seluruh tenant inkubator bisnis, dan jumlah Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Tersedianya SDM Industri yang kompeten pada 2023 sebesar 45.219 orang atau 133% dari target 34.000 orang. Indikator Kinerja Tersedianya SDM Industri yang kompeten telah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Jumlah
Lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi	33.094
Lulusan Tahun Berjalan	5.673
SDM 4.0	763
Diklat teknis	618
Diklat Fungsional	179
Rintisan Gelar	78
Inkubator Bisnis Industri yang tumbuh (Orang)	459
Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	4.355
TOTAL	45.219

Realisasi Indikator Tujuan

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
		T	R	T	R	T	R	C (%)		
TJ	Tersedianya SDM Industri yang kompeten	54000	59445	30000	40382	34000	45219	133	SDM Kompeten	Persen

Capaian indikator tujuan Tersedianya SDM Industri yang kompeten pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 22,92% menjadi 133% pada tahun 2022.

Pencapaian ini dapat terwujud dikarenakan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPSDMI maupun satuan kerja di lingkungan BPSDMI mampu berjalan dengan baik walaupun terdapat hambatan seperti adanya penarikan blokir automatic adjustment oleh Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada Kementerian Perindustrian.

- **Prespektif Stakeholder**

Sasaran Program 1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas memiliki 5 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	18,29	18,65	20,84	19,11	21,01	19,29	91,8%	Tenaga kerja industri pengolahan non migas	Juta Orang
		2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	13,96	14,23	14,96	14,13	15,2	13,8	90,8%	Tenaga kerja industri pengolahan non migas	Persen
		3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	115,46	111,6	115,77	114,33	117,5	118,6	100,9%	Tenaga kerja industri pengolahan non migas namun masih menggunakan PDB triwulan III	Rp Juta /orang/ tahun
		4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	43.000	47.752	25.700	27.769	26.500	33.094	124,9%	Diklat 3 in 1	Orang
		5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	77	91	79	100	81	91,43	112,9%	Lulusan SMK dan Politeknik Tahun 2022 yang terserap (bekerja, melanjutkan studi, wirausaha)	Persen

1. Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri pengolahan nonmigas diharapkan menjadi leading sektor yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan nonmigas dihitung menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS berdasarkan

jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan non migas dari Sakernas yaitu KBLI 10-18 dan 20-33. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung oleh Sakernas setiap bulan Februari dan Agustus dengan estimasi perilisan data 1-2 bulan setelah dihitung, sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dihitung pada Agustus 2023.

Capaian atau realisasi pada Indikator Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada 2023 sebesar 19,29 juta orang atau 91,18% dari target 21,01 juta orang. Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas belum memenuhi perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	18,29	18,65	20,84	19,11	21,01	19,29	91,8%	Tenaga kerja industri pengolahan non migas	Juta Orang

Berdasarkan data yang dirilis oleh Sakernas Agustus 2023 jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas sebanyak 19,29 juta orang atau mencapai 91,8% dari target pada Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 21,01 juta orang. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 0,64 juta orang. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas sebanyak 21,94 juta orang. Namun berdasarkan rewiu yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian pada akhir tahun 2023, menetapkan bahwa target indikator ini di tahun 2024 berubah menjadi 20,33 juta orang. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 91,8% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang

telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 20,33 juta orang. Rincian Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas sebagai berikut:

KBLI	Sektor	2021	Feb-22	Aug-22	Feb-23	Aug-23
10	Industri Makanan	5.016.316	5.211.127	5.218.967	5.324.269	5.552.983
11	Industri Minuman	425.037	370.373	506.398	422.071	476.546
12	Industri Pengolahan Tembakau	514.019	352.138	439.730	302.234	537.452
13	Industri Tekstil	1.129.954	1.056.405	1.107.639	1.034.691	1.071.953
14	Industri Pakaian Jadi	2.522.691	2.577.137	2.705.414	2.940.908	2.693.406
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	759.471	1.065.283	962.760	931.787	935.646
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1.689.993	1.895.932	1.696.590	1.614.705	1.580.321
17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	286.758	206.017	261.578	265.014	275.357
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	282.050	200.007	347.392	220.177	297.877
19	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	46.379	38.553	58.384	54.531	48.194
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	401.583	361.470	381.164	324.481	357.685
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	152.411	122.081	157.872	111.104	140.785
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	569.787	546.765	611.730	505.310	555.682
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	1.151.438	1.021.226	924.880	1.019.665	1.047.335
24	Industri Logam Dasar	259.290	210.305	235.566	166.475	258.864
25	Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya	667.333	535.336	615.650	594.107	605.546
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	160.632	125.722	154.997	120.978	167.254
27	Industri Peralatan Listrik	230.936	166.411	190.408	160.962	186.835
28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	201.808	128.830	212.284	132.711	215.117
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	190.454	193.991	210.479	261.061	243.858
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	196.748	257.302	253.311	248.220	249.110
31	Industri Furnitur	843.940	1.053.028	878.487	1.030.360	790.020
32	Industri Pengolahan Lainnya	771.423	762.512	843.132	833.491	831.790
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	224.012	213.975	197.585	210.685	223.716
Total Industri Pengolahan		18.694.463	18.671.926	19.172.397	18.829.997	19.343.332
Total Industri Pengolahan Non Migas		18.648.084	18.633.373	19.114.013	18.775.466	19.295.138

*Data dihitung per Februari dan Agustus, rilis \pm 3 bulan

Sumber: Sakrenas, diolah pusdatin

Belum tercapainya target tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas diantaranya dipengaruhi berbagai hal diantaranya kinerja sektor manufaktur, PDB, realisasi investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja, dan Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur. Menurunnya kinerja ekspor sangat berdampak pada kondisi perusahaan yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Selain itu sepanjang tahun 2023 terjadi banyak PHK yang di dorong oleh perubahan trend investasi dari padat karya menjadi padat modal. PHK yang terjadi secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh naiknya biaya operasional seperti biaya bahan baku dan biaya gaji yang mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dan berakibat pada turunnya jumlah tenaga kerja.

Berdasarkan data di atas sektor yang paling banyak mengalami penurunan tenaga kerja adalah sektor kayu dan furnitur, hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan akibat adanya ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan di dunia yang memicu perlambatan ekonomi global seperti perang antara Rusia melawan Ukraina dan Israel dengan Palestina, yang membuat ketidakpastian global meningkat sehingga permintaan ekspor mebel dan kerajinan menurun. Negara tujuan ekspor yang berada di kawasan Eropa dan Amerika lebih memprioritaskan pada komoditas pangan dan energi. Selain itu dengan diberlakukannya UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang mewajibkan adanya sertifikat yang menyatakan produk yang di produksi tidak menyebabkan kerusakan hutan turut menganjal produsen-produsen di Indonesia.

BPSDMI selalu berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja industri yang kompeten. Di antara upaya yang dilakukan adalah menjembatani para stake holder melalui pendidikan vokasi dengan Pendidikan SMK (SMAK-SMTI), Politeknik/Akademi Komunitas (Program S2/D4/D3/D2/Setara D1) yang materi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan industri, pelatihan vokasi melalui penyelenggaraan Diklat 3 in 1, pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri, dan pelaksanaan *link and match*.

BPSDMI sebagai unit eselon I Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja diantaranya berupa pelaksanaan diklat dengan skema 3 in 1 (pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi

kompetensi, dan penempatan kerja di industri) dengan total diklat 3 in 1 pada tahun sebanyak 33.094 orang yang berupa 32.719 diklat skilling, 325 diklat up-skilling, dan 50 diklat re-skilling di 20 sektor industri pengolahan non-migas yaitu Alas Kaki, Animasi, Desain Kemasan, Digital, Digital Marketing, Elektronika, Fiber Optik, Furnitur, Logam, Makanan Dan Minuman, Multimedia, Otomotif, Pengelasan, Pengolahan Agro, Pengolahan Hasil Laut, Pengolahan Kopi, Permesinan, Plastik, TPT, serta Pariwisata dan Perhotelan. Diklat dengan skema 3 in 1 telah memiliki perjanjian kerjasama antara Balai Diklat Industri dengan industri perihal penempatan kerja bagi peserta diklat, sehingga peserta diklat yang lulus dapat terserap atau mendapatkan pekerjaan.

Selain itu terdapat pula program *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia industri diantaranya dengan kegiatan peluncuran program vokasi industry yang ditandai dengan penanda tangan kerja sama antara SMK dengan industri. Dari tahun 2017 sd 2022 telah di fasilitasi kerja sama antara 2.615 SMK dengan 856 industri, Melakukan penyelarasan kurikulum untuk 34 kompetensi keahlian terkait dengan sektor industri manufaktur, Melakukan peningkatan kompetensi bagi guru SMK baik melalui pelatihan maupun magang di industri baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2018 sebanyak 1.554 Guru SMK mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1.783 Guru, Tahun 2020 sebanyak 250 Guru, Tahun 2021 sebanyak 232 Guru, Tahun 2022 sebanyak 481 guru SMK, Melakukan kegiatan pelatih di tempat kerja untuk membimbing siswa/ mahasiswa praktek kerja industri dan magang bagi guru/dosen. Kegiatan ini dari tahun 2018 samapai dengan tahun 2023 telah melahirkan 360 pelatih di tempat kerja, 64 master trainer dan 5 orang senior master trainer, dan Menyelenggarakan kegiatan klinik konsultasi insentif *super tax deduction* kegiatan vokasi.

Insentif *Super Tax Deduction* adalah insentif perpajakan yang diberikan bagi industri yang terlibat dalam melaksanakan program vokasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan pengurangan. Dalam mendukung penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah tentang insentif *Super Tax Deduction* kegiatan vokasi maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri bekerja sama dengan GIZ, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jendral Pajak

Kementerian Keuangan dan Kadin Indonesia membuat website <https://coachingclinicstd.kemenperin.go.id>. Terdapat 93 perusahaan (5 batch) yang ikut dalam kegiatan fasilitasi *cost and benefit* vokasi industri tahun 2023 yang berupa klinik konsultasi insentif *super tax deduction*. Per 2020-2023 terdapat 74 perusahaan yang berhasil memanfaatkan insentif *super tax deduction*.

- **Kendala:**

1. Data dihitung dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Februari dan bulan Agustus oleh Sakernas, selain itu data yang telah dihitung memiliki waktu rilis yang tidak pasti ± 3 bulan sehingga data yang didapatkan tidak bersifat *realtime* sehingga tidak dapat menggambarkan kinerja secara akurat mengingat pelaporan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun. Sebagaimana pada LAKIP ini dimana laporan disusun dengan *cut-off* pada akhir desember 2023 namun data yang diperoleh adalah perhitungan pada bulan Agustus 2023.
2. BPSDMI tidak memiliki program maupun kegiatan yang berdampak signifikan pada indikator ini karena BPSDMI tidak mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan industri pengolahan non migas, hal ini berada pada kewenangan Direktorat sektor terkait.

- **Tindak Lanjut:**

1. Terus berkoordinasi dengan Pusdatin selaku penyedia data industri di Kementerian Perindustrian
2. Berencana untuk mengadakan FGD pada tahun 2024 dalam upaya untuk dapat *insight* dari para profesional atau yang membidangi ketenagakerjaan.

2. **Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja**

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan

penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing.

Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas yaitu Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung oleh Bappenas setiap bulan Februari dan Agustus dengan estimasi perilisan data 1-2 bulan setelah dihitung, sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dihitung pada Agustus 2023.

Capaian atau realisasi pada Indikator Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja pada 2023 sebesar 13,8% atau 90,8% dari target 15,2%. Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	13,96	14,23	14,96	14,13	15,2	13,8	90,8%	Tenaga kerja industri pengolahan non migas	Persen

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2023, persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja adalah sebesar 13,8% atau telah mencapai 90,8% dari target pada Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 15,2%. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 0,43%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap

total pekerja sebanyak 15,65%. Namun berdasarkan reuiu yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian pada akhir tahun 2023, menetapkan bahwa target indikator ini di tahun 2024 berubah menjadi 14,29%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 90,8% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 14,29%. Rincian Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja sebagai berikut:

Sektor	2020	2021	Feb-22	Aug-22	Feb-23	Aug-23
Total Industri Pengolahan	17.482.849	18.694.463	18.671.926	19.172.397	18.829.997	19.343.332
Total Industri Pengolahan Non Migas	17.439.589	18.648.084	18.633.373	19.114.013	18.775.466	19.295.138
Total Tenaga Kerja	128.454.184	131.050.523	135.611.895	135.296.713	138.632.511	139.852.377
% TK Industri Non Migas	13,58	14,23	13,74	14,13	13,54	13,80

*Data dihitung per Februari dan Agustus, rilis ± 3 bulan

Sumber: Sakrenas, diolah pusdatin

Secara keseluruhan, ketenagakerjaan sektor industri pengolahan nonmigas semakin membaik seiring dengan menguatnya perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan masa awal pandemi Covid-19 yang juga ditunjukkan oleh peningkatan pekerja sektor industri pengolahan nonmigas dibanding tahun 2020 sebesar 0,22 persen poin. Namun peningkatan ini belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan mengingat dampak panjang dari Covid-19 pada perekonomian Indonesia.

Indikator persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja dipengaruhi oleh hal-hal yang mempengaruhi indikator tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas. Apabila dilihat pada data diatas dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas

belum sebanding dengan kenaikan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena industri pengolahan non migas mayoritas merupakan industri padat karya sehingga dengan adanya penurunan permintaan yang ada membuat perusahaan memilih untuk melakukan efisiensi yang mengurangi jumlah pegawai daripada ekspansi yang menambah jumlah pegawai.

- **Kendala:**

1. Data dihitung dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Februari dan bulan Agustus oleh Sakernas, selain itu data yang telah dihitung memiliki waktu rilis yang tidak pasti ± 3 bulan sehingga data yang didapatkan tidak bersifat *realtime* sehingga tidak dapat menggambarkan kinerja secara akurat mengingat pelaporan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun. Sebagaimana pada LAKIP ini dimana laporan disusun dengan *cut-off* pada akhir desember 2023 namun data yang diperoleh adalah perhitungan pada bulan Agustus 2023.
2. BPSDMI tidak memiliki program maupun kegiatan yang berdampak signifikan pada indikator ini karena BPSDMI tidak mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan industri pengolahan non migas, hal ini berada pada kewenangan Direktorat sektor terkait.

- **Tindak Lanjut:**

1. Terus berkoordinasi dengan Pusdatin selaku penyedia data industri di Kementerian Perindustrian
2. Berencana untuk mengadakan FGD pada tahun 2024 dalam upaya untuk dapat *insight* dari para profesional atau yang membidangi ketenagakerjaan.

3. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara

nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas.

Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas yaitu Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung oleh Bappenas setiap bulan Februari dan Agustus dengan estimasi perilsan data 1-2 bulan setelah dihitung, sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dihitung pada Agustus 2023.

Capaian atau realisasi pada Indikator Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada 2023 sebesar 118,6 juta/orang/tahun atau 100,9% dari target 117,5 juta/orang/tahun. Indikator Kinerja Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP3	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	115,46	111,6	115,77	114,33	117,5	118,6	100,9%	Produktivitas menggunakan perhitungan PDB TW IV	Rp Juta /orang/ tahun

Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas pada tahun 2023 adalah sebesar Rp118,6 juta/orang/tahun atau mencapai 100,9% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 sebesar Rp 118,6 juta/orang/tahun. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 7 juta/orang/tahun. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebesar Rp124,73 juta/orang/tahun. Namun berdasarkan reuiu yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian pada akhir tahun 2023, menetapkan bahwa

target indikator ini di tahun 2024 berubah menjadi 122,30 juta/orang/tahun. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 100,9% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 124,73 juta/orang/tahun. Rincian Indikator Kinerja Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebagai berikut:

Data	2021	2022	2023
PDB ADHK IP Non Migas (Rp Juta)	2.081.054.793	2.185.263.337	2.287.660.200
Tenaga Kerja (Orang)	18.648.084	19.114.013	19.295.138
Produktivitas TK (Rp Juta/Orang/Tahun)	111,6	114,3	118,6

*Perhitungan produktivitas tenaga kerja pada umumnya dilakukan setelah angka full year terpenuhi

Sumber: Pusdatin (diolah)

Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja nonmigas BPSDMI telah melakukan pelatihan tenaga kerja pada sektor-sektor industri pengolahan non-migas (Alas Kaki, Animasi, Desain Kemasan, Digital, Digital Marketing, Elektronika, Fiber Optik, Furnitur, Logam, Makanan Dan Minuman, Multimedia, Otomotif, Pengelasan, Pengolahan Agro, Pengolahan Hasil Laut, Pengolahan Kopi, Permesinan, Plastik, TPT, serta Pariwisata dan Perhotelan) berupa diklat 3 in 1 yang memiliki jenis diklat berupa skilling, up-skilling, dan re-skilling.

Pelatihan skilling bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada calon tenaga kerja industri. Sasaran peserta pada pelatihan skilling adalah para calon tenaga kerja yang sedang tidak bekerja dan pada umumnya adalah mereka yang baru lulus dari Pendidikan di SMK/SMA. Ruang lingkup jenis pelatihan skilling ini diutamakan pada peningkatan keahlian calon tenaga kerja di level pemula atau untuk jabatan operator di perusahaan industri.

Pelatihan up-skilling ditujukan bagi para tenaga kerja industri untuk

meningkatkan keahlian teknis mereka ke level yang lebih tinggi dari keahlian yang sudah dimiliki. Pelatihan jenis ini diharapkan dapat membekali tenaga kerja untuk memperoleh kompetensi pada jenjang karier yang lebih tinggi dari posisi mereka saat ini di industri.

Pelatihan re-skilling bertujuan untuk menambah keahlian baru bagi para angkatan kerja ke bidang keahlian lain sesuai kebutuhan industri. Baik pelatihan up-skilling maupun re-skilling lebih fokus pada tenaga kerja yang sudah bekerja pada perusahaan industri dan memiliki keahlian sebelumnya ataupun terdampak adanya pergeseran pekerjaan (*job shifting*).

- **Kendala:**

1. Data dihitung dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Februari dan bulan Agustus oleh Sakernas, selain itu data yang telah dihitung memiliki waktu rilis yang tidak pasti ± 3 bulan sehingga data yang didapatkan tidak bersifat *realtime* sehingga tidak dapat menggambarkan kinerja secara akurat mengingat pelaporan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun. Sebagaimana pada LAKIP ini dimana laporan disusun dengan *cut-off* pada akhir desember 2023 namun data yang diperoleh adalah perhitungan pada bulan Agustus 2023.
2. BPSDMI tidak memiliki program maupun kegiatan yang berdampak signifikan pada indikator ini karena BPSDMI tidak mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan industri pengolahan non migas, hal ini berada pada kewenangan Direktorat sektor terkait.

- **Tindak Lanjut:**

1. Terus berkoordinasi dengan Pusdatin selaku penyedia data industri di Kementerian Perindustrian
2. Berencana untuk mengadakan FGD pada tahun 2024 dalam upaya untuk dapat *insight* dari para profesional atau yang membidangi ketenagakerjaan.

4. Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi

Program pelatihan yang meliputi skilling, upskilling, dan reskilling dengan skema 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, merupakan program penyiapan tenaga kerja industri melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi kompetensi mengacu pada standard kompetensi serta lulusannya langsung ditempatkan bekerja pada perusahaan industri. Penyediaan SDM yang kompeten dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan pada 7 Balai Diklat Industri dan Pusdiklat SDM industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) yang terserap di dunia industri.

Capaian atau realisasi pada Indikator Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi pada 2023 sebesar 33.094 orang atau 124,9% dari target 26.500 orang. Indikator Kinerja Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	43.000	47.752	25.700	27.769	26.500	33.094	124,9%	Diklat 3 in 1	Orang

Pada tahun 2023, lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sebanyak 33.094 orang atau mencapai 124,9% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu 26.500 orang. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 14.658 orang yang disebabkan adanya penurunan anggaran dari tahun 2021 sebesar Rp. 223.703.564.000 menjadi Rp. 189.951.905.000 di tahun 2023. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sebanyak 100.000 orang. Namun berdasarkan rewiu yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian pada akhir tahun 2023 serta alokasi anggaran yang didapatkan, menetapkan bahwa target indikator ini di tahun 2024 berubah menjadi 19.286 orang Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan

berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 124,9% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan diklat dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 19.286 orang.

Apabila dibandingkan dengan target RPJM 202-2024 maka capaian ini belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2023 yaitu sebanyak 44.000 orang (target RPJMN hingga 2023 sebanyak 157.000 orang sedangkan realisasi hingga 2022 sebanyak 127.534 orang), ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran, total indikasi pendanaan indikator ini pada RPJM 2020-2024 sebesar 840,9 Miliyar rupiah, namun hingga akhir tahun 2023, BPSDMI selaku pengampu hanya mendapatkan alokasi anggaran sebanyak 663.003.968.000 atau 79% dari indikasi pendanaan RPJMN. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BPSDMI mengharapkan adanya penyesuaian anggaran yang akan dialokasikan khususnya pada tahun 2024 sehingga BPSDMI dapat melakukan lebih banyak diklat agar target RPJMN tahun 2020-2024 dapat tercapai.

Rincian capaian Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

- **Berdasarkan penyelenggara diklat:**

Satuan Kerja	Jumlah
BDI DENPASAR	2996
BDI JAKARTA	6700
BDI MAKASSAR	5255
BDI MEDAN	3350
BDI PADANG	3045
BDI Surabaya	5268
BDI YOGYAKARTA	6030
Pusdiklat SDMI	450
Total	33094

- **Berdasarkan Sektor diklat:**

SEKTOR	Jumlah
Alas Kaki	2598
Animasi	96
Desain Kemasan	800
Digital	30
Digital Marketing	5935
Elektronika	200
Fiber Optik	225
Furnitur	350
Logam	150
Makanan Dan Minuman	9996
Multimedia	150
Otomotif	1320
Pengelasan	783
Pengolahan Agro	1700
Pengolahan Hasil Laut	199
Pengolahan Kopi	90
Permesinan	50
Plastik	80
TPT	8292
Pariwisata dan Perhotelan	50
Total	33094

Tercapainya indikator Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi ini didukung dengan penyelenggaraan diklat baik secara onsite maupun offside sesuai dengan kondisi daerah dan sektor pelatihan yang ada. Dari 33.094 orang yang telah mengikuti diklat 3 in 1 terdapat 28.863 orang yang lulus uji kompetensi dan 4.231 belum kompeten. Adapun diklat 3 in 1 tahun 2023 berbasis daerah potensial sehingga proses uji kompetensinya terhambat.

- **Kendala:**

1. Sering terjadi perubahan jadwal dan skema diklat mengikuti aspirasi daerah potensial serta kesulitan dalam menyelaraskan jadwal dengan tokoh aspirasi masyarakat.
2. Kedisiplinan peserta dalam mengikuti diklat dan keengganan dari sebagian wilayah daerah potensial untuk berpartisipasi aktif dalam proses diklat, mengingat adanya batasan waktu dan tanggung jawab lain yang harus mereka penuhi.

3. Terdapat blokir automatic adjustment membuat pagu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan menjadi sangat terbatas.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga hal ini berdampak pada masih diperlukannya uji kompetensi yang dilaksanakan di industri untuk diklat yang diselenggarakan di industri yang merupakan lokus penempatan kerja.
5. Terdapat tempat pelatihan yang beberapa berada di area yang terbatas akses transportasi umum, mengakibatkan masih adanya peserta yang tidak konsisten untuk mengikuti pelatihan sampai dengan selesai, sehingga hal ini berdampak pada berkurangnya lulusan dari target yang telah ditentukan.
6. Jumlah asesor pada Balai Diklat Industri yang belum memadai.

- **Tindak Lanjut:**

1. Perubahan jadwal atau skema diklat diupayakan tidak sering terjadi, atau disepakati perubahannya di akhir triwulan, serta membentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan tokoh aspirasi masyarakat dan Balai Diklat Industri untuk memahami ketersediaan waktu dan mencari jadwal diklat yang paling sesuai dan menyusun rekomendasi tindak lanjut.
2. Mengkomunikasikan manfaat dan nilai-nilai positif yang diperoleh dari partisipasi aktif dalam diklat dan menyediakan fleksibilitas dalam jadwal dan durasi diklat untuk memenuhi batasan waktu dan tanggung jawab lain. Serta Tidak mengizinkan peserta dengan tingkat kehadiran kurang, untuk mengikuti uji kompetensi.
3. Penekanan komitmen bagi calon peserta untuk mengikuti diklat dan bekerja melalui seleksi calon peserta yang lebih mendalam serta melakukan pembinaan dan pengembangan wawasan peserta mengenai kemanfaatan dari mengikuti diklat dan pentingnya harus bekerja untuk menjamin kehidupan mendatang.
4. Mengusulkan adanya belanja modal sarana dan prasarana terutama bagi peralatan penunjang diklat.
5. Mengusulkan penambahan jumlah asesor Balai Diklat Industri sesuai dengan spesialisasi.

5. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan

Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan.

Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi Pendidikan tinggi setara D1, D3, D4, S2 (Politeknik dan Akademi Komunitas), dan Pendidikan Menengah (SMK). Lulusan yang terserap meliputi yang bekerja di industri, berwirausaha, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Presentase lulusan yang terserap ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Presentase lulusan yang terserap dihitung paling lama satu tahun setelah dinyatakan lulus pada tahun sebelumnya (tahun-1).

Indikator ini merupakan presentase hasil tracing lulusan tahun 2020 yang dilaksanakan pada akhir triwulan IV tahun 2023 pada 9 SMK, 10 Politek dan 2 Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Indikator ini merupakan jumlah lulusan yang terserap (bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi).

Capaian Indikator Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan sebesar 91,43% atau 112,9% dari target 81%. Indikator Kinerja Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sebanyak 2.015 lulusan SMK Kementerian Perindustrian tahun 2022 telah terserap dari total 2.041 siswa SMK yang lulus tahun 2022 dan 3.574 lulusan politeknik dan akedemi komunitas jenjang D1/D2/D3/S2 telah terserap dari total 4.072 mahasiswa yang lulus tahun 2022.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja		2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
				T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	77	91	79	100	81	91,43	112,9%	Lulusan SMK dan Politeknik Tahun 2022 yang terserap (bekerja, melanjutkan studi, wirausaha)	Persen

Pada tahun 2023, persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan adalah sebesar 91,43% atau telah mencapai 112,9% dari target 81%. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 0,43%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sebesar 83%. Target tersebut diharapkan dapat tercapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 112,9% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 83%. Rincian Indikator Kinerja Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sebagai berikut:

- Lulusan SMK Kementerian Perindustrian

No	SMK	Jumlah Lulusan	Serapan Lulusan				Persentase Serapan
			Kerja	Melanjutkan Studi	Wirausaha	Dalam Proses	
1	SMK SMTI Makassar	203	104	82	10	7	96,55
2	SMK SMTI Bandar Lampung	282	122	135	25	0	100,00
3	SMK SMTI Padang	138	111	22	5	0	100,00
4	SMK SMTI Yogyakarta	279	186	85	8	0	100,00
5	SMK SMTI Pontianak	240	188	52	0	0	100,00
6	SMK SMTI Banda Aceh	224	138	44	42	0	100,00

7	SMK SMAK Makassar	167	79	87	1	0	100,00
8	SMK SMAK Bogor	264	166	92	4	2	99,24
9	SMK SMAK Padang	244	131	88	8	17	93,03
TOTAL LULUSAN		2041	1225	687	103	26	98,73

- **Lulusan Politeknik dan Akademi Komunitas Kementerian Perindustrian**

No	Perguruan Tinggi	Jumlah total lulusan	Jumlah Lulusan Per Program	Serapan Lulusan				Persentase Serapan	
				Kerja	Melanjutkan Studi	Wirusaha	Dalam Proses		
1	PTKI Medan	389	Program D3	339	243	1	28	67	80,24
			Program Setara D1	50	50	0	0	0	100,00
2	Politeknik ATI Padang	471	Program D3	450	154	5	26	265	41,11
			Program Setara D1	21	21	0	0	0	100,00
3	Politeknik STTT Bandung	399	Program D4	290	263	1	26	0	100,00
			Program Magister	29	21	0	8	0	100,00
			Program Setara D1	80	80	0	0	0	100,00
4	Politeknik AKA Bogor	456	Program D3	372	304	14	12	42	88,71
			Program Setara D1	84	84	0	0	0	100,00
5	Politeknik APP Jakarta	547	Program D3	384	360	0	24	0	100,00
			Program Setara D1	163	163	0	0	0	100,00
6	Politeknik STMI Jakarta	366	Program D4	254	251	0	3	0	100,00
			Program Setara D1	112	112	0	0	0	100,00
7	Politeknik ATK Yogyakarta	393	Program D3	271	187	16	28	40	85,24
			Program Setara D1	122	122	0	0	0	100,00
8	Politeknik ATI Makassar	527	Program D3	319	238	19	0	62	80,56
			Program Setara D1	208	208	0	0	0	100,00
9	Politeknik Industri Logam Morowali	84	Program D3	84	83	0	1	0	100,00
10	Akom Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	149	Program D2	149	149	0	0	0	100,00
11	Akom Industri Manufaktur Bantaeng	94	Program D2	94	76	0	0	17	80,85
12	Politeknik Industri Furnitur dan Produk Kayu Kendal	197	Program D3	175	151	2	18	4	97,71
			Program Setara D1	22	17	1	4	0	100,00
TOTAL LULUSAN		4072		4072	3337	59	178	497	93,38

Tercapainya indikator presentase lulusan Pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan di dukung oleh pemantauan capaian serapan setiap unit pendidikan dengan update data setiap triwulannya, serta pada setiap unit pendidikan di lingkungan BPSDMI terdapat unit yang bertanggung jawab pada hal ini seperti unit Carrer Development Center yang memiliki kegiatan antara

lain *Job fair*, membuat informasi pengembangan karir, pelatihan *soft skills* persiapan kerja, dan pengelolaan tracer study. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi tahun 2023 lebih rendah. Hal ini utamanya disebabkan oleh tingkat serapan lulusan dari Perguruan Tinggi yang lebih rendah daripada SMK dimana jumlah lulusan Perguruan Tinggi hampir dua kali lebih banyak.

Setelah dilakukan evaluasi dan koordinasi lebih lanjut dengan unit pendidikan terkait, diperoleh bahwa salah satu penyebab serapan lulusan yang tidak maksimal adalah karena adanya permintaan dari industri yang lebih mengutamakan gender tertentu. Permasalahan gender ini tidak hanya datang dari industri, namun juga dari beberapa pihak keluarga dari lulusan. Ketersediaan industri di daerah domisili asal lulusan juga turut mempengaruhi tingkat keterserapan ini karena terdapat sebagian lulusan yang kurang berminat untuk bekerja di luar daerah asalnya terutama bagi daerah dengan akses yang masih minim.

Terkait hal ini, BPSDMI yang diwakili oleh PPPVI yang juga selaku instansi pembina dari unit pendidikan selalu berupaya melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan target keterserapan lulusan dapat tercapai dan terus mengalami perbaikan dan peningkatan di tiap tahunnya. Bersama-sama dengan unit pendidikan, PPPVI berupaya melakukan peninjauan dengan industri baru serta stakeholder strategis untuk memperbesar potensi keterserapan lulusan.

Selain itu Sistem *Career Development Center* (CDC) yang mulai dibangun sejak beberapa tahun terakhir juga terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga dapat memfasilitasi antara pihak unit pendidikan, industri serta siswa dan lulusan. Dengan demikian diharapkan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dapat terpenuhi maupun pelaksanaan kegiatan penunjang pembelajaran dan peningkatan kompetensi dapat terlaksana dan tepat sasaran.

- **Kendala:**

1. Terdapat Automatic Adjustment sehingga kegiatan yang direncanakan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal
2. Terdapat satuan kerja yang terlambat melakukan *update* pada PPPVI sehingga capainnya rendah

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan optimalisasi dan efisiensi dengan anggaran yang ada
2. Melakukan tracing study dan menjalin kerjasama industri lebih luas dan meningkatkan koordinasi dengan dunia industri
3. Melakukan pengecekan ulang dan *reminder* kepada satuan kerja

• **Perspektif Customer**

Sasaran Program 2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	400	430	400	483	600	763	127,2%	Diklat 4.0	Orang
		2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	3	46	5	37	21	24	114,3%	Implementasi 4.0 pada SMK Industri dan Politeknik Industri	Implementasi
		3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	50	65,77	70	93,88	90	92,34	102,6%	Realisasi Gedung Realisasi Alat Realisasi Kegiatan yang Terencana	Persen

1. SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya

Making Indonesia 4.0 merupakan strategi dalam memasuki Industri 4.0 yang bertujuan untuk merevitalisasi sektor manufaktur nasional melalui pemanfaatan teknologi industri 4.0. Era revolusi Industri 4.0 telah menghasilkan teknologi yang mutakhir dalam penanganan teknologi perkapalan dan pelayaran, serta cara pembelajaran yang tidak dibatasi waktu, tempat dan ruang. Untuk itu, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 diperlukan Sumber Daya Manusia yang dinamis, terampil, kreatif dan inovasi, serta memiliki soft skill komunikasi yang baik sehingga mampu berkolaborasi serta memiliki kompetensi industri 4.0.

Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten merupakan Tenaga Kerja Industri maupun ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang industri 4.0. Indikator ini merupakan jumlah dari seluruh peserta yang mengikuti diklat 4.0 sepanjang tahun 2023.

Capaian atau realisasi pada Indikator SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya sebesar 763 orang atau 127,2% dari target 400 orang. Indikator

Kinerja SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya telah memenuhi target yang ditetapkan.

Pada indikator ini terdapat 608 orang yang mengikuti diklat 4.0 dengan menggunakan anggaran PIDI 4.0 dan 155 orang mengikuti diklat tanpa menggunakan anggaran PIDI 4.0 atau pembiayaannya ditanggung oleh partner kerjasama PIDI 4.0.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	400	430	400	483	600	763	127,2%	Diklat 4.0	Orang

Realisasi indikator ini adalah sebanyak 763 orang atau mencapai 127,2% dari target 600 orang yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 333 orang. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 600 orang diperkuat kemampuannya melalui penerapan Making Indonesia 4.0. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 127,2% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan diklat dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 600 orang. Rincian capaian diklat 4.0 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Partner	Jumlah Peserta
1	Microcontrollers Arduino Batch 1	PT Jamiko Karya Kreasi	18
2	Pelatihan Dasar Robot Industri (Robot 4 Axis) Batch 1	PT Surya Sarana Dinamika	21
3	Data Scientist Batch 1	PT Floatway Systems	39

No	Nama Pelatihan	Partner	Jumlah Peserta
4	Cloud Computing Engineer	PT Floatway Systems	40
5	Pneumatik dan Hidrolik Batch 1	PT Festo	22
6	Pneumatik dan Hidrolik Batch 2	PT Festo	29
7	Pelatihan Pengoperasian Internet of Things (IoT) Batch 1	PT Floatway Systems	30
8	Pelatihan Pengoperasian Internet of Things (IoT) Batch 2	PT Floatway Systems	27
9	Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 1	PT Media Hati	47
10	Pelatihan Data Analyst Batch 1	PT Floatway Systems	19
11	Pelatihan Data Analyst Batch 2	PT Floatway Systems	20
12	Pelatihan Data Analyst Batch 3	PT Floatway Systems	20
13	Pelatihan Dasar Robot Industri (Robot 4 Axis) Batch 2	PT Surya Sarana Dinamika	21
14	Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 2	PT Media Hati	45
15	Pneumatik dan Hidrolik Batch 3	PT Festo	20
16	Pneumatik dan Hidrolik Batch 4	PT Festo	20
17	Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 3	PT Media Hati	54
18	Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC Batch 4	PT Media Hati	51
19	Supervisor Mekatronika Batch 1	PT Media Hati	25
20	Supervisor Mekatronika Batch 2	PT Media Hati	25
21	Supervisor Mekatronika Batch 3	PT Media Hati	15
TOTAL			608

Rincian Diklat 4.0 yang dibiayai oleh partner kerjasama PIDI 4.0 dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama Pelatihan	Partner	Jumlah Peserta
1	Project Management	Microsoft/Kemenko Perekonomian	56
2	Software, Cybersecurity, Sustainability	PT Schneider Indonesia	30
3	Cyber Resilience Building a Secure Tomorrow	PT Schneider Indonesia	27
4	Lean Manufacturing 4.0	AOTS	21
5	Lean Manufacturing 4.0	AOTS	21
TOTAL			155

Tercapainya indikator SDM Industri 4.0 di dukung oleh beberapa kegiatan diantaranya Launching PIDI, Pelatihan offline di PIDI, Pelatihan online PIDI, Pengembangan website PIDI dan layanan capability center di website PIDI, serta peran social media dalam menyebarkan informasi mengenai diklat 4.0 yang

dilaksanakan.

- **Kendala:**

1. Pendaftar peserta diklat 4.0 di saring dengan beberapa kriteria salah satunya tenaga kerja industri namun saat dilakukan pemanggilan ada yang tidak hadir padahal banyak pendaftar lain yang berminat namun berasal dari kalangan dosen/guru.

- **Tindak Lanjut:**

1. Peserta diklat 4.0 tidak lagi harus tenaga kerja industri, namun guru/dosen juga dapat mengikuti diklat 4.0, dengan tetap mengutamakan peserta dari kalangan Tenaga Kerja.

2. Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan Vokasi

Implementasi industri 4.0 memiliki peluang berupa 20 juta lapangan pekerjaan baru serta tantangan re-skilling dan upskilling tenaga kerja mencapai 6 hingga 29 juta pekerjaan pada tahun 2030. Mengantisipasi hal ini, pengembangan Pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui pengembangan dan implementasi kurikulum industri 4.0 dalam penyelenggaraan Pendidikan. Jenis-jenis implementasi industri 4.0 Pada Pendidikan vokasi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Satelit PIDI
2. Implementasi Kurikulum industri 4.0
3. Pengaplikasian teknologi industri 4.0 pada Pendidikan
4. Pelatihan Industri 4.0 pada SDM Industri.

Indikator ini merupakan jumlah dari seluruh implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi seluruh unit pendidikan di lingkungan BPSDMI Kementerian Perindustrian yaitu 9 SMK, 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas.

Capaian atau realisasi pada Indikator Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan Vokasi sebesar 740% dari 37 implementasi dari target 5 implementasi. Indikator Kinerja Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan Vokasi telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	3	46	5	37	21	32	152,4%	Implementasi 4.0 pada SMK Industri dan Politeknik Industri	Implementasi Industri

Realisasi indikator ini adalah sebanyak 32 implementasi atau mencapai 152,4% dari target 21 implementasi yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 14 implementasi, namun perlu dilihat pula bahwa capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada awal penyusunan target renstra BPSDMI masih melakukan pemetaan pada target indikator ini sehingga belum memiliki ekspektasi lebih untuk target yang ditetapkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, realisasi yang dilakukan oleh satuan kerja telah jauh melebihi ekspektasi awal BPSDMI sehingga BPSDMI di tahun 2023 dan 2024 menetapkan agar setiap satuan kerja memiliki target implementasi 4.0. Di tahun 2024, indikator ini hanya akan dilaksanakan oleh satuan kerja SMK, sedangkan satuan kerja Politeknik/Akademdi komunitas akan menggunakan Nilai Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0.

Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 9 implementasi industri 4.0 pada unit SMK dan target Nilai Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0 pada unit politeknik/akademi komunitas senilai 1,84. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 152,4% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 9 implementasi pada unit SMK dan Nilai

Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0 pada unit politeknik/akademi komunitas senilai 1,84. Rincian capaian diklat 4.0 dapat dilihat sebagai berikut:

Satuan kerja	Jumlah	Penjelasan Implementasi
SMAK Bogor	1	Pengembangan kurikulum 4.0 dengan memasukkan/memasukan materi sbb: Working Life Skills : literasi digital, keterampilan digital, literasi data. Pengenalan Industri 4.0 yaitu pemberian wawasan terkait teknologi kunci yang terkait dan keterkaitan antar teknologi tersebut dalam industri manufaktur. Computational Skills termasuk diantaranya berpikir komputasi, pemrograman dasar, pemrograman IoT sederhana
SMAK Padang	1	Tersusunnya modul baru pembelajaran yaitu dalam pengolahan data analisis berdasarkan sharing knowledge guru yang mengikuti pelatihan data science
SMAK Makassar	1	sosialisasi dan penerapan LIMS (Laboratory Information and Management System) yang memfasilitasi management sumber daya manusia pada laboratorium, management bahan dan peralatan di SMK-SMAK Makassar yang sejalan dengan pengelolaan aplikasi persediaan dan simak BMN
SMTI Banda Aceh	1	Smart 3D Printing (Mesin 3D Printing yang dapat dikendalikan jarak jauh berbasis web)
SMTI Makassar	1	Implementasi VR sebagai media pembelajaran pada Laboratorium Kimia
SMTI Yogyakarta	1	Implementasi kurikulum industri 4.0 pada jurusan teknik mekatronika berupa pembuatan Smart Gate System yang merupakan sistem otomasi parkir di sekolah
SMTI Bandar Lampung	2	Kegiatan yang sudah terealisasi diantaranya: - Sinkronisasi kurikulum dengan pihak industri di era industri 4.0 - Tersedianya ruang monitoring pembelajaran/Smart Classroom - Pembuatan Modul Pembelajaran 4.0 - Pembuatan e-absensi siswa
SMTI Padang	3	- LMS (Learning Management System) : Sistem pembelajaran online yang digunakan saat siswa prakerin dan juga saat pemberian tugas mandiri. - Modul HSE LAB Virtual Reality: Terdiri dari dua skenario yaitu lab virtual untuk praktik pembuatan larutan asam dan tumpahan kimia serta lab virtual untuk praktik APAR di laboratorium. - Smart Laboratory -Kendala : Adanya keterbatasan dana dan waktu untuk implementasi smartlab.
SMTI Pontianak	1	Proses Pengadaan Oleh Rekanan Yaitu Kartu Pelajar Siswa Berbasis NFC utk Kegiatan Monitoring Siswa (SMART Monitoring) Penggunaan teknologi 4.0 untuk UKS dan Lab Otomasi
STMI Jakarta	1	Adanya Dashboard Informasi Publik untuk memudahkan akses informasi terkait pelayanan pendidikan di Politeknik STMI Jakarta. (Kategori C. Pengaplikasian teknologi industri 4.0 pada pendidikan)

STTT Bandung	3	1. Workshop Digital Transformation Clinic (Pelatihan industri 4.0 pada SDM industri) 2. Practice Enterprise (PE) for HRD with a focus on Digital competency (HI-IDN) (Pelatihan industri 4.0 pada SDM industri) 3. "Sosialisasi dan peluang Implementasi Industri 4.0 Bagi IKM TPT" (Pelatihan industri 4.0 pada SDM industri)
AKA Bogor	2	Implementasi berupa penggunaan bot composter dan emodul
PTKI Medan	3	Implementasi baru dapat dilakukan untuk kegiatan PKM Dosen, Penelitian Dosen serta pelatihan 4.0. Untuk pengembangan sarana pembelajaran 4.0 ataupun PID1 4.0 terkendala pada ketersediaan anggaran
ATI Padang	1	Target telah tercapai Implementasi IoT di alat penjernih minyak jelantah
ATK Yogyakarta	1	Sudah dilaksanakan 1 kali pelatihan kepada IKM dan masyarakat
APP Jakarta	1	Pelatihan Ketrampilan Digital Marketing Data Processing 26-28 Juni 2023
ATI Makassar	1	Kegiatan Training of an Image Processing Industrial Robot dan Kegiatan "Pelatihan Advanced Data Science"
Akom Surakarta	2	APlikasi SWORD 2.0 dan UMBI
PIL Morowali	1	Implementasi dalam bentuk teknologi CPS (Cyber Physical System) di CV. CSM (Cipta Sinergi Manufacturing) di Bandung . Memasang IoT Device untuk memonitoring kondisi mesin CNC (mesin ON/OFF, spindle ON/OFF). Hasil dapat dilihat di shop-act.pilm.ac.id
PIFPK Kendal	1	Digitalisasi Job Sheet : Program Monitoring Mesin Workshop.
Poltek Banten	2	Project yang dibuat adalah implementasi 4.0 pada mesin pipe surge & water hammer yang sedang proses pengerjaan implementasi 4.0 meliputi: Membuat sistem monitoring mesin dengan indikator arus, vibrasi dan water level control sedang dalam pengerjaan Membuat system control menggunakan PLC sudah selesai
Akom Bantaeng	1	implementasi Kurikulum Industri 4.0 pada program studi di AK Manufaktur Bantaeng dan terlaksananya Pelatihan 4.0 dan beberapa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian . terkendala pada ketersediaan anggaran sehingga implementasi pada sistem pembelajaran belum tercapai .
TOTAL	32	

- **Kendala:**

1. Terdapat ketidaksamaan persepsi terkait interpretasi dari kriteria indikator implementasi 4.0

- **Tindak Lanjut:**

1. Membuat Nota Dinas penjelasan lebih lanjut terkait indikator implementasi 4.0
2. Merevisi indikator implementasi 4.0 menjadi indikator Nilai TVET bagi satuan kerja Politeknik di tahun 2024, sedangkan satuan kerja SMK direncanakan akan berubah pula di tahun selanjutnya dengan meninbang kesanggupan SDM serta sarana dan prasarana yang ada.
3. BPSDMI juga telah melakukan penambahan target menjadi 21 implementasi pada tahun 2023 yang sudah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan target renstra BPSDMI.

- **Faktor pendukung:**

1. Target indikator ini pada awalnya merupakan satelit dari PIDI 4.0, namun setelah dilakukan penyusunan pedoman kinerja pada rencana strategis BPSDMI, telah ditetapkan beberapa kriteria implementasi 4.0 sehingga satuan kerja dapat memasukkan beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai output sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada rencana strategis BPSDMI.

3. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0

Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) memiliki visi menjadi one stop solution implementasi industri 4.0 dan jendela Indonesia 4.0 untuk dunia. Untuk mencapai visi tersebut PIDI 4.0 memiliki 5 layanan utama diantaranya :

1. Showcase Center, sebagai tempat untuk menyaksikan secara langsung implementasi Industri 4.0 melalui model factory & miniplant guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang industri 4.0
2. Capability Center, sebagai pusat peningkatan kompetensi SDM Industri 4.0 dari CxO, Manajer, Engineer, Frontliner bahkan ASN Pembina Industri
3. Ecosystem for Industri 4.0, sebagai wadah bagi stakeholder untuk saling berbagi dan bekerjasama dalam proses transformasi ke industri 4.0
4. Delivery Center, sebagai pusat pendampingan dan konsultasi bagi industri dalam bertransformasi ke industri 4.0
5. Engineering & AI Center, sebagai pusat riset dan testbed untuk mencari solusi dari

pain point industri 4.0.

Indikator ini merupakan persentase Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 yang pengerjaannya dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang terdiri atas realisasi gedung, realisasi alat, dan realisasi kegiatan yang terencana.

Capaian atau realisasi pada Indikator Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 sebesar 92,34% atau 102,6% dari target 90%. Perhitungan pelatihan industri 4.0 yang digunakan merupakan seluruh pelatihan yang difasilitasi oleh PID 4.0 baik yang menggunakan anggaran diklat 4.0 maupun pembiayaan oleh partner. Indikator Kinerja Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.2	3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	50	65,77	70	93,88	90	92,34	102,6%	Realisasi Gedung Realisasi Alat Realisasi Kegiatan yang Terencana	Persen

Realisasi indikator ini adalah sebanyak 92,34% atau mencapai 102,6% dari target 90% yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 26,57. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 95%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 102,6% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 95%. Rincian perhitungan utilitas Pusat Industri

Digital Indonesia 4.0 dapat dilihat sebagai berikut:

	Nama Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase	Persentase Rata-Rata	Utilisasi PIDI 4.0	Pilar			
Realisasi Gedung	Fisik Bangunan dan Eksterior	1 Gedung	1 Gedung	100%	100,00%	92,34%	Secretary			
	Fisik Interior	Interior Lantai 1	Selesai	100%						
		Interior Lantai 2	Selesai	100%						
		Interior Lantai 3	Selesai	100%						
		Interior Lantai 4	Selesai	100%						
		Interior Lantai 5	Selesai	100%						
		Interior Lantai 6	Selesai	100%						
		Interior Lantai 7	Selesai	100%						
		Interior Lantai 8	Selesai	100%						
Realisasi Alat	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 1	1 Paket Showcase Otomotif	Selesai	100%	76,92%	92,34%	Showcase Center			
		1 Paket Showcase F&B	Selesai	100%						
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 2	1 Paket Data Center	Tidak Ada	0%			Secretary			
		1 Paket Command Center	Selesai	100%						
		1 Paket Furnitur	Selesai	100%						
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 3	1 Paket Mesin Testbed	Tidak Ada	0%				Secretary		
		1 Paket Furnitur	Tidak Ada	0%						
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 4	5 Paket Alat Lab	5 Paket Alat Lab	100%					Secretary	
		5 Paket Furnitur Lab	Selesai	100%						
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 5	1 Paket Furnitur Kelas	1 Paket Furnitur Kelas	100%						
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 6	1 Paket Furnitur Kantor	Selesai	100%						
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 7	1 Paket Furnitur Kantor	1 Paket Furnitur Kantor	100%						
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 8	1 Paket Furnitur Kantor	Selesai	100%						
Realisasi Kegiatan yang Terencana	Pelatihan Industri 4.0 di PIDI 4.0	600 Orang	763 orang	127,17%	92,44%	92,34%				Capability Center
	Modul dan Kurikulum sesuai SKKNI	3 Modul	3 Modul	100%						
	Sertifikasi Kompetensi Industri 4.0	600 Orang	608 orang	101,33%						
	Improvement Website Profil PIDI 4.0	1 Website PIDI 4.0	1 Website PIDI 4.0	100%						
	Improvement Website Capability Center	1 Website Capability Center	1 Website Capability Center	100%			Engineering & AI Center			

	Nama Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase	Persentase Rata-Rata	Utilisasi PIDI 4.0	Pilar
	Improvement Website Ecosystem Center	1 Website Ecosystem Center	1 Website Ecosystem Center	100%			
	Pendampingan Industri	5 Industri	4 Industri	80%			Delivery Center
	Workshop pendampingan	2 kegiatan	2 Kegiatan	100%			
	Jumlah Anchor Industri	2 Industri	3 Industri	150%			Showcase Center
	Kunjungan showcase	70 Industri	128 Industri	182,86%			Engineering & AI Center
	Broker Riset	1 Proyek	1 Proyek	0%			Ecosystem Center
	Testbed	1 Proyek	0 Proyek	0%			
	Event Ekosistem Tahunan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50%			
	Perjanjian Kerjasama dengan Mitra	35 MoU	36 MoU	102,86%			

Pembangunan fisik Gedung PIDI 4.0 dilaksanakan secara Multi Years dari tahun 2019 hingga 2022. Gedung PIDI 4.0 telah melaksanakan Soft Launching pada awal Desember 2021 yang kemudian juga menjadi salah satu tempat yang ditunjuk untuk Visitasi Delegasi Sherpa G20. Hingga Desember 2022, progress konstruksi fisik PIDI 4.0 sudah selesai (100%), pengerjaan interior pada tahun 2022 juga telah selesai pada 8 lantai (100%), realisasi alat pada 8 lantai gedung PIDI 4.0 pada tahun 2023 (76,92%), dan realisasi kegiatan (92,44%).

- **Kendala:**

1. Terdapat keterbatasan anggaran sehingga PIDI 4.0 tidak dapat melakukan penambahan untuk peralatan yang direncanakan
2. Pada mulanya, indikator ini merupakan progres pembangunan gedung PIDI 4.0 sehingga pada Renstra BPSDMI selalu mengalami kenaikan, namun seiring dengan telah selesainya pembangunan gedung PIDI, indikator ini mengalami perubahan perhitungan utilitas dengan mempertimbangkan pilar-pilar yang ada di PIDI 4.0

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan kerjasama dan pendekatan pada perusahaan-perusahaan agar dapat meletakkan alatnya di PIDI 4.0 sebagai showcase

2. Meriviu target yang telah ditetapkan atau meriviu ulang indikator Utilitas PIDI 4.0

Sasaran Program 3 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	82	98,05	85	96,91	87	98,41	113,1%	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Pusbindiklat yang mendapatkan predikat minimal baik	Persen
		2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	70	92,11	75	93,15	80	94,01	117,5%	Kuisisioner Jabatan Fungsional	Persen

1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik

Dalam rangka memenuhi kewajiban Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. ASN Kementerian Perindustrian yang mengikuti program rintisan gelar/diklat fungsional/diklat teknis. Indikator ini merupakan persentase lulusan pendidikan dan pelatihan (Diklat Struktural (Latsar), dan Diklat Teknis) dengan predikat minimal baik.

Capaian atau realisasi pada Indikator Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik sebesar 98,41% atau 113,1% dari target 87%. Total peserta diklat sebanyak 189 orang dengan 186 orang mendapatkan predikat minimal baik dan 3 orang mendapatkan predikat kurang baik. Indikator Kinerja persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja		2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
				T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	82	98,05	85	96,91	87	98,41	113,1%	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Pusbindiklat yang mendapatkan predikat minimal baik	Persen

Hingga akhir 2023, persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik adalah 98,41% atau mencapai 113,1% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu 87%. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 0,36%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik sebanyak 90%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 98,41% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 90%. Rincian perhitungan Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik dapat dilihat sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan ASN	Total Peserta	Min Baik	Kurang Baik
Pelatihan Web Programming	30	30	0
Diklat Teknis Video dan Audio Editing Basic	30	30	0
Program IELTS Preparation and International	14	12	2
Pelatihan Auditor Halal	25	24	1
Pelatihan PFPP tingkat dasar	30	30	0
Pelatihan Pembuatan Content Creation	30	30	0
Pelatihan PFPP tingkat dasar Angkatan 2	30	30	0
Total Peserta uji kompetensi	189	186	98,41%

Tercapainya indikator Presentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat minimal baik di dukung dengan beberapa kegiatan, diantaranya menyelenggarakan Diklat teknis industri melalui pelaksanaan Pelatihan Web Programming Diklat Teknis Video dan Audio Editing Basic, Program IELTS Preparation and International, Pelatihan Auditor Halal, Pelatihan PFPP tingkat dasar, dan Pelatihan Pembuatan Content Creation. Untuk menjaga kualitas dari penyelenggaran diklat, BPSDMI sebagai penyelenggara diklat juga melakukan Akreditasi penyelenggara diklat yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara, serta Menyusun pedoman maupun kurikulum sesuai dengan kebutuhan diklat.

- **Kendala:**

1. Terdapat blokir automatic sehingga diklat bagi ASN tidak dapat berjalan dengan maksimal.
2. Banyaknya permintaan diklat bagi ASN dari Eselon I lain, namun alokasi anggaran yang didapatkan sangat terbatas.

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan diklat menggunakan mekanisme hybrid (online dan offline) serta mengembangkan program digital ASN
2. Mengembangkan *Learning Management System* agar dapat memotong cost pelatihan offline, namun pagu anggaran yang ada saat ini masih belum mencukupi untuk pengembangan sistem.

2. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional

Pembinaan terhadap jabatan fungsional pada hakikatnya tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi Pembina. Namun dalam hal pembinaan karir dan pengembangan kompetensinya menjadi tanggungjawab masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah. PPK memiliki peran yang penting dalam hal perhitungan formasi kebutuhan akan Jabatan Fungsional, Pengadaan Jabatan Fungsional, Penilaian Kinerja Jafung, fasilitasi administrasi kepegawaian Jafung, perumusan rekomendasi pengembangan

kompetensi sebagai narahubung antara jabfung di instansinya dengan instansi pembina. BPSDMI menjadi instansi pembina untuk 3 Jabatan Fungsional Bidang Industri yaitu JF Penyuluh Perindustrian (PFPP), JF Analisis Manajemen Mutu Industri (AMMI), dan JF Pembina Industri (PI).

Indikator ini merupakan tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional yang di dapatkan melalui nilai kuesioner yang disebar keseluruh Pejabat Fungsional Pengguna Layanan Pusbindiklat SDM Aparatur melalui website pusbindiklat BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional sebesar 94,01 atau 117,5% dari target 80. Indikator Kinerja efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	70	92,11	75	93,15	80	94,01	117,5%	Kuisisioner Jabatan Fungsional	Persen

Pada akhir 2023, Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional adalah 94,01% atau mencapai 117,5% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu 80%. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 1,9%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional sebanyak 85%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 117,5% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan

pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 85%. Rincian perhitungan efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional dapat dilihat sebagai berikut:

No	Aspek kinerja penyelenggara yang dinilai meliputi	SKOR		
		AMMI	PFPP	PI
1	Komunikasi yang digunakan	96,25	100,00	91,72
2	Penggunaan bahasa dalam pelaksanaan uji kompetensi	96,25	97,35	91,83
3	Penguasaan materi/substansi	96,25	97,35	89,48
4	Ketepatan waktu yang digunakan	85	97,35	87,24
5	Jumlah asesor yang ditunjuk cukup untuk melaksanakan uji kompetensi	96,25	95,00	91,49
6	Relevansi materi yang diujikan	96,25	97,35	89,48
7	Kemudahan memahami soal Uji Kompetensi	86,25	93,82	86,34
8	Ketepatan penggunaan metode uji kompetensi	96,25	95,59	89,48
9	Uji kompetensi ini memberikan gambaran yang akurat tentang kompetensi peserta	96,25	96,47	87,91
10	Penggunaan Sistem informasi	93,75	95,59	89,25
11	Mekanisme pendaftaran pelaksanaan Uji kompetensi	100	95,59	90,93
12	Kemudahan mengakses informasi/konsultasi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi	100	97,35	91,04
13	Prosedur pelaksanaan Uji Kompetensi	96,25	95,59	90,82
14	Kecepatan merespon kendala atau konsultasi peserta	100	98,24	93,62
TOTAL SKOR		95,36	96,62	90,05
		94,01		

- **Kendala:**

1. Terbatasnya SDM untuk menangani Pembinaan Jabatan Fungsional di Pusbindiklat SDM Aparatur yang mencakup 3 JF yaitu PFPP, AMMI, dan Pembina Industri.
2. Penyebaran kuisioner pada akhir periode kurang efektif

- **Tindak Lanjut**

1. Mengusulkan adanya penambahan pegawai.
2. Pada periode mendatang kuisioner akan dibagikan setelah pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional

- **Perspektif Internal Process**

Sasaran Program 4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan memiliki 7 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja		2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
				T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1	Infrastruktur kompetensi industri	4	4	10	9	7	8	114,3%	RSKKNi dan RKKNI yang disusun oleh Pusdiklat BPSDMI	SKKNI/KKNI
		2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri	6	8	20	26	20	38	190,0%	Fasilitasi CLSP 7 Fasilitasi Pengembangan LSP berupa workshop penyusunan Skema dan MUK serta pelatihan pengelolaan LSP 31	LSP dan TUK
		3	Asesor kompetensi dan lisensi	154	161	300	192	145	191	131,7%	Diklat asesor dan Diklat RCC asesor	Asesor
		4	Tenaga Kerja Industri yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	4900	4967	1500	4377	1500	4355	290,3%	Sertifikasi kompetensi pada sektor industri tekstil dan produk tekstil, elektronika, kreatif/animasi, otomotif, logam mesin, kimia, agro	Orang
		5	Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat	6	32	8	200	21	128	609,5%	Perusahaan yang memanfaatkan layanan pada SMK dan Politeknik	Persen
		6	Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik	316 (B)	320	331 (B)	332.29	334	336	100,6%	Akreditasi 11 Politeknik dan 2 akademi komunitas di lingkungan BPSDMI	Nilai
		7	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	120	126	150	222	170	264	155,3%	Seminar nasional 3 Seminar Internasional 50 Jurnal Nasional 174 Jurnal Internasional 37	Penelitian
		8	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	34	39	50	76	60	86	143,3%	Inkubator bisnis yang difasilitasi oleh BDI dan Politeknik Industri	Tenant

1. Infrastruktur Kompetensi Industri

Infrastruktur Kompetensi Industri pada indikator ini adalah SKKNI/KKNI yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI/KKNI dibangun sesuai dengan kondisi di tempat kerja sehingga dapat menjadi acuan dalam

penyiapan SDM Industri melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan serta dalam sertifikasi kompetensi. Keberadaan SKKNI/KKNI juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kebutuhan rekrutmen tenaga kerjanya serta pengembangan karir pegawai. Penyusunan SKKNI/KKNI dilakukan oleh praktisi industri, asosiasi industri, asosiasi profesi dan pakar di bidang industri. Dalam proses perumusan tersebut dapat dibantu oleh akademisi dan perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Tahapan perumusan SKKNI mencakup: perumusan SKKNI, verifikasi internal, Prakonvensi SKKNI, Verifikasi Eksternal, Konvensi SKKNI.

Setelah Standar Kompetensi tersusun, perlu dilakukan pemaketan dan penjenjangan kompetensi-kompetensi yang ada pada suatu sektor atau bidang keahlian tertentu mengacu pada standar kualifikasi nasional yang ada. Di Indonesia terdapat 9 jenjang kualifikasi yang dapat diintegrasikan dari sisi pendidikan dan pelatihan serta dari sisi pengalaman kerja. Penjenjangan kualifikasi nasional tersebut dikenal dengan KKNI. Seperti halnya SKKNI, penyusunan KKNI juga dilakukan oleh praktisi industri, asosiasi industri, asosiasi profesi, pakar di bidang industri, akademisi dan perwakilan LSP. Tahapan penyusunan KKNI lebih singkat dibanding SKKNI yaitu Perumusan, Verifikasi dan Konvensi KKNI.

Penyusunan SKKNI yang telah melibatkan banyak pihak diharapkan dapat mengurangi permasalahan mismatch antara supply dan demand penyediaan SDM industri yang selama ini terjadi di Indonesia. Penetapan dokumen SKKNI akan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan dokumen KKNI akan dilakukan oleh K/L pembina sektor yang dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian.

Indikator ini merupakan jumlah Infrastruktur Kompetensi Industri atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Industri yang dilakukan penyusunannya oleh Pusdiklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri hingga tahap usulan pengesahan.

Capaian atau realisasi pada Indikator Infrastruktur kompetensi industri telah disusun sejumlah 8 RSKKNI/RKKNI dari target perjanjian kinerja 7 RSKKNI/RKKNI dengan capaian berupa penyusunan 4 RSKKNI dan 4 RKKNI.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja		2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
				T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1	Infrastruktur kompetensi industri	4	4	10	9	7	8	114,3%	RSKKNI dan RKKNI yang disusun oleh Pusdiklat BPSDMI	RSKKNI/RKKNI

Hingga akhir 2023, jumlah infrastruktur kompetensi industri adalah sebanyak 8 RSKKNI/RKKNI atau mencapai 114,3% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebanyak 8 RSKKNI/RKKNI. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 4 SKKNI. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah infrastruktur kompetensi industri sebanyak 10 SKKNI. Namun berdasarkan rewiu yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian pada akhir tahun 2023 serta alokasi anggaran yang didapatkan, menetapkan bahwa target indikator ini di tahun 2024 berubah menjadi 7 RSKKNI/RKKNI. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 114,3% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 7 RSKKNI/RKKNI.

Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2022-2024 maka capaian ini belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2023 yaitu sebanyak 20 SKKNI (target RPJMN hingga 2022 sebanyak 80 SKKNI) sedangkan realisasi hingga 2023 sebanyak 29 SKKNI/RKKNI), ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran, total indikasi pendanaan indikator ini pada RPJM 2020-2024 sebesar 31,7 Miliar rupiah, namun hingga akhir tahun 2023, BPSDMI selaku pengampu hanya mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 11.661.581.000 atau 31,7% dari indikasi pendanaan RPJMN. Untuk menindaklanjuti

hal tersebut, BPSDMI mengharapkan adanya penyesuaian anggaran yang akan dialokasikan khususnya pada tahun 2024 sehingga BPSDMI dapat melakukan penyusunan SKKNI agar target RPJMN tahun 2022-2024 dapat tercapai.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan SKKNI diantaranya perumusan, verifikasi internal, pra konvensi, verifikasi eksternal, dan konvensi nasional, sedangkan pada penyusunan KKNi memiliki tahap penyusunan yang lebih singkat yaitu tahapan perumusan draf, verifikasi (verifikasi eksternal), dan konvensi nasional. Dengan rincian tahapan sebagai berikut:

1. Perumusan

Perumusan Rancangan SKKNI dilaksanakan dalam beberapa kali workshop dan focus group discussion (FGD) penyusunan SKKNI untuk membuat peta kompetensi dan uraian unit kompetensi ke dalam format penulisan yang telah ditetapkan.

2. Verifikasi internal

Rumusan Rancangan SKKNI diverifikasi kesesuaiannya oleh tim verifikasi untuk memastikan kriteria struktur Rancangan SKKNI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta substansi Rancangan SKKNI telah dirumuskan secara jelas, tepat dan akurat serta mampu telusur dengan standar proses kerja di industri, organisasi, atau produk/jasa. Pemaparan hasil verifikasi dan perbaikan Rancangan SKKNI dilaksanakan dalam FGD.

3. Prakonvensi

Rancangan SKKNI divalidasi dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas dalam sebuah FGD untuk memastikan keberterimaan dokumen SKKNI. Hasil prakonvensi yang disetujui oleh peserta Prakonvensi diperbaiki oleh tim perumus dan kemudian disampaikan kepada Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverifikasi.

4. Verifikasi eksternal

Rancangan SKKNI hasil prakonvensi diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dimana pemaparan hasil verifikasi dan perbaikan Rancangan SKKNI dilaksanakan dalam FGD.

5. Konvensi

Rancangan SKKNI dibakukan melalui konvensi nasional yang melibatkan stakeholder terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri maupun profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, serta instansi teknis terkait. Hasil konvensi nasional yang telah diperbaiki selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan.

Sepanjang tahun 2023 BPSDMI telah melakukan penyusunan terhadap 8 RSKKNI/RKKI yaitu:

1. RSKKNI Industri Tekstil Non Woven
2. RSKKNI Semikonduktor
3. RSKKNI Maintenance Alat Berat
4. RKKNI Bidang Pembuatan Molds and Dies
5. RKKNI Bidang Pembuatan Jigs and Fixtures
6. RKKNI Industri Manufaktur Otomotif Roda 4
7. RKKNI Industri Petrokimia
8. RSKKNI Jabatan Verifikator TKDN

Penyusunan RSKKNI/RKKNI telah selesai dilaksanakan namun SKKNI/KKNI merupakan dokumen negara sehingga SKKNI perlu ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berbentuk Keputusan Menteri Ketenagakerjaan sedangkan KKNI ditetapkan oleh instansi pembina yaitu Kementerian Perindustrian yang berbentuk Peraturan Menteri Perindustrian. BPSDMI hanya berwenang dalam penyusunan dan pengusulan penetapan dokumen. Setelah SKKNI/KKNI diusulkan maka dilakukan pengalangan atas penetapan SKKNI/KKNI.

Hingga akhir 2023, seluruh SKKNI sudah dikonvensikan dan sedang menunggu proses penetapan di Kementerian Ketenagakerjaan sementara KKNI sudah dikonvensikan dan sedang menunggu proses harmonisasi dengan bagian hukum.

- **Kendala:**

1. Pelaksanaan penyusunan RSKKNI/RKKNI memerlukan waktu lama sehingga output baru dapat terlihat pada akhir periode

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan pemantauan pada penyusunan RSKKNI/RKKNI secara berkala

2. Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP yang telah mendapat lisensi dari BNSP, suatu Badan Nasional yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi (mengacu pada Perpres Nomor 10 Tahun 2018). LSP merupakan perpanjangan tangan BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Secara umum, terdapat 3 jenis LSP yaitu: LSP Pihak Pertama (terdiri dari LSP P1 Industri dan LSP P1 Pendidikan dan Pelatihan), LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Ketiga. Untuk mendirikan LSP diperlukan beberapa persyaratan antara lain: skema sertifikasi, asesor kompetensi, materi uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya.

Tempat yang digunakan sebagai lokasi uji kompetensi disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK). Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis TUK yaitu: TUK tempat kerja, TUK sewaktu dan TUK mandiri. Seluruh TUK yang akan digunakan oleh LSP dalam melakukan pengujian dan sertifikasi kompetensi harus diverifikasi dan dipastikan telah merepresentasikan kondisi lingkungan kerja sesungguhnya. Pendirian dan pengembangan LSP dan TUK sektor industri dapat difasilitasi melalui kegiatan pada Pusdiklat SDM Industri BPSDMI.

Indikator ini merupakan jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Capaian atau realisasi pada Indikator Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri sejumlah 38 LSP yang dilakukan fasilitasi oleh pusdikla BPSDMI atau 190% dari target 20 LSP. Indikator Kinerja Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	2 Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri	6	8	20	26	20	38	190,0%	Fasilitasi CLSP 7 Fasilitasi Pengembangan LSP berupa workshop penyusunan Skema dan MUK serta pelatihan pengelolaan LSP 31	LSP dan TUK

Hingga akhir 2023, jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri yang difasilitasi BPSDMI sebanyak 38 LSP atau mencapai 190% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebanyak 20 LSP. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 30 LSP. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri yang difasilitasi BPSDMI sebanyak 20 LSP. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Apabila dibandingkan dengan target RPJM 202-2024 maka capaian ini belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2023 yaitu sebanyak 20 LSP (target RPJMN hingga 2023 sebanyak 80 LSP sedangkan realisasi hingga 2023 sebanyak 79 LSP), ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran, total indikasi pendanaan indikator ini pada RPJM 2020-2024 sebesar 9,9 Miliar rupiah, namun hingga akhir tahun 2023, BPSDMI selaku pengampu hanya mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 5.604.228.000 atau 57% dari indikasi pendanaan RPJMN. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BPSDMI mengharapkan adanya penyesuaian anggaran yang akan dialokasikan khususnya pada tahun 2024 sehingga BPSDMI dapat memperbanyak fasilitasi LSP dan TUK agar target RPJMN tahun 2022-2024 dapat tercapai.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 190% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan

pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 20 LSP. Selama tahun 2023 BPSDMI telah melakukan fasilitasi terhadap 38 LSP yaitu:

No.	Nama LSP / CLSP (Asosiasi)	Bidang
Fasilitasi CLSP		
1	CLSP Lean Manufaktur Indonesia Unggul (Asosiasi Industri Automotive Industrial People Development / IAIPD)	Otomotif
2	CLSP Agroindustri Unggul (Asosiasi Industri Asosiasi Agroindustri Indonesia / AGRIN)	Agro
3	CLSP Pengolahan Atsiri (Asosiasi Profesi Asosiasi Peneliti Atsiri Indonesia / APAI)	Pengolahan Atsiri
4	CLSP Industri Penyamakan Kulit (Asosiasi Industri Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia / APKI)	Penyamakan Kulit
5	CLSP Industri Karoseri Indonesia (Asosiasi Industri Asosiasi Karoseri Indonesia / ASKARINDO)	Industri Karoseri
6	CLSP Kriyalist (Asosiasi Industri Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta / KP3Y)	Kerajinan
7	CLSP Mega Andalan Kalasan (Perusahaan Industri PT Mega Andalan Kalasan)	Furnitur Kesehatan
Fasilitasi Pengembangan LSP berupa workshop penyusunan Skema dan MUK		
8	LSP Elektroteknika	Elektronika
9	LSP Pengolahan Kopi	Agro
10	LSP Pos Logistik Indonesia	Logistik
11	LSP Kimia Industri	Kimia
12	LSP Garment	Tesktil/Produk Tekstil
13	LSP Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI)	TIK
14	LSP Persemenan Indonesia	Kimia
15	LSP Industri Otomotif Indonesia (LSP IOI)	Otomotif
Fasilitasi Pengembangan LSP berupa Pelatihan Pengelolaan LSP		
16	LSP Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan	Agro
17	LSP SMK SMTI Padang	Kimia
18	LSP Politeknik ATI Padang	Agro, Kimia
19	LSP Politeknik STMI Jakarta	Otomotif
20	LSP Politeknik APP Jakarta	Logistik
21	LSP Politeknik AKA Bogor	Kimia
22	LSP Politeknik Industri Furniture Kendal	Agro
23	LSP Politeknik ATK Yogyakarta	TPT, Alas Kaki
24	LSP Politeknik ATI Makassar	Logam Mesin
25	LSP AK-Tekstil Solo	TPT
26	LSP AK-Manufaktur Bantaeng	Logam Mesin
27	LSP SMK-SMTI Banda Aceh	Kimia, Agro

28	LSP SMK-SMTI Bandar Lampung	Kimia, Agro
29	LSP SMK-SMAK Bogor	Kimia
30	LSP SMK-SMTI Pontianak	Kimia, Agro
31	LSP SMK-SMAK Makassar	Kimia
32	LSP BDI Padang	TPT, Agro
33	LSP BDI Jakarta	TPT, Otomotif, Logam Mesin
34	LSP BDI Yogyakarta	TPT
35	LSP BDI Surabaya	TPT, Elektronika
36	LSP BDI Denpasar	Animasi, TIK
37	LSP BDI Makassar	Agro
38	LSP BPIPI	Alas Kaki

- **Kendala:**

1. Terdapat beberapa pihak pengusul yang memiliki komitmen kurang dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan CLSP atau LSP.

- **Tindak Lanjut:**

1. Meningkatkan motivasi pihak pengusul LSP.

-Faktor Keberhasilan:

1. Fasilitasi pengembangan LSP berupa suatu acara sehingga yang menghadiri acara tersebut merupakan perwakilan-perwakilan LSP

3. Asesor Kompetensi dan Lisensi

Asesor Kompetensi adalah orang yang melakukan pengujian kompetensi. Seorang asesor kompetensi harus menguasai teknis sesuai bidang yang diujikan serta metodologi pengujiannya. Kompetensi metodologi tersebut diberikan melalui Diklat Asesor Kompetensi. Peserta Asesor Kompetensi dapat berasal dari unsur praktisi industri, asosiasi industri atau profesi, pakar, akademisi dan pihak lain yang berkaitan dengan lingkup LSP induk. Di akhir sesi diklat, peserta akan mengikuti Uji Kompetensi sebagai bukti kelayakan untuk direkomendasikan sebagai seorang Asesor Kompetensi. Masa berlaku sertifikat Asesor Kompetensi adalah 3 tahun. Seorang Asesor Kompetensi tidak dapat ditugaskan melakukan pengujian bila masa

berlaku sertifikat kompetensinya sudah habis. Untuk itu, dapat dilakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat Asesor Kompetensi melalui mekanisme Diklat Recognition Current Competency (RCC) Asesor Kompetensi. Peserta Diklat RCC Asesor Kompetensi haruslah seorang Asesor Kompetensi yang sudah pernah melakukan pengujian kompetensi dan dibuktikan melalui portofolio uji kompetensi. Indikator ini merupakan jumlah orang yang mengikuti diklat assessor dan diklat RCC assessor oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Capaian atau realisasi pada Indikator Asesor Kompetensi dan Lisensi sejumlah 191 orang atau 131,7% dari target 145 orang yang terdiri dari 4 angkatan diklat assessor dan 4 angkatan diklat RCC assessor. Indikator Kinerja Asesor Kompetensi dan Lisensi telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja		2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
				T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	3	Asesor kompetensi dan lisensi	154	161	300	192	145	191	131,7%	Diklat asessor dan Diklat RCC assessor	Asessor

Hingga akhir 2023, jumlah diklat assessor kompetensi adalah sebanyak 191 asessor atau mencapai 131,7% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebanyak 145 asessor. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 30 asessor. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah diklat asessor kompetensi dan lisensi sebanyak 320 asessor. Namun berdasarkan reuiu yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian pada akhir tahun 2023 serta alokasi anggaran yang didapatkan, menetapkan bahwa target indikator ini di tahun 2024 berubah menjadi 145 orang Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 131,7% ini, diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat

menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 145 asesor. Rincian diklat asesor kompetensi dan lisensi sebagai berikut:

No	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Tempat Pelaksanaan
1	Diklat Asesor Kompetensi I	20-24 Februari 2023	24	Grand Dafam Signature Surabaya
2	Diklat Asesor Kompetensi II	8-12 MEI 2023	24	Alila Solo
3	Diklat Asesor Kompetensi III	12-16 Juni 2023	24	Swiss-Belhotel, Bogor
4	Diklat Asesor Kompetensi IV	10-14 Juli 2023	24	Swiss-Belhotel, Bogor
5	Diklat RCC Asesor Kompetensi I	9-10 Agustus 2023	24	Hotel Dafam Semarang
6	Diklat RCC Asesor Kompetensi II	30-31 Agustus 2023	24	EI Hotel Bandung
7	Diklat RCC Asesor Kompetensi III	30-31 Agustus 2023	24	EI Hotel Bandung
8	Diklat RCC Asesor Kompetensi IV	8-9 November 2023	23	Hotel Swiss Belhotel Bogor

- **Kendala:**

1. Terdapat peserta diklat RCC Asesor yang sertifikatnya sudah kadaluarsa sehingga seharusnya tidak boleh mengikuti pelatihan

- **Tindak Lanjut:**

1. Mendiskualifikasi peserta yang tidak memenuhi syarat

4. Tenaga Kerja Industri yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi

Pengakuan kompetensi atas tenaga kerja industri dilakukan melalui sertifikasi kompetensi oleh LSP. Kesadaran akan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri saat ini masih terus perlu dikembangkan. Oleh karenanya, pemerintah terus mendorong industri agar tenaga kerjanya memiliki sertifikat kompetensi, salah satunya melalui upaya fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri. Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja industri dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai lembaga pelaksana uji kompetensi yang telah mendapat lisensi

dari BNSP.

Indikator ini merupakan jumlah tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi yang difasilitasi oleh Pusdiklat BPSDMI. Capaian atau realisasi pada Indikator Tenaga Kerja Industri yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi sebanyak 4.355 orang dari target 1.500 orang atau 290,3%. Indikator Kinerja Tenaga Kerja Industri yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian yang sangat tinggi ini disebabkan karena adanya *sharing cost* antara LSP dan BPSDMI sehingga target realisasi yang awalnya dihitung dengan estimasi bahwa seluruh pembiayaan ditanggung oleh BPSDMI, realisasinya dapat jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	4 Tenaga Kerja Industri yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	4900	4967	1500	4377	1500	4355	290,3%	Sertifikasi kompetensi pada sektor industri tekstil dan produk tekstil, elektronika, kreatif/animasi, otomotif, logam mesin, kimia, agro	Orang

Hingga akhir 2023, jumlah Tenaga Kerja Industri yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi adalah sebanyak 4.355 orang atau mencapai 290,3% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebanyak 1.500 orang. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 545 orang. Hal ini dikarenakan adanya penurunan partisipasi industri yang mengikuti sertifikasi kompetensi. Namun berdasarkan reuiu yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian pada akhir tahun 2023 serta alokasi anggaran yang didapatkan, menetapkan bahwa target indikator ini di tahun 2024 berubah menjadi 1.500 orang Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 290,3% ini, diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan

pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 1.500 orang. Rincian diklat asesor kompetensi dan lisensi sebagai berikut:

No	Sektor Industri	Bidang Industri	Pelaksana Sertifikasi	Jumlah asesi	Batch	Biaya	
						Usulan Awal (Semula)	Jumlah yang Disepakati (Menjadi)
1	Tekstil & Produk Tekstil	Batik	LSP Batik	50	1	800.000 - 1.750.000	500.000
		Batik	LSP Batik	50	2	800.000 - 1.750.000	500.000
2		Garmen	LSP Garmino Plus	50	1	600.000-750.000	450.000
		Garmen	LSP Garmino Plus	50	2	600.000-750.000	450.000
3		Batik	LSP BBKB Yogyakarta	546	1	900.000	600.000
4		Garmen	LSP Garment	50	1	600.000	450.000
			LSP Garment	67	2	600.000	450.000
5		TPT	LSP Mode Indonesia	30	1	2.500.000	500.000
			LSP Mode Indonesia	30	2	2.500.000	500.000
6		Alas Kaki	LSP Alas Kaki	50	1	550.000	400.000
			LSP Alas Kaki (satker)	45		550.000	400.000
7		TPT	LSP Tekstil	300	1	600.000	500.000
			LSP Tekstil	43	2	600.000	500.000
8		TPT	LSP TPT (Satker)	8		750.000	500.000
9	TPT	LSP Tenun Indonesia	30	2	1.600.000-2.500.000	700.000	
10	Elektronika	Elektronika	LSP Elektroteknika	100	1	1.500.000-7.250.000	500.000
			LSP Elektroteknika (Satker)	2		2.000.000	1.000.000
			LSP Elektroteknika	63	2	1.500.000-7.250.000	500.000
11		Elektronika	LSP TPTU	40	1	1.392.500-3.630.000	500.000
			LSP TPTU	50	2	1.392.500-3.630.000	500.000
12		Elektronika	LSP Elektronika Indonesia	100	1	900.000-4.350.000	500.000
			LSP Elektronika Indonesia	50	2	900.000-4.350.000	500.000
13	Kreatif/Animasi	Animasi	LSP AINAKI	100	1	1.000.000-1.250.000	700.000
			LSP AINAKI	54	2	1.000.000-1.250.000	700.000
14		TIK	LSP TDI	50	1	2.500.000	700.000

No	Sektor Industri	Bidang Industri	Pelaksana Sertifikasi	Jumlah asesi	Batch	Biaya	
						Usulan Awal (Semula)	Jumlah yang Disepakati (Menjadi)
			LSP TDI	50	2	2.500.000	700.000
15		TIK	LSP SDMTIK	100	1	850.000-1.500.000	700.000
			LSP SDMTIK	50		850.000-1.500.000	700.000
16	Otomotif	Otomotif Roda 4	LSP TOP	200	1	750.000	500.000
			LSP TOP	100		750.000	500.000
17		Otomotif Roda 2	LSP TO Indonesia	200	1	490.000-1.636.000	500.000
		Otomotif Roda 2	LSP TO Indonesia	150	2	490.000-1.636.000	500.000
18		Otomotif	LSP Industri Otomotif Indonesia	200	1	1.000.000	500.000
			LSP Industri Otomotif Indonesia	150	2	1.000.000	500.000
			LSP Industri Otomotif Indonesia	75	3	1.000.000	500.000
19	Logam Mesin	Logam dan Mesin	LSP IMABI	100	1	1.350.000-1.450.000	850.000
			LSP IMABI	100		1.350.000-1.450.000	850.000
20		Logam dan Mesin	LSP Perkapalan	100	1	2.000.000	500.000
			LSP Perkapalan	30		2.000.000	500.000
21		Logam dan Mesin	LSP LAS	48	1	1.000.000-3.500.000	500.000
				75			
22		Logam dan Mesin	LSP PAL	52	1	500.000	400.000
			LSP PAL	50	2	500.000	400.000
23	Kimia	Kimia	LSP Kimia Industri	50	1	2.450.000-3.000.000	300.000
24		Kimia	LSP TELAPI	48	1	900.000-3.350.000	500.000
			LSP TELAPI	11	2	900.000-3.350.000	500.000
			LSP TELAPI (Satker)	24		900.000-2.250.000	675.000-1.687.500
			LSP TELAPI (Satker)	42		900.000-2.250.000	675.000-1.687.500
25	Agro	Agro	LSP Agribisnis Ambissi	20	1	1.100.000	500.000
			LSP Agribisnis Ambissi (satker)	8	1	1.100.000	1.000.000
26		Agro	LSP Kopi Indonesia	18	1	1.500.000	500.000
			LSP Kopi Indonesia	15	1	1.500.000	500.000
			LSP Kopi Indonesia	33	2	1.500.000	500.000
27		Agro	LSP Furniko	60	1	750.000-3.000.000	500.000

No	Sektor Industri	Bidang Industri	Pelaksana Sertifikasi	Jumlah asesi	Batch	Biaya	
						Usulan Awal (Semula)	Jumlah yang Disepakati (Menjadi)
			LSP Furniko	53	2	750.000-3.000.000	500.000
28		Kelautan	LSP Kelautan dan Perikanan	50	1	500.000-2.000.000	500.000
			LSP Kelautan dan Perikanan	50	2	500.000-2.000.000	500.000
29		Agro	LSP Furnicraft (satker)	28		1.000.000	600.000
30		Agro	LSP Budidaya Kopi Berkelanjutan (satker)	7		1.250.000	1.000.000
Jumlah				4355			

- **Kendala:**

1. Kesulitan pengumpulan data karena data berasal dari LSP yang menjalin kerjasama

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan monitoring secara berkala.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Target yang ditetapkan merupakan jumlah output dengan estimasi seluruh pembiayaan berasal dari BPSMI. Namun setelahnya BPSDMI mencapai kesepakatan dengan pihak terkait agar pembiayaan dapat dilakukan secara bersama atau *sharing cost* dengan baik dengan LSP atau partner kerjasama dari usulan awal (semula) menjadi jumlah yang disepakati (menjadi).

5. Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat

Dalam upaya pengembangan kompetensi, unit pendidikan diharapkan dapat terlibat pengembangan ekosistem industri, dilakukan kerja sama dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini menjadi kebijakan penting bagi unit pendidikan dalam rangka untuk:

1. Menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan;

2. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan diutamakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan hasil penelitian secara konkret;
3. Mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai.

Jenis kerja sama dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh industri pada Unit Pendidikan adalah (1) Pendampingan teknologi, (2) Pendidikan dan Pelatihan, (3) Pelayanan konsultasi industri, (4) Penyuluhan, (5) Pemanfaatan Lokakarya/Workshop/Laboratorium/Teaching Factory.

Indikator ini merupakan jumlah dari Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat seluruh unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian (9 SMK, 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas).

Capaian atau realisasi pada Indikator perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat sebanyak 185 perusahaan dari target 21 perusahaan atau 880,95%. Indikator Kinerja Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat pada Pendidikan Vokasi telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	5 Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat	6	32	8	200	21	185	880,95%	Perusahaan yang memanfaatkan layanan pada SMK dan Politeknik	Persen

Hingga akhir 2023, jumlah Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat adalah sebanyak 185 perusahaan atau mencapai 880,95% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebanyak 21 perusahaan. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 153 perusahaan. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai 12 perusahaan. Namun mempertimbangkan capaian yang jauh melebihi ekspekasi dari tahun ke tahun, BPSDMI pada tahun 2024 melakukan penambahan target indikator ini menjadi 121 perusahaan. Target tersebut diharapkan

dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 880.95% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 121 perusahaan. Rincian capaian Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat pada Pendidikan Vokasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
SMAK Bogor	3	Kerjasama dengan 3 industri UMKM dalam bentuk pelayanan konsultasi/pengujian produk industri 1 PT Natura Food Prima Lestari 2 PT Garda Utama Indonesia 3 Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor
SMAK Padang	1	Kerjasama dengan CV. Novalindo dalam bidang pembuatan sabun cuci pring dan sabun cuci tangan
SMAK Makassar	5	1 kerja sama dengan PT Zavina Analitica Inspektama dalam skema kerja sama teaching factory dalam bidang analisis batubawa, dan 4 kerja sama pengabdian masyarakat untuk pengembangan produk UMKM (UD Ratu Wajo, Terkini, CV Forest Coffee, dan CV Bachiss Pinrang)
SMTI Banda Aceh	2	1. PT SBA (Pengolahan Garam) 2. PT. Agaz Water (Manufaktur Sparepart mesin Packaging)
SMTI Makassar	4	Pelatihan pembuatan olahan makanan dan minuman dari turunan produk kakao dan pembuatan sabun 1. PT Kongsi Snack and Food 2. PT Cerin Celebes 3. CV Rumah Jaya Chemical 4. CV. Jaya Kimia Makassar
SMTI Yogyakarta	3	Fasilitasi kepada industri berupa 1. Pendidikan dan pelatihan skill mekanik dan el listrik untuk calon peserta magang PT Toyota Boshoku Indonesia. (pendidikan dan pelatihan) 2. Fasilitasi 13 industri melalui penerimaan siswa baru jalur rekomendasi industri. (pendidikan dan pelatihan) 3. Pelatihan pembuatan sirup jahe kepada 40 pelaku UMKM wilayah DI Yogyakarta (pemanfaatan laboratorium/teaching factory)
SMTI Bandar Lampung	3	Perusahaan yang menggunakan layanan industri: 1. PT Mahardika Aurora Sinergi (PT. MAS) (uji lab) 2. AIR MINUM BANYU URIP (uji lab) 3. CV. RATU SEMPURNA (uji lab)

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
SMTI Padang	3	Kerjasama dengan CV. Aslikomah Limau manis selatan dalam hal produksi balsem Kerjasama dengan PT. Nusantara Beta Farma dalam hal pemenuhan pesanan berupa VCO Kerjasama dengan PT. Untuk Rumah Hijau dalam hal penyedia jasa pembuatan sabun cuci piring
SMTI Pontianak	3	Kerjasama dalam pembuatan produk dalam mekanisme Teaching Factory: 1. CV Fajar Batako (Produk cetakan batako) 2. PT Kusuma Jaya Agro (Produk pisau mesin chippe) 3. PT Anugerah Rizeki Teknindo (Produk Jolly Box)
STMI Jakarta	20	Daftar perusahaan penerima layanan industri: 1. Bengkel Motor Tj Priok Jakarta Pusat (Pendampingan Teknologi tentang Manajemen Persediaan Berbasis Cloud) 2. Asosiasi Driver Online (Penyuluhan tentang Faktor Penting dalam Pemilihan Kendaraan Listrik Roda Dua Berbasis Baterai) 3. PT Ganding Toolsindo (Pendampingan Teknologi tentang Pemanfaatan Software ADempiere Sebagai Usaha Penerapan Konsep Enterprise Resource Planning, Penerapan Instrumen INDI 4.0 Dalam Rangka Persiapan Transformasi Industri, dan Hasil Rancang Bangun Alat Jig Welding Modifikasi Pneumatic Clamp untuk Pengelasan Frame Sepeda Motor Listrik) 4. CV Mandalika Motor Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat (Pendampingan Teknologi tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Peramalan Kebutuhan Suku Cadang Kendaraan Berbasis Web) 5. PT Inti Ganda Perdana (IGP) (Pendampingan Teknologi tentang Implementasi DMAIC Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Line Rear Axle Assembly A Dan B dan Penyuluhan tentang Edukasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Melalui Audit K3 sebagai Upaya Penurunan Risiko Kecelakaan Kerja) 6. PT Bintang Matrix (Pendidikan dan Pelatihan tentang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan) 7. PT Asmar Nakama Partogi (Pendidikan dan Pelatihan tentang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan) 8. PT Sinar Perkasa Engineering (Pendampingan Teknologi tentang Good Manufacturing Practice pada pengendalian proses) 9. PT Bakrie Autoparts (Pendampingan Teknologi tentang Implementasi Sistem Informasi Inventory Berbasis Android) 10. Bengkel Mobil di Halim Jakarta Timur (Penyuluhan dan Pendampingan Teknologi tentang Sistem Informasi Manajemen Bengkel) 11. Bengkel Motor Jakamulya Bekasi Selatan (Penyuluhan tentang Penerapan 5R) 12. PT Eran Plastindo Utama (Penyuluhan tentang Minimasi Shrinkage dengan Optimalisasi Parameter Proses Injeksi dan Pendampingan Teknologi tentang Analisis Overall Equipment Effectiveness (OEE) Dan Six Big Losses Dalam Implementasi Total Productive Maintenance (TPM))

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
		13. Perusahaan Otomotif (Penyuluhan tentang Manajemen Persediaan) 14. Dealer Wuling Arista (Pendidikan dan Pelatihan tentang Peningkatan Kinerja Karyawan) 15. PT Laksana Teknik Makmur (Penyuluhan tentang Penggunaan Microtalc Dan Nanotalcs Sebagai Penguat Untuk Meningkatkan Sifat Thermal Dan Mekanik Komposit Berbasis High Density Polyethylene (Hdpe) Recycle) 16. PT Injeksi Plastik Pasifik (Pendampingan Teknologi tentang Peningkatan kualitas produk insert knob dengan pembuatan PA66/PP) 17. Bengkel Motor Cempaka Putih DKI Jakarta (Penyuluhan tentang Implementasi Resik, Ringkas, Rapi, Rawat, Rajin (5R)) 18. Bengkel Otomotif (Pendidikan dan Pelatihan tentang Digital Marketing) 19. PT Mada Wikri Tunggal (Penyuluhan tentang Strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ergonomi di Industri Hilir Polimer) 20. CV Sembada Era Perkasa (Penyuluhan tentang Hak Milik Industri)
STTT Bandung	4	Pelatihan untuk Industri Tekstil dan Garmen\ - PT Mas Arya - PT Pelangi Elasindo - PT Nagasakti Kurnia Textile Mills - PT Soljer Abadi

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
AKA Bogor	50	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Aloe Vera Indonesia Pengujian Sampel Air 2. PT. Adhimix RMC Indonesia Plant Sentul Pengujian Sampel Air 3. PT. Imora Motor Pengujian Sampel Air 4. PT. Kurnia Sakti Pengujian Sampel Air 5. PT. Multi Prima Sejahtera Pengujian Sampel Air 6. PT. Nusantara Parkerizing Pengujian Sampel Air 7. PT. Polychemie Asia Pasific Permai Pengujian Sampel Air 8. PT. Sehat Cerah Indonesia Pengujian Sampel Air 9. PT. Super Unggas Jaya Pengujian Sampel Air 10. PT. Taman Sari Dian Persada Pengujian Sampel Air 11. PT. Tanshia Consumer Products Pengujian Sampel Air 12. PT. Tatamulia Nusantara Indah Pengujian Sampel Air 13. PT. Trimitra Medika Pengujian Sampel Air 14. PT. TUV Nord Indonesia Pengujian FT-IR 15. PT. Unitex Pengujian Sampel Air 16. IKM Cancimen Kabupaten Garut Pelatihan Penggunaan Mesin Penggoreng Otomatis dengan Teknologi 4.0 pada Produk Cuanki di IKM Cancimen, Kabupaten Garut 17. IKM Cipta Rasa Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Pelatihan Pembuatan Sensor Suhu dan Kelembaban Berbasis IoT untuk Membantu Proses Pengeringan Kerupuk di IKM Cipta Rasa Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon 18. IKM Iman Batik Cirebon Pelatihan Penggunaan Alat Pemantau Suhu dan Kelembaban Berbasis Teknologi 4.0 serta Penyuluhan Internet Marketing di IKM Iman Batik Cirebon 19. IKM N.ICE FOODDRINK Pelatihan Teknis Pembuatan Yoghurt Menggunakan Sensor Suhu Berbasis Teknologi 4.0 di IKM N.ICE FOODDRINK 20. Produk IKM Rengginang Marema, Cirebon Pelatihan Pembuatan Sensor Suhu dan Kelembaban Berbasis Teknologi Industri 4.0 di Gudang Penyimpanan Produk IKM Rengginang Marema, Cirebon 21. IKM Pusako Bundo Kansay Retort Packaging Technology pada Produk Sambal Tanpa Pengawet dan Aplikasi Barcode 4.0 pada Kemasannya untuk Pengembangan Produk IKM Pusako Bundo Kansay 22. IKM Keripik KWT Berkah Medal Jaya Desa Cipicung, Kec. Cijeruk Kab. Bogor Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos dari Limbah Kulit Singkong dan Label 2D Barcode untuk Kemasan di IKM Keripik KWT Berkah Medal Jaya Desa Cipicung Kec. Cijeruk Kab. Bogor 23. IKM Ikan Asap Kabupaten Cirebon Peningkatan Mutu Olahan Produk Ikan dengan Menerapkan Teknologi Industri 4.0 di Ikm Ikan Asap Kabupaten Cirebon 24. IKM DAPOER ANIS'S, KEL. KATULAMPA KEC. BOGOR TIMUR KOTA BOGOR Pelatihan Penghitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Teknis Pemasaran Online 25. Industri Kecil Menengah Telur Asin Cipta Barokah Cihideung-Cijeruk Kabupaten Bogor Pelatihan Pembuatan Mesin Penetas Telur Berbasis Industri 4.0 di Industri Kecil

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
		<p>Menengah Telur Asin Cipta Barokah Cihideung-Cijeruk Kabupaten Bogor</p> <p>26. IKM Pala Sari Mulya, Dramaga, Kabupaten Bogor Pelatihan Pembuatan Jeli Pala dan Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis 4.0 di IKM Olahan Pala serta Penyuluhan Pembuatan Nata De Soya di IKM Tahu Cibuluh Kab Bogor</p> <p>27. IKM Ilham Fresh di Desa Langensari, Lembang, Bandung Barat Pelatihan Pengolahan Limbah Sayur Padat Menjadi Kompos Menggunakan Sensor Suhu Berbasis Teknologi 4.0 pada IKM Ilham Fresh di Desa Langensari, Lembang, Bandung Barat</p> <p>28. IKM Chocobond Rebranding IKM Chocobond sebagai Upaya Mendukung Kearifan Lokal Kabupaten Cirebon: Pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP), Rancang Bangun Online Marketplace, dan Pemanfaatan Internet Of Things (IoT) pada Diversifikasi Produk Olahan Coklat</p> <p>29. IKM Tahu Tansa Bogor Optimasi Proses Produksi Tahu Bandung dan Penerapan Industri 4.0 di IKM Tahu Tansa Bogor</p> <p>30. IKM Rumah Makan Batari Apung Kec. Karangsong Kab. Indramayu Jawa Barat Pelatihan Sterilisasi Menggunakan Ozonizer Berbasis 4.0 di IKM Rumah Makan Batari Apung Kec. Karangsong Kab. Indramayu Jawa Barat</p> <p>31. Industri Kecil Menengah Ladu Geulis, Kabupaten Garut Penyuluhan HACCP dan Keamanan Pangan untuk Industri Kecil Menengah Ladu Geulis, Kabupaten Garut</p> <p>32. IKM Lee Bakery Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Penyuluhan Strategi Pemasaran di IKM Lee Bakery Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon</p> <p>33. UKM Kripik Tempe Mak Linda Penyuluhan Terkait Internet Marketing Produk Berbasis TikTok UKM Kripik Tempe Mak Linda</p> <p>34. IKM De Laekker Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Self Declare IKM De Laekker</p> <p>35. IKM Wilsais Cookies Emping Melinjo Penyuluhan Good Manufacturing Practises, cleaner production di IKM Wilsais Cookies Emping Melinjo</p> <p>36. IKM Yougourt Penyuluhan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB) dan Pemasaran di IKM Yougourt</p> <p>37. IKM Manisan Pepaya Cijeruk Kab Bogor Food Safety Handling pada Industri Makanan Skala Rumah Tangga IKM Manisan Pepaya</p> <p>38. IKM Jamu Gende Konde Pendampingan Perijinan dan Sertifikasi Halal di IKM Jamu Gende Konde</p> <p>39. IKM Meng-Meng, Katulampa, Bogor Timu, Kota Bogor Sanitasi dan Pengemasan Produk Pangan IKM Meng-Meng</p> <p>40. IKM Kerupuk Pangsit Adi Rasa Penyuluhan Keselamatan dan kesehatan kerja di IKM Kerupuk Pangsit Adi Rasa</p> <p>41. IKM Abah Ismail, kabupaten Bogor Pembuatan Nata De Soya IKM Abah Ismail</p> <p>42. UKM ADGLUCK.CO Pendampingan Proses Sertifikasi</p>

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
		<p>Halal Jalur Self Declare UKM ADGLUCK.CO</p> <p>43. IKM Dapur Mama Fie Pemanfaatan media sosial dan aplikasi design untuk meningkatkan pemasaran IKM Dapur Mama Fie</p> <p>44. IKM Keripik Jabrig Kota Bogor Penyuluhan penyusunan dokumen HACCP Plan di IKM Keripik Jabrig Kota Bogor</p> <p>45. IKM Siwang Batari Apung Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah dari Produk Siwang (Bawang Goreng Terasi) Kemasan Khas Indramayu Menjadi Berbagai Produk Bernilai Ekonomis di IKM Siwang Batari Apung</p> <p>46. IKM Roti Endolita, Ciomas, Kabupaten Bogor Penyuluhan Penyusunan Dokumen Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) di IKM Roti Endolita, Ciomas, Kabupaten Bogor</p> <p>47. IKM Rareri, Tajur Halang, Kabupaten Bogor Penyuluhan mengenai Pemasaran dan e-commerce di IKM Rareri, Tajur Halang, Kabupaten Bogor</p> <p>48. IKM Mekarsari, Ranca Bungur, Kabupaten Bogor Penyuluhan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) dan K3 di IKM Mekarsari, Ranca Bungur, Kabupaten Bogor</p> <p>49. IKM K-Bakery, Bogor Penyuluhan Keamanan Pangan dan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) serta K3 di IKM K-Bakery, Bogor</p> <p>50. IKM Raina Recipe, Bogor Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di IKM Raina Recipe</p>

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
PTKI Medan	15	<p>Layanan Career Development Center:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA (26 JAN 2023) 2. PADASA ENAM UTAMA (6 FEB 2023) 3. UOI (10 FEB 2023) 4. SOCIMAS (11 AGTS 2023) 5. SMART TBK (14 AGTS 2023) 6. MEDISAFE TECHNOLOGIES (23 SEP 2023) 7. PADASA ENAM UTAMA (19 DES 2023) <p>Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi Sistem Pada Unit Sterilizer Di PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk-Bagerpang POM 2. Perancangan Sistem Otomatisasi Pada Sistem Cleaning Di Unit Boiler PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk-Bagerpang POM 3. Pelatihan Pengujian Standar Mutu Mie Basah Di IKM Umroh Foods 4. Pelatihan Pembuatan Sabun Padat Transparan Berbahan Dasar Minyak Jelantah Serta Teknik Pemasaran Online Produk IKM T.A Rezeki Keluraan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan 5. Pelatihan Pengujian Standar Mutu Komponen Boiler Hasil Pengecoran Di PT Sinar Karya Inovatif 6. Penyuluhan Pembuatan Pupuk Cair Organik Berbasis Limbah Pabrik Kelapa Sawit Dan Sistem Pemasaran Online Pupuk Di PT Mora Niaga Jaya Aceh Tamiang 7. Edukasi Dasar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pengelasan Bagi Pegawai Workshop Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Dolok Ilir Simalungun 8. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair Dan Pakitik Vitknmah Kerjasama PTKI Medan Dengan Koperasi Sinar Lintong Mandiri, Di Kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Lintong Ni Huta

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
ATI Padang	12	<p>Layanan pengabdian masyarakat kepada UKM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM Kelompok Tani Pembibitan Tanaman Bunga dan Buah, Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang. 085101890310 2. CV. Keju Lasi, UKM pengolah susu sapi di Kabupaten Agam., Jorong Lasi Tuo, Nagari Lasi, Kecamatan Canduang – Kabupaten Agam.. 081319733582 3. CV. Amna Lab Aromaterapi, Perumnas Taman Asri Halaban II Blok M No 12 Kec. Kubung, Kab. Solok.. Ika Ambarlina 4. Kelompok Usaha Kerupuk Ramuak, VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. 081267343373 5. UKM Minyak Atsiri Desa Balai Batu Sandaran Kota Sawalunto 6. IKM Setia, Jl. Adinegoro No.3A Gang Menara, Kel. Birugo, Kec. ABTB, Kota Bukittinggi. 0 7. UD. RANTI, Desa Pasar Kubang, Kec. Lembah Segar, Kota Sawahlunto. 082387034913 8. UKM Kanagarian Siguntur Kec Kot XI Tarusan Kab Pesisir Selatan 9. UKM Karya di Kanagarian Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padan Pariaman <p>Layanan Inkubator Bisnis kepada UKM dalam mendapatkan ijin PIRT dan pengembangan Produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapur Uda Rauf 2. D'Tri Cake and Brownies 3. D'Irma Cake 4. LMS Cake 5. Nadra Cake & Cookies 6. Kampuang Salero 7. Sindy Snack 8. Tingming 9. Des Brownies & Cake 10. COGAN
ATK Yogyakarta	14	<p>Layanan Pengujian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CV. Fajar Makmur 2. Hasan Basalamah 3. Syah Craft 4. Ulil Aidil 5. CV. Qita Mandiri Leather 6. CV. Satria 2000 Leather 7. Anggun Rotan 8. Kias Leather 9. CV. Berliano 10. MG Company 11. Kartika Jaya 12. Sasa Design 13. CV. Widi Rahayu 14. Rosman Leather
APP Jakarta	1	<p>Layanan Pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Solid Logistic

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
ATI Makassar	19	1. Kerjasama dalam Pendidikan dan Pelatihan: <ul style="list-style-type: none"> - PT Jea Phinisi Indonesia - PT Hengjaya - Perusahaan Pengelolahan Kelapa, Internasional, Srilangka - PT Pupuk Kaltim - PT Huabao Industrial Park - Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maros - UKM Peternak Ayam Boiler - IKM Penggilingan Gabah - UMKM/IKM Pangkep - Greenhouse Dream Farm - UKM Penggilingan Padi Gowa - SMP SIT Ikhtiar - IKM Rumah Jamur Maros - IKM Tulip Tahu - PT Perkebunan Nusantara XIV 2. Kerjasama dalam pendampingan teknologi <ul style="list-style-type: none"> - UD. Rizky Amalia - Kecamatan Amali Kabupaten Bone - UD Tani Nila Nusantara Pangkep 3. Kerjasama dalam Penyuluhan : <ul style="list-style-type: none"> -CV. Kasih dan Sayang
Akom Surakarta	4	1. UKM Konveksi Total Sportswear Klaten (Rancang bangun alat inspeksi garmen dan pendampingan penghitungan kapasitas produksi) 2. UKM Pembuatan Sarung Goyor Sragen (Penguatan kapasitas SDM) 3. UKM Lurik Asri Tlingsing Klaten (Penyuluhan dan pendampingan K3 dan pengolahan limbah, Hibah bahan baku benang) 4. UKM Konveksi Seyumicho Kartasura Sukoharjo (Pelatihan produktivitas industri, penataan mesin, penerapan 6S, ergonomi, dan K3)
PIL Morowali	4	1. PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Pemanfaatan bersama sarana untuk penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan, pengembangan IPTEK 2. PT Tsing Tsan (Tenant PT. Indonesia Morowali Industrial Park , Teaching Factory (join laboratory) 3. PT. Endress+ Hauser Indonesia, Internship program/field work practice for students 4. PT. Buhler Indonesia, joint research

Satuan Kerja	Realisasi	Keterangan
PIFPK Kendal	7	7 perusahaan yang bekerja sama dalam program pengabdian kepada masyarakat 1) PT Triconville Indonesia Pelatihan AutoCAD dan SketchUp Bagi Karyawan PT. Triconville Indonesia. 2) PT Philnesia Internasional Program Pengabdian Masyarakat dengan judul “Pelatihan Peningkatan Skill Menganyam Rotan Sintetis pada Produk Furnitur Sebagai Langkah Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Desa Kumpulrejo” dan layanan industri berupa pembuatan prototype produk yang akan dijual. 3) CV Karya Wahana Sentosa Program Pengabdian Masyarakat dengan judul “Pelatihan Distribusi Hasil Pembuatan Produk Seni Kriya Khas Kabupaten Kendal” 4) PT Bio Industri Omnipresen Program Pengabdian Masyarakat dengan judul “Pelatihan Pembuatan Produk Seni Kriya Khas Kabupaten Kendal” 5) PT Semeru Karya Buana Program Pengabdian Masyarakat dengan judul “Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dalam Meningkatkan K3 di Industri Furnitur” 6) PT Mamagreen Pacific Program Pengabdian Masyarakat dengan judul “Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dalam Meningkatkan K3 di Industri Furnitur” 7) PT Kayu Permata Program Pengabdian Masyarakat dengan judul “Pelatihan Pertolongan
Poltek Banten	3	Pemberian hibah pisau mesin pencacah sampah di TPSA bagendung, Mesing pencacah sampah plastic di Perumahan Grand Sutra Cilegon, dan memberi pelatihan bagi guru dan tenaga pengajar di SMA/SMK dan yang setara untuk meningkatkan kompetensi Guru di bawah CSR perusahaan Chandra Asri Pasific, Tbk.
Akom Bantaeng	6	6 perusahaan atau IKM yang memanfaatkan layanan industri untuk layanan pendidikan yaitu : IKM Cahaya Desaku ,IKM Merica Tani Sejahtera , IKM Reski Onto , IKM Assiddiqah , IKM Rumah Jamur dan IKM Bawang Goreng CV Ainun Jaya
TOTAL	185	

- **Kendala:**

1. Terdapat ketidaksamaan persepsi terkait interpretasi dari kriteria indikator Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat

- **Tindak Lanjut:**

1. Membuat Nota Dinas penjelasan lebih lanjut terkait indikator Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat
2. BPSDMI melakukan penambahan target menjadi 21 perusahaan pada tahun 2023 dan 121 perusahaan pada tahun 2024 yang sudah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan target renstra BPSDMI.

- **Faktor pendukung:**

1. Target indikator ini pada awalnya merupakan satelit dari PIDI 4.0, namun setelah dilakukan penyusunan pedoman kinerja pada rencana strategis BPSDMI, telah ditetapkan beberapa kriteria implementasi 4.0 sehingga satuan kerja dapat memasukkan beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai output sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada rencana strategis BPSDMI.

- **Faktor pendukung:**

1. Target indikator ini pada awalnya merupakan MoU dengan perusahaan, namun setelah dilakukan penyusunan pedoman kinerja pada rencana strategis BPSDMI, telah ditetapkan beberapa kriteria Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat sehingga satuan kerja dapat memasukkan beberapa perusahaan yang memanfaatkan layanan satuan kerja sebagai output sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada rencana strategis BPSDMI.

6. Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik sebesar 336 dari target 334 atau 100,6%. Indikator Kinerja Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik belum memenuhi target yang telah

ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	6	Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik	316 (B)	320	331 (B)	332.29	334	336	100,6%	Akreditasi 11 Politeknik dan 2 akademi komunitas di lingkungan BPSDMI	Nilai

Hingga akhir 2023, Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik senilai 336 atau mencapai 100,6% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu senilai 336. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai 16. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik senilai 361 (B). Namun dengan adanya perubahan mekanisme penilaian akreditasi dimana pengajuan penilaian akreditasi saat ini berbayar dan mengingat keterbatasan anggaran di setiap satuan kerja, maka BPSDMI menurunkan target tahun 2024 menjadi senilai 337. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 100,6% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target senilai 337.

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai rata-rata akreditasi program studi dari beberapa nilai akreditasi program studi diatas 300 yang ada di satuan kerja Politeknik dan Akademi Komunitas. Bagi program studi yang nilainya di bawah 300, diminta untuk melakukan reakreditasi. Berdasarkan data hingga akhir triwulan IV 2023, diperoleh nilai rata-rata akreditasi program studi sebesar 336 dari target nilai 334 atau

memperoleh capaian sebesar 100,6% dari target.

Terdapat 3 prodi dari politeknik yang tergolong baru berdiri sehingga masih menggunakan nilai akreditasi minimum dan 9 prodi dari 3 Politeknik dan Akademi Komunitas yang belum melakukan reakreditasi. Terdapat 5 program studi yang telah mendapatkan nilai akreditasi yang baru di tahun 2023 yaitu:

- a. Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta dengan hasil Baik Sekali;
- b. Penjaminan Mutu Industri Pangan Politeknik AKA Bogor dengan hasil Unggul;
- c. Otomasi Sistem Permesinan Politeknik ATI Makassar dengan hasil B;
- d. Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik ATI Makassar dengan hasil Unggul; dan Unggul; dan
- e. Teknik Kimia Mineral Politeknik ATI Makassar dengan hasil Unggul.

Nilai akreditasi program studi sebagian besar telah mencapai kualifikasi baik sekali sehingga perlu di dorong untuk mendapatkan akreditasi unggul. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat skor yang diperoleh sudah terbilang tinggi. Sedangkan untuk unit pendidikan baru dan program studi baru masih mendapatkan nilai baik perlu ditingkatkan secara berkala. Masa berlaku kreditasi selama 5 tahun menjadikan tidak semua prodi dapat melakukan reakreditasi di tahun tersebut. Hal ini tentunya berpengaruh pada potensi capaian target yang berupa nilai rata-rata karena penentuan kenaikan capaian akan terfokus pada prodi yang sedang melakukan reakreditasi di tahun tersebut.

Durasi 5 tahun tersebut juga menjadi waktu yang dimiliki unit pendidikan untuk memperbaiki diri dan memperoleh nilai akreditasi yang lebih baik lagi. PPPVI berupaya memfasilitasi dengan menyelenggarakan serangkaian program dan kegiatan guna mendukung peningkatan nilai akreditasi. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya Fasilitasi Program Sertifikasi Guru Dan Dosen, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Peningkatan Akreditasi Politeknik Dan Akademi Komunitas, Magang Dan Pelatihan Teknis bagi tenaga pendidik, dan Fasilitasi Rintisan Pengembangan Kerja Sama Unit Pendidikan.

Kegiatan-kegiatan tersebut dinilai dapat membantu dalam peningkatan kualitas

baik unit pendidikan maupun tenaga pengajar, termasuk diantaranya terdapat penyelenggaraan Diklat PEKERTI dan pengadaan langganan jurnal internasional yang dapat dimanfaatkan oleh unit pendidikan dan para pegawainya.

Rincian capaian Nilai Akreditasi Program Studi di Politeknik Pendidikan Vokasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Strata	Nilai Akreditasi
1	Politeknik ATI Padang	Teknik Industri Agro	D-III	362
		Analisis Kimia	D-III	351
		Teknik Kimia Bahan Nabati	D-III	348
		Manajemen Logistik Industri Agro	D-III	353
		Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan	D-IV	250
2	Politeknik ATI Makassar	Teknik Industri Agro	D-III	347
		Otomasi Sistem Permesinan	D-III	336
		Teknik Manufaktur Industri Agro	D-III	361
		Teknik Kimia Mineral	D-III	353
3	Politeknik STTT Bandung	Kimia Tekstil	D-IV	364
		Teknik Tekstil	D-IV	365
		Produksi Garmen	D-IV	376
		Rekayasa Tekstil dan Apparel	S-II Terapan	264
4	Politeknik AKA Bogor	Penjaminan Mutu Industri Pangan	D-III	361
		Pengolahan Limbah Industri	D-III	345
		Analisis Kimia	D-III	367
		Nanoteknologi Pangan	D-IV	200
5	Politeknik Teknologi Kimia Industri	Agribisnis Kelapa Sawit	D-III	315
		Teknik Mekanika	D-III	306
		Teknik Kimia	D-III	312
6	Politeknik ATK Yogyakarta	Teknologi Pengolahan Karet Dan Plastik	D-III	301
		Teknologi Pengolahan Kulit	D-III	352
		Teknologi Pengolahan Produk Kulit	D-III	312
7	Politeknik STMI Jakarta	Teknik Kimia Polimer	D-IV	312
		Sistem Informasi Industri Otomotif	D-IV	321
		Administrasi Bisnis Otomotif	D-IV	-
		Teknik Industri Otomotif	D-IV	326
		Teknologi Rekayasa Otomotif	D-IV	234
8	Politeknik APP Jakarta	Manajemen Logistik Industri Elektronika	D-III	316
		Perdagangan Internasional Wilayah Asean Dan Rrt	D-III	315
		Manajemen Pemasaran Industri Elektronika	D-III	329
9	Politeknik Industri Logam Morowali	Teknik Perawatan Mesin	D-III	216
		Teknik Listrik dan Instalasi	D-III	205
		Teknik Kimia Mineral	D-III	225

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Strata	Nilai Akreditasi
10	Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu	Teknik Produksi Furnitur	D-III	211
		Desain Furnitur	D-III	242
		Manajemen Bisnis Industri Furnitur	D-III	228
11	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	Teknik Pembuatan Benang	D-II	316
		Teknik Pembuatan Kain Tenun	D-II	321
		Teknik Pembuatan Garmen	D-II	301
12	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	Teknik Perawatan Mesin	D-II	202
		Teknik Listrik dan Instalasi	D-II	272
		Analisis Kimia	D-II	265
13	Politeknik Industri Petrokimia Banten	Teknologi Proses Industri Petrokimia	D-III	201
		Teknologi Mesin Industri Petrokimia	D-III	201
		Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia	D-III	201

- **Kendala:**

1. Saat ini terdapat biaya dalam pengajuan reakreditasi sehingga selain membutuhkan dokumen yang cukup banyak dan kompleks sehingga diperlukan waktu penyusunan yang cukup lama, diperlukan juga anggaran yang memadai. Namun mengingat terbatasnya anggaran dan terdapat kebijakan blokir *automatic adjustment*, satuan kerja perlu mempersiapkan dokumen serta anggaran yang memadai agar hasil yang di dapatkan maksimal

- **Tindak Lanjut**

1. Melakukan penyesuaian target pada periode mendatang agar dapat lebih realistis

7. Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang

kompeten serta mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mendiseminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian.

Revolusi Industri 4.0 atau Fourth Industri Revolution (4IR) yang telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir tak hanya fokus pada pengembangan sektor industri. Lebih dari itu, revolusi industri juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, peningkatan keterampilan berbasis teknologi, serta persaingan di kancah perdagangan internasional. Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan melalui penelitian terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Target penerapan hasil penelitian oleh Politeknik dan Akademi Komunitas adalah publikasi hasil penelitian melalui tulisan ilmiah prosiding seminar nasional / internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi / bereputasi internasional.

Indikator ini merupakan jumlah Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional di oleh polieteknik dan akademi komunitas di lingkungan kementerian perindustrian.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional di Politeknik sebesar 324 penelitian atau 190,6% dari target 170 penelitian. Indikator Kinerja Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	7 Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	120	126	150	222	170	324	190,6%	Seminar nasional 4 Seminar Internasional 20 Jurnal Nasional 246 Jurnal Internasional 51 Hak cipta 3	Penelitian

Hingga akhir 2023, jumlah Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional adalah sebanyak 324 penelitian atau mencapai 190,6% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebanyak 170 penelitian. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 198 penelitian. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional sebanyak 200 penelitian. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 190,6% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 200 penelitian. Rincian capaian Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional sebagai berikut:

Satuan Kerja	Seminar nasional	Seminar Internasional	Jurnal Nasional	Jurnal Internasional	Hak cipta
Politeknik ATI Makassar		1	31	4	
Politeknik STMI Jakarta		1	44	3	
Politeknik APP Jakarta			16		
Politeknik STTT Bandung	1	1	19	9	
Politeknik Industri Logam Morowali	2	3	15		
Politeknik AKA Bogor		1	11	10	
Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		2	8		
PTKI Medan		3	16	6	
Politeknik ATI Padang		1	13	4	
Politeknik Industri Furnitur dan Produk Kayu Kendal		1	16		
Politeknik ATK Yogyakarta	1	2	43	8	3

Satuan Kerja	Seminar nasional	Seminar Internasional	Jurnal Nasional	Jurnal Internasional	Hak cipta
Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		4	12	2	
PPPVI			2	5	
TOTAL	4	20	246	51	3

- **Kendala:**

1. Penelitian masih tentang penelitian dasar dan berproses ke applied research.

- **Tindak Lanjut:**

1. Mendorong para dosen untuk segera melakukan applied research

8. Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh

Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Peserta Inkubasi (Tenant). Tenant inkubator bisnis pada balai diklat dan Pendidikan tinggi adalah masyarakat (umum dan mahasiswa, alumni) yang telah memiliki prospektif usaha. Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di balai diklat dan Pendidikan tinggi, meliputi tahap pra inkubasi, tahap inkubasi, dan tahap pasca inkubasi. Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha sebelumnya ataupun mulai dari awal. Output dari inkubator bisnis ini adalah tenant yang memiliki produk yang siap di pasarkan.

Indikator ini merupakan jumlah Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh yang dilaksanakan oleh 7 Balai Diklat Industri (BDI) dan beberapa Politeknik/Akademi Komunitas. Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh sebanyak 86 tenant atau 143,3% dari target 60 tenant. Indikator Kinerja Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja		2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
				T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	8	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	34	39	50	76	60	86	143,3%	Inkubator bisnis yang difasilitasi oleh BDI dan Politeknik Industri	Tenant

Hingga akhir 2023, jumlah Inkubator Bisnis industri yang tumbuh adalah sebanyak 86 tenant atau mencapai 143,3% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebanyak 60 tenant. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 33 tenant. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah Inkubator Bisnis industri yang tumbuh sebanyak 70 tenant. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 143,3% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 70 tenant. Rincian capaian Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Jumlah Tenant	Jumlah Karyawan
1	BDI DENPASAR	22	89
2	BDI MAKASSAR	10	58
3	BDI MEDAN	4	18
4	BDI SURABAYA	2	19
5	BDI JAKARTA	5	25
6	BDI PADANG	10	31
7	BDI YOGYAKARTA	4	20
8	STTT BANDUNG	15	23
9	AKA BOGOR	4	7
10	STMI JAKARTA	6	155
11	PTKI MEDAN	1	8

No	Satuan Kerja	Jumlah Tenant	Jumlah Karyawan
12	ATI PADANG	2	5
13	APP JAKARTA	1	1
14	PIL MOROWALI	1	1
	TOTAL	86	459

- **Kendala**

1. Terdapat kegiatan yang melibatkan mentor yang kurang maksimal dalam tahap pra inkubasi dan seleksi yang belum bisa terealisasi secara maksimal
2. Belum terdapatnya pedoman teknis pelaksanaan inkubator bisnis sebagai acuan pelaksanaan

- **Tindak Lanjut**

1. Menoptimalkan pelaksanaan seleksi pendaftaran inkubator bisnis agar peserta yang lulus merupakan yang terbaik
2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan inkubator bisnis berkoordinasi dengan pusdiklat

• **Perspektif Learn & Growth**

Sasaran Program 5 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	50	81,24	60	70,33	70	86,7	123,9%	Presentase capaian pada intranew kementerian perindustrian	Persen

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di

dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Nilai capaian kinerja dari persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin diperoleh dengan membandingkan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk dalam negeri dengan total pagu anggaran penggunaan produk dalam negeri berdasarkan akun.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 86,7% atau 123,9% dari target 70%. Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

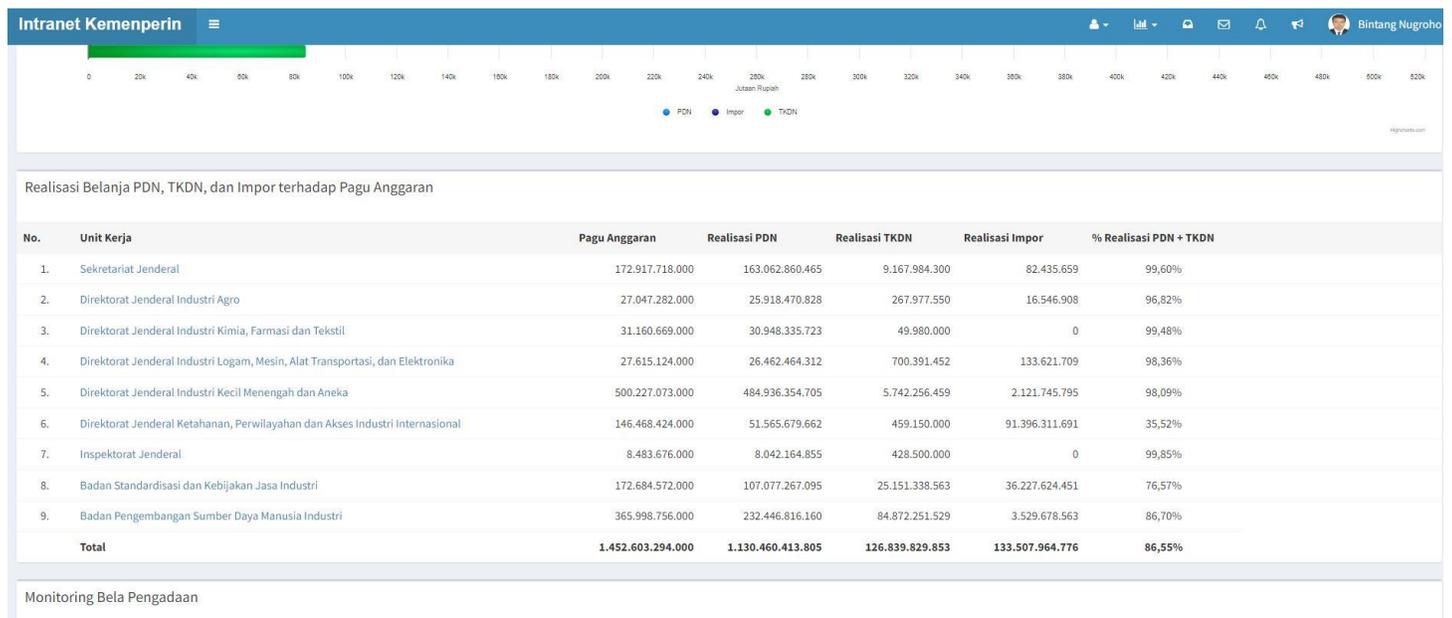
Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	50	81.24	60	70,33	70	86,7	123,9%	Presentase capaian pada intranew kementerian perindustrian	Persen

Hingga akhir 2023, Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 86,7% atau mencapai 123,9% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebesar 70%. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 86,7%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 80%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 123,9% diharapkan

berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 80%. Data Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI diperoleh dari intranet kementerian perindustrian pada menu Emonitoring-APBN sebagai berikut:



- **Kendala: 0020**

1. Belum adanya bimbingan teknis oleh Biro Umum terkait cara menghitung indikator ini sehingga masih banyak satuan kerja yang kurang memahami cara perhitungannya, selain itu pengadaan yang ada ada BPSDMI merupakan pengadaan alat praktek yang mirip dengan yang dipakai oleh industri sehingga alat tersebut kebanyakan memiliki kandungan impor yang cukup tinggi.
2. Masih terdapat banyak data yang belum masuk dalam perhitungan realisasi P3DN padahal telah dilakukan update data pada akun PPK.

- **Tindak Lanjut**

1. Berkoordinasi dengan Biro Umum dan bagian pengadaan terkait dengan indikator

presentase capaian penggunaan produk dalam negeri

Sasaran Program 6 Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja		2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
				T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	70	74	79,15	76	77,75	102,3%	Penilaian laporan keuangan oleh Biro Keuangan	Nilai
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	73,15	74	76,21	76	74,15	97,6%	Penilaian LAKIP oleh inspektorat jenderal	Nilai
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	75	69	77	69	79	82,24	104,1%	Penilaian kearsipan oleh ANRI	Nilai

1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu.

Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon). Indikator ini merupakan Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Kementerian Perindustrian.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 77,75 atau 102,3% dari target nilai 76. Indikator Kinerja Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Industri telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	70	74	79,15	76	77,75	102,3%	Penilaian laporan keuangan oleh Biro Keuangan	Nilai

Hingga akhir 2023, Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar 77,75 atau mencapai 102,3% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebesar 76. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai 7,75. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 78. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 102,3% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 78.

Nilai ini disampaikan dalam surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian Nomor: B/1139/SJ-IND.3/KU/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I TA 2022. Dengan isian sebagai berikut:

**NILAI LAPORAN KEUANGAN TA 2022
TINGKAT ESELON I**

No.	Eselon 1	Nilai
1	INSPEKTORAT JENDERAL	95,50
2	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA	95,50
3	SEKRETARIAT JENDERAL	95,00
4	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	94,00
5	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	94,00
6	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA	92,00
7	DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	91,00
8	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	89,75
9	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	77,75

- Kendala:

1. Memiliki satuan kerja yang banyak di antara eselon 1 lain;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
3. Arahan dari biro keuangan/APK/BPK harus melalui eselon 1 dahulu, sehingga pengerjaan lebih terlambat, pengumpulan data yang dibutuhkan sulit karena harus berkoordinasi dengan satker lain;
4. Penyusunan LK eselon 1 baru bisa dilakukan setelah satker selesai, sehingga jika satker masih belum selesai eselon 1 akan terhambat.

- Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan terkait penyusunan laporan Keuangan
2. Mengajukan penambahan jumlah pegawai

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian

Kinerja.

Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Indikator ini merupakan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Inspektotat Jenderal Kementerian Perindustrian khususnya Inspektorat I bagi BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 74,15 atau 97,6% dari nilai 76. Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	73,15	74	76,21	76	74,15	97,6%	Penilaian LAKIP oleh inspektorat jenderal	Nilai

Hingga akhir 2023, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar 74,15 atau mencapai 97,6% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebesar 76. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai 1. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar 78. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 97,6% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 78. Nilai ini disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2022 Nomor:206/IJ-IND/LHE/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Dengan isian sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, kami telah melaksanakan evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Tahun 2022 dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Unit kerja BPSDMI memperoleh nilai sebesar **74,15 (kategori BB)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Biro Umum dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja	: 22,50
2. Pengukuran Kinerja	: 20,40
3. Pelaporan Kinerja	: 12,00
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	: 19,25

- **Kendala:**

1. Terdapat indikator yang belum smart indicator, namun merupakan indicator yang turun dari kementerian perindustrian kan tetapi unit-unit pusat maupun satuan kerja telah memiliki tugas pokok fungsi masing-masing, sehingga beberapa indikator tersebut di ampu oleh Sekretariat BPSDMI walaupun tidak sesuai dengan tupoksi Sekretariat;

2. Memiliki satuan kerja yang banyak sehingga pengumpulan data memakan waktu yang lebih lama dari eselon 1 lain
3. Keterbatasan SDM yang tidak memadai untuk level Eselon I

- **Tindak Lanjut**

3. Berkoordinasi dengan Inspektorat I dan Biro Perencanaan terkait indikator yang tidak smart atau belum berorientasi pada outcome
4. Mengajukan penambahan jumlah pegawai

3. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri

Penilaian kearsipan diselenggarakan oleh Biro Umum Kemenperin tiap tahun dengan tim penilai berasal dari arsiparis tiap satuan pusat dan satuan kerja daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Indikator ini merupakan Nilai kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 82,24 atau 104,1% dari nilai 79. Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	75	69	77	69	79	82,24	104,1%	Penilaian kearsipan oleh ANRI	Nilai

Hingga akhir 2023, Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri sebesar 82,24 atau mencapai 104,1% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebesar 79. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai 13,4. Adapun target jangka menengah

indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri sebesar 80. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 104,1% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 80. Nilai ini disampaikan dalam Berita Acara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor: AK.01.00/380/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Verifikasi Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di Kementerian Perindustrian. Dengan isian sebagai berikut:

B.	UNIT KEARSIPAN		
1	Biro Umum Setjen	98,47	98,30
2	Sekretariat Ditjen KPAll	95,12	95,12

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI SETELAH VERIFIKASI
3	Sekretariat Direktorat Jenderal IKMA	93,86	93,86
4	Sekretariat Ditjen IKFT	92,88	91,76
5	Sekretariat Inspektorat Jenderal	91,98	91,98
6	Sekretariat Ditjen ILMATE	91,12	91,12
7	Sekretariat BSKJI	91,11	91,11
8	Sekretariat BPSDMI	82,24	82,24
9	Sekretariat Ditjen Ind Agro	81,20	81,20

- **Kendala:**

1. Belum adanya ruangan yang dikhususkan untuk arsip terutama pada BPSDMI pusat yang ada
2. Kurangnya tenaga arsiparis di lingkungan BPSDMI.

- **Tindak Lanjut**

1. Mengusulkan adanya ruang khusus arsip dan mengusulkan pengadaan lemari arsip bagi setiap unit eselon II
2. Mengajukan penambahan jumlah pegawai

Sasaran Program 7 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	71	66,43	73	54.99	71	71,69	101,0%	Nilai IP ASN 4 pusat, 7 BDI, 9 SMK, 13 Politeknik/Akom	Nilai

1. Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI

Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indikator ini merupakan Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI yang di dapatkan dari Biro OSDM Kementerian Perindustrian.

Capaian atau realisasi indicator Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI pada tahun 2023 adalah 71,69 atau 101% dari target 71, nilai berasal dari aplikasi BKN yaitu mySPAK. Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	71	66,43	73	54,99	71	71,69	101,0%	Nilai IP ASN 4 pusat, 7 BDI, 9 SMK, 13 Politeknik/Akom	Nilai

Hingga akhir 2023, Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI sebesar 71,69 atau mencapai 101% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebesar 71. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai 5,25. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI 80. Namun berdasarkan reviu yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Biro OSDM Kementerian Perindustrian pada akhir 2023, target rata-rata indeks ASN tahun 2024 berubah menjadi 72. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 101% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 72.

Nilai ini disampaikan dalam Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian Nomor: 741/SJ-IND.2/KP/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang penyampaian rata-rata indeks profesionalitas ASN yang menyatakan bahwa capaian pada indikator ini untuk level kementerian dan unit kerja diarahkan untuk menggunakan nilai sesuai Surat Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/BM.02/SD/C.II/2024 tanggal 28 Januari 2024 sebagai berikut:



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id | Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 17/BM.02/SD/C.II/2024 Jakarta, 26 Januari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
Kementerian Perindustrian

Yth.
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Perindustrian
di
Jakarta

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor B/117/SJ-IND/KP/II/2024 perihal Permohonan Data Pencapaian IP ASN Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan bahwa pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 belum dilaksanakan. Informasi mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 akan kami sampaikan paling lambat bulan Maret 2024 kepada unit pengelola kepegawaian Instansi Pemerintah.

Adapun nilai Indeks Profesionalitas ASN yang dapat kami sampaikan yaitu Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 sebesar 71,69 (kategori sedang) dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diukur sebanyak 4.381.

Berikut capaian dari setiap dimensi:

1. Dimensi Kualifikasi : 21,56
2. Dimensi Kompetensi : 20,43
3. Dimensi Kinerja : 24,70
4. Dimensi Disiplin : 5,00

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jabatan ASN,

 Sri Grestia, S.Sos, M.AP
NIP. 197403111999022001



- Tembusan :
1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
 3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ



- **Kendala:**

1. Belum updatenya aplikasi mySPAK

- **Tindak Lanjut:**

1. Mendorong dan memotivasi pegawai untuk mengupdate data diri pada aplikasi BKN

Sasaran Program 8 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	91,5	61,49	92	88,66	92	98,55	107,1%	Rekomendasi hasil pengawasan internal oleh inspektorat jenderal yang telah ditindaklanjuti	Persen
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	2,77	3	2,85	2,89	3,445	119,2%	Nilai tingkat Kementerian	Level

1. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Indikator ini merupakan persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah Ditindaklanjuti oleh BPSDMI terhadap rekomendasi dari temuan Inpektorat Jenderal dari Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat I bagi BPSDMI.

Capaian atau realisasi indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti tahun anggaran 2022 sebesar 98,55% atau 107,1% dari target 92%. Sejumlah 409 temuan telah ditindaklanjuti (396 temuan telah sesuai rekomendasi dan 13 temuan belum sesuai rekomendasi) dari total 415 temuan yang ada pada unit pusat maupun satuan kerja daerah di lingkungan BPSDMI. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	91,5	61,49	92	88.66	92	98,55	107,1%	Rekomendasi hasil pengawasan internal oleh inspektorat jenderal yang telah ditindaklanjuti	Persen

Hingga akhir 2023, Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sebesar 98,55 atau mencapai 107,1% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebesar 92. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 37,05%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI 93. Namun berdasarkan reuiu yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada akhir 2023, target Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti berubah menjadi 92,2. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 107,1% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 92,2. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Nilai (Rp) yang telah ditindaklanjuti	Saldo Temuan	Nilai (Rp) yang belum ditindaklanjuti	Total Rekomendasi	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	BPSDMI	31	Rp 164.712.234,61	20	Rp 164.712.234,61	11	Rp -	50	38	9	3	0
2	BDI	53	Rp -	53	Rp -	0	Rp -	89	89	0	0	0
3	Sekolah	171	Rp 111.882.683	167	Rp 111.882.683	4	Rp -	276	269	4	3	0
TOTAL		255	Rp 276.594.918	240	Rp 276.594.918	15	Rp -	415	396	13	6	0

- **Kendala:**

1. Penyampaian pemenuhan bukti tindak lanjut ke Inspektorat Jenderal atas saldo temuan yang ada belum maksimal

- **Tindak Lanjut**

1. Memotivasi agar setiap unit maupun satuan kerja agar segera menindaklanjuti temuan yang ada

2. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.

Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1,2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

Indikator MRI selama ini telah dilaksanakan namun hanya memiliki nilai agregat untuk tingkat kementerian yaitu 3,445. Sehingga nilai ini pula yang dijadikan capaian oleh BPSDMI. Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) senilai 3,445 level atau 119,2% dari target 2,89 level. Indikator Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	2,77	3	2,85	2,89	3,445	119,2%	Nilai tingkat Kementerian	Level

Hingga akhir 2023, Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar 3,445 atau mencapai 119,2% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebesar 2,89. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 0,675. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai level Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) 4. Namun berdasarkan reviu yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Biro Keuanagn Kementerian Perindustrian pada akhir 2023, target Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) tahun 2024 berubah menjadi 3. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 119,2% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 3.

Nilai ini disampaikan dalam surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PE.03.09/LHP-173/D104/1/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasikan pada Kementerian Perindustrian Tahun 2022/2023. Dengan isian sebagai berikut:

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perindustrian, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3,540 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi).
- b. Nilai untuk MRI adalah 3,445 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (*Defined*).
- c. Nilai untuk IEPK adalah 3,230.

Adapun rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi	Naik/(Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,814	3,540	(0,274)
2	MRI	3,865	3,445	(0,42)
3	IEPK	3,490	3,382	(0,108)

- **Kendala:**

1. Penilaian dikeluarkan oleh BPKP pada akhir tahun untuk level kementerian, dan sama bagi seluruh unit dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian

- **Tindak Lanjut**

1. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan

Sasaran Program 9 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP9	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	72	62,5	74	81	76	86	113,2%	Kuisiner untuk KKNI Bidang Otomasi Industri (Permenperin No. 49 Tahun 2018) KKNI Bidang Otomotif Subbidang Body Repair (Permenperin No. 38 Tahun 2020) KKNI Bidang Otomotif Subbidang Komponen (Permenperin No. 37 Tahun 2020) KKNI Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan (Permenperin No. 34 Tahun 2020)	Persen

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun. Efektivitas regulasi yang disusun diukur melalui indikator kinerja yaitu efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin

Indikator ini merupakan persentase antara regulasi yang telah ditetapkan di lingkungan BPSDMI dan telah diterapkan terhadap seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 86% atau 113,2% dari target 76%. Pengukuran pada indikator ini dilakukan pada 4 KKNI. Indikator Kinerja Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP9	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1 Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	72	62,5	74	81	76	86	113,2%	Kuisisioner untuk KKNI Bidang Otomasi Industri (Permenperin No. 49 Tahun 2018) KKNI Bidang Otomotif Subbidang Body Repair (Permenperin No. 38 Tahun 2020) KKNI Bidang Otomotif Subbidang Komponen (Permenperin No. 37 Tahun 2020) KKNI Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan (Permenperin No. 34 Tahun 2020)	Persen

Hingga akhir 2023, Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 86 atau mencapai 113,2% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2023 yaitu sebesar 78. Capaian indikator ini di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 23,5%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI 78. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 113,2% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 78.

Evaluasi efektivitas regulasi dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif melalui survey dengan alat survey berupa kuesioner pada tautan <https://forms.gle/N9BeQZ3RTmU43VEC8> yang dibagikan kepada para pelaku industri terkait dengan regulasi yang diberlakukan.

Data yang terkumpul dari pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert yaitu skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial, berdasarkan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Skala yang digunakan adalah skala 1 – 5 dengan gradasi dari sangat positif ke sangat negatif.

Pernyataan	Skor
Sangat setuju	1
Setuju	2
Ragu – ragu	3
Tidak setuju	4
Sangat tidak setuju	5

Cara perhitungan hasil pengisian kuesioner adalah : [(Bobot skor sangat setuju x total tanggapan sangat setuju) + (Bobot skor setuju x total tanggapan setuju) + (bobot skor ragu – ragu x total tanggapan ragu – ragu) + (bobot skor tidak setuju x total tanggapan tidak setuju) + (bobot skor sangat tidak setuju x total tanggapan sangat tidak setuju)].

$$\% = \frac{\text{Total skor tanggapan efektivitas regulasi}}{\text{Total skor tanggapan efektifitas regulasi tertinggi}} \times 100\%$$

Kriteria indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Persentase	Kriteria Indikator
0 % – 20%	sangat lemah/ buruk/ tidak setuju
21 % – 40 %	lemah/ buruk/ tidak setuju
41 % – 60 %	cukup/ netral
61 % – 80 %	kuat/ baik/ setuju
81 % – 100 %	sangat kuat/ baik/ setuju

Dalam evaluasi efektivitas regulasi, aspek – aspek yang diukur dikelompokkan berdasarkan tahapan implementasi regulasi, yaitu:

1. Tahap penyusunan regulasi.
2. Tahap sosialisasi regulasi.
3. Tahap pra implementasi/ pemahaman.
4. Tahap implementasi.
5. Tahap paska implementasi terkait manfaat atau dampak yang diberikan.
6. Pemenuhan kebutuhan terhadap regulasi.

Berikut adalah daftar pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk mengukur pemahaman dan persepsi terhadap implementasi regulasi :

No.	PERNYATAAN	SIKAP				
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Dalam penyusunan regulasi, perusahaan industri/asosiasi industri dilibatkan					
2.	Regulasi yang ditetapkan telah disosialisasikan kepada perusahaan industri/asosiasi industri					
3.	Perusahaan industri/asosiasi industri dapat dengan mudah mendapatkan penjelasan terkait regulasi yang ditetapkan					
4.	Isi dari regulasi yang telah ditetapkan dapat dipahami oleh perusahaan industri/asosiasi industri					
5.	Perusahaan industri/asosiasi industri dapat menerima pemberlakuan regulasi yang telah ditetapkan					
6.	Regulasi yang ditetapkan dapat diimplementasikan oleh perusahaan industri/asosiasi industri					
7.	Regulasi yang ditetapkan memberikan manfaat secara merata pada semua skala perusahaan industri/asosiasi industri					
8.	Regulasi yang ditetapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis dari perusahaan industri/asosiasi industri					
9.	Regulasi yang ditetapkan membantu pemulihan bisnis perusahaan industri/asosiasi industri di masa pandemik					
10.	Regulasi yang ditetapkan mendukung perusahaan industri/asosiasi industri dalam menghadapi persaingan bisnis global					
11.	Regulasi yang ditetapkan ini telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri/asosiasi industri					
12.	Regulasi yang ditetapkan tidak bertentangan dengan regulasi lain yang telah ditetapkan sebelumnya					
13.	Regulasi yang ditetapkan tidak memerlukan revisi atau tambahan aturan lainnya					

Kriteria yang digunakan dalam pengukuran efektifitas regulasi adalah sebagai berikut:

1. Regulasi yang diukur adalah regulasi yang ditetapkan pada kurun waktu 2018 – 2022.
2. Regulasi yang diukur tersebut sudah berlaku minimal 1 tahun.
3. Regulasi yang diukur bersifat pengaturan terhadap stakeholder eksternal Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam evaluasi efektifitas regulasi ini, beberapa regulasi yang direncanakan dievaluasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 tahun 2018 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomasi Industri.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan.
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang Komponen.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang Body Repair.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Karoseri.

Responden yang terlibat antara lain adalah; (1) Asosiasi industri/ profesi, (2) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), (3) Perusahaan/ industri bidang Otomasi Industri, Otomotif, Teknik Sepeda Motor, Karoseri, dan Manufaktur Elektronika, dan (4) Lembaga Pelatihan.

Hasil Evaluasi Kuesioner

1. Upaya penyebaran kuesioner telah dilakukan melalui penyampaian Nota

Dinas Sekretaris BPSDMI kepada Kepala Pusdiklat SDMI Nomor 151/BPSDMI.1/HK/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, Nomor 200/BPSDMI.1/HK/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Permohonan Bantuan Penyebaran Kembali Kuesioner Kepada Stakeholder.

2. Jumlah kuesioner akhir yang kembali sebanyak 55 kuesioner atau telah mencapai nilai minimal sampel yaitu sebesar 30 sampel pada penelitian kuantitatif (Kerlinger dan Lee, 2000) dengan rincian per regulasi sebagai berikut:

No	Regulasi	Jumlah Responden	Keterangan
1	Permenperin Nomor 49 tahun 2018 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomasi Industri	13	-
2	Permenperin Nomor 34 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan	34	-
3	Permenperin Nomor 36 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor	0	Tidak dapat dievaluasi
4	Permenperin Nomor 37 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang Komponen	4	-
5	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Sub Bidang <i>Body Repair</i>	4	-
6	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Karoseri	0	Tidak dapat dievaluasi
TOTAL		55	

Hasil perhitungan pada masing – masing regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Secara keseluruhan skor rata-rata implementasi KKNi Bidang Otomasi Industri (Permenperin No. 49 Tahun 2018) adalah sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	% Kriteria Indikator
Penyusunan Regulasi	95%
Sosialisasi	90%
Pemahaman	89%
Implementasi	90%
Manfaat/Dampak	85%
Pemenuhan Kebutuhan	81%

Berdasarkan hasil dari aspek-aspek pengukuran diatas, maka secara proporsional diperoleh Nilai Efektifitas Regulasi dari KKNi Bidang Otomasi Industri

(Permenperin No. 49 Tahun 2018) adalah sebesar : 88%

- b. Secara keseluruhan skor rata-rata implementasi KKNi Bidang Otomotif Subbidang Body Repair (Permenperin No. 38 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	% Kriteria Indikator
Penyusunan Regulasi	90%
Sosialisasi	80%
Pemahaman	80%
Implementasi	85%
Manfaat/Dampak	75%
Pemenuhan Kebutuhan	85%

Berdasarkan hasil dari aspek-aspek pengukuran diatas, maka secara proporsional diperoleh Nilai Efektifitas Regulasi dari KKNi Bidang Otomotif Subbidang Body Repair (Permenperin No. 38 Tahun 2020) adalah sebesar : 83%

- c. Secara keseluruhan skor rata-rata implementasi KKNi Bidang Otomotif Subbidang Komponen (Permenperin No. 37 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	% Kriteria Indikator
Penyusunan Regulasi	90%
Sosialisasi	90%
Pemahaman	90%
Implementasi	90%
Manfaat/Dampak	93%
Pemenuhan Kebutuhan	90%

Berdasarkan hasil dari aspek-aspek pengukuran diatas, maka secara proporsional diperoleh Nilai Efektifitas Regulasi dari KKNi Bidang Otomotif Subbidang Komponen (Permenperin No. 37 Tahun 2020) adalah sebesar : 90%

- d. Secara keseluruhan skor rata-rata implementasi KKNi Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan (Permenperin No. 34 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	% Kriteria Indikator
Penyusunan Regulasi	90%
Sosialisasi	83%
Pemahaman	82%
Implementasi	85%
Manfaat/Dampak	79%
Pemenuhan Kebutuhan	78%

Berdasarkan hasil dari aspek-aspek pengukuran diatas, maka secara proporsional diperoleh Nilai Efektifitas Regulasi dari KKNi Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan (Permenperin No. 34 Tahun 2020) adalah sebesar : 83%

Sehingga total Indeks Efektivitas Regulasi dari keempat Permenperin tersebut adalah sebesar 86%.

NO	Permenperin KKNI terkait untuk Pengukuran Indeks Efektivitas Regulasi	Total IER
1.	KKNI Bidang Otomasi Industri (Permenperin No. 49 Tahun 2018)	88%
2.	KKNI Bidang Otomotif Subbidang Body Repair (Permenperin No. 38 Tahun 2020)	83%
3.	KKNI Bidang Otomotif Subbidang Komponen (Permenperin No. 37 Tahun 2020)	90%
4.	KKNI Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan (Permenperin No. 34 Tahun 2020)	83%
	% Efektivitas regulasi	86%

- **Kendala:**

1. Respon dari industri yang masih cukup lambat untuk mengisi kuisisioner

- **Tindak Lanjut**

1. Melakukan monitoring secara berkala atas kuisisioner yang telah disebarakan

3.2 Realisasi Anggaran 2023

Penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2023 tidak dapat dipisahkan secara terperinci antara suatu program inisiatif atau kegiatan hanya mendukung pencapaian sasaran strategis ataupun satu indikator kinerja. Hal disebabkan karena beberapa program inisiatif atau kegiatan yang dilaksanakan mendukung secara simultan untuk pencapaian beberapa sasaran strategis atau indikator kinerja. Realisasi anggaran yang belum tercapai sepenuhnya namun telah mendekati 100% yang ditetapkan ini diantaranya disebabkan oleh adanya beberapa satuan kerja yang realisasi penerimaan PNBPNya belum maksimal.

Selama tahun 2023, realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri adalah Rp. 955.718.811.102 dari pagu anggaran sebesar Rp. 967.749.902.000 atau sebesar 98,76% dari total pagu Tahun 2023 yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen BPSDMI, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Satuan Kerja:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	967.749.902.000	955.718.811.102	12.031.090.898	98,76 %
579331	POLITEKNIK AKA BOGOR	43.030.334.000	42.183.597.062	846.736.938	98,03 %
579332	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK BOGOR	21.775.383.000	21.748.693.811	26.689.189	99,88 %
579333	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	29.780.834.000	28.264.342.643	1.516.491.357	94,91 %
579334	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI YOGYAKARTA	19.361.299.000	19.312.669.830	48.629.170	99,75 %
579335	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	27.352.311.000	27.084.045.809	268.265.191	99,02 %
579336	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI MAKASSAR	19.272.008.000	18.856.808.394	415.199.606	97,85 %
579337	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK MAKASSAR	16.866.259.000	16.864.358.361	1.900.639	99,99 %
579338	POLITEKNIK STTT BANDUNG	34.715.979.000	34.291.628.917	424.350.083	98,78 %
579339	BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA	38.978.409.000	38.938.123.352	40.285.648	99,90 %
579340	BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN	29.263.406.000	25.782.949.462	3.480.456.538	88,11 %
579341	BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR	35.208.413.000	35.079.634.311	128.778.689	99,63 %
579342	BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR	31.416.804.000	31.379.645.535	37.158.465	99,88 %
579343	BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG	24.381.195.000	24.390.597.280	-9.402.280	100,04 %
579344	BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA	39.863.294.000	39.854.778.791	8.515.209	99,98 %
579345	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDA ACEH	17.254.429.000	17.194.558.503	59.870.497	99,65 %
579346	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN	30.391.482.000	29.874.568.473	516.913.527	98,30 %
579347	POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI	12.665.445.000	12.343.381.485	322.063.515	97,46 %
579348	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFaktur BANTAENG	12.703.498.000	12.691.685.619	11.812.381	99,91 %
579349	POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL	13.827.883.000	13.811.648.382	16.234.618	99,88 %
579350	POLITEKNIK STMI JAKARTA	35.109.284.000	34.671.579.274	437.704.726	98,75 %
579351	POLITEKNIK APP JAKARTA	29.352.019.000	29.196.348.996	155.670.004	99,47 %
579352	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA	16.591.003.000	16.565.138.271	25.864.729	99,84 %
579355	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PADANG	16.267.903.000	16.158.027.255	109.875.745	99,32 %
579356	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDAR LAMPUNG	18.664.765.000	18.664.367.241	397.759	100,00 %
579357	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PONTIANAK	18.098.851.000	17.838.703.739	260.147.261	98,56 %
579358	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK PADANG	21.604.634.000	21.482.132.355	122.501.645	99,43 %
579359	POLITEKNIK ATI PADANG	31.952.402.000	31.860.174.423	92.227.577	99,71 %

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
579360	BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA	40.069.401.000	40.060.661.512	8.739.488	99,98 %
579361	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	226.234.349.000	223.724.551.566	2.509.797.434	98,89 %
619101	POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN	15.696.626.000	15.549.410.450	147.215.550	99,06 %

Sumber: SatuDJA

- Berdasarkan rincian output:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	967.749.902.000	955.718.811.102	12.031.090.898	98,76 %
4957.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.572.112.000	2.501.496.757	70.615.243	97,25 %
4957.DCH	Pelatihan Bidang Industri	3.000.000.000	2.966.874.317	33.125.683	98,90 %
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1.162.144.000	1.106.088.245	56.055.755	95,18 %
4957.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	5.229.500.000	5.095.065.369	134.434.631	97,43 %
4957.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	3.000.000.000	2.945.529.269	54.470.731	98,18 %
4957.QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	2.800.835.000	2.762.101.015	38.733.985	98,62 %
4957.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	2.549.370.000	2.545.436.978	3.933.022	99,85 %
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	197.951.905.000	194.664.113.499	3.287.791.501	98,34 %
4958.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	16.369.258.000	16.158.250.552	211.007.448	98,71 %
4958.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	36.863.500.000	35.568.050.204	1.295.449.796	96,49 %
4958.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	77.361.035.000	75.633.002.864	1.728.032.136	97,77 %
4959.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	6.752.489.000	6.727.424.315	25.064.685	99,63 %
4959.PEC	Kerjasama	1.950.000.000	1.949.429.407	570.593	99,97 %
4959.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	95.002.278.000	94.181.991.904	820.286.096	99,14 %
4959.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	28.540.381.000	28.169.541.110	370.839.890	98,70 %
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	440.075.525.000	436.638.676.059	3.436.848.941	99,22 %
6043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.922.987.000	3.920.588.110	2.398.890	99,94 %
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	31.642.193.000	31.217.848.933	424.344.067	98,66 %
6893.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	11.004.390.000	10.967.302.195	37.087.805	99,66 %

- Berdasarkan indikator kinerja perjanjian kinerja BPSDMI

Secara keseluruhan seluruh pagu anggaran tahun 2023 yang dimiliki oleh BPSDMI yaitu sebesar Rp. 967.749.902.000 dengan realisasi anggaran tahun 2023 Rp. 955.718.811.102 (98,76%) bertujuan untuk memenuhi target perjanjian kinerja BPSDMI yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang di dukung oleh beberapa kegiatan rincian output (KRO) dengan subkomponen yang berbeda sehingga terjadi pengulangan isian pagu, terdapat pula indikator yang di dukung oleh KRO yang sama sehingga dilakukan penggabungan.

Selain itu terdapat indikator yang hanya di dukung beberapa subkomponen dalam satu KRO akan tetapi data realisasi anggaran yang tersedia hingga saat ini hanya mencapai level KRO, sehingga hampir semua indikaor memiliki realisasi yang digabungkan dengan indikaor lain. Dengan rincian sebagai berikut:

	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2023	Satuan	% RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Anggaran
	Tersedianya SDM Industri yang Kompeten	34.000	45.219	Orang	133,0%	967.749.902.000	955.718.811.102	98,76%
1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	21,01	19,29	Juta Orang	91,8%	5.037.498.000	5.018.242.036	99,62%
	4957.FAI.001.052 Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal dengan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Lembaga Non-Pendidikan					1.117.461.000	1.106.088.245	98,98%
	4959.PEC.001.051 Menyelenggarakan Program SMK yang Link And Match dengan Industri					1.950.000.000	1.949.429.407	99,97%
	4959.FAI.001.051 Meningkatkan Akreditasi SMK					1.970.037.000	1.962.724.384	99,63%
2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	15,2	13,8	Persen	90,8%	4.769.614.000	4.687.326.713	98,27%
	4958.SAG.001.054 Melaksanakan Sertifikasi Lulusan					2.173.997.000	2.125.435.904	97,77%
	4959.SAG.001.053 Melaksanakan Sertifikasi Lulusan					2.595.617.000	2.561.890.810	98,70%
3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	117,5	118,6	Rp Juta /orang/ tahun	100,9%	9.021.215.000	8.878.116.767	98,41%
	4957.SCH.001.099 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)					7.048.977.000	6.937.815.984	98,42%
	4958.SAG.001.055 Menyelenggarakan Inkubator Bisnis					675.417.000	660.330.047	97,77%
	4959.SAG.001.055 Menyelenggarakan Pilot Project Dual Sistem					1.296.821.000	1.279.970.736	98,70%
4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	26500	33094	Orang	124,9%	177.177.734.000	174.413.385.679	98,44%

	4957.SCH.001.051 Pelatihan Industri (Skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 in 1 Sektor Industri Makanan dan Minuman					93.371.328.000	91.898.880.060	98,42%
	4957.SCH.001.052 Pelatihan Industri (Skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 in 1 Sektor Industri TPT					39.692.725.000	39.066.778.337	98,42%
	4957.SCH.001.053 Pelatihan Industri (Skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 in 1 Sektor Industri Otomotif					6.110.142.000	6.013.786.232	98,42%
	4957.SCH.001.055 Pelatihan Industri (Skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 in 1 Sektor Industri Elektronika					35.140.677.000	34.586.515.261	98,42%
	4957.SCH.002.053 Pelatihan Vokasi Industri Upskilling dan Reskilling Sektor Elektronika dan Telematika					949.685.000	944.564.411	99,46%
	4957.SCH.002.056 Pelatihan Vokasi Industri Upskilling dan Reskilling Sektor Otomotif					1.913.177.000	1.902.861.377	99,46%
5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	81	91,43	Persen	112,9%	96.150.794.000	94.218.803.564	97,99%
	4958.SAG.001.051 Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem					70.009.676.000	68.445.852.947	97,77%
	4958.SAG.002.051 Menyelenggarakan Program Pendidikan D1-D2 Industri					3.050.427.000	2.982.288.875	97,77%
	4959.SAG.001.051 Menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem					23.090.691.000	22.790.661.743	98,70%
1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	600	763	Orang	127,2%	8.000.000.000	7.920.974.146	99,01%
	4957.SCH.005.051 Tenaga Kerja Industri 4.0					8.000.000.000	7.920.974.146	99,01%
2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	21	24	Implementasi	114,3%	2.114.781.000	2.083.798.360	98,53%
	4958.SAG.001.053 Menyelenggarakan Teaching Factory					832.389.000	813.795.726	97,77%
	4959.FAI.001.052 Menyelenggarakan Penelitian Teknis Industri Terapan					76.725.000	76.440.203	99,63%
	4959.FAI.001.053 Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat					104.034.000	103.647.834	99,63%
	4959.FAI.002.051 Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Industri					250.520.000	249.590.090	99,63%
	4959.FAI.003.051 Membentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri					29.139.000	29.030.838	99,63%
	4959.SAG.001.052 Menyelenggarakan Teaching Factory					821.974.000	811.293.668	98,70%
3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	90	92,34	Persen	102,6%	5.725.194.000	5.694.324.435	99,46%
	4957.SCH.002.099 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Industri Upskilling dan Reskilling					5.725.194.000	5.694.324.435	99,46%
1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	87	98,41	Persen	113,1%	9.734.379.000	9.701.571.480	99,66%
	6893.EBC.051.052 Menyelenggarakan Diklat Fungsional					348.789.000	347.613.486	99,66%

	6893.EBC.051.053 Menyelenggarakan Diklat Teknis Industri					1.675.457.000	1.669.810.252	99,66%
	6893.EBC.051.054 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur					1.029.638.000	1.026.167.838	99,66%
	6893.EBC.053.051 Penyusunan Program Diklat Digital ASN dan Knowledge Management Center					280.567.000	279.621.412	99,66%
	6893.EBC.996.051 Menyelenggarakan Pendidikan Rintisan Gelar					6.399.928.000	6.378.358.492	99,66%
2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	80	94,01	Persen	117,5%	2.270.011.000	2.254.688.821	99,33%
	4957.DCH.002.051 Melaksanakan Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional					1.000.000.000	988.958.106	98,90%
	6893.EBC.052.051 Melaksanakan Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional					756.029.000	753.480.975	99,66%
	6893.EBC.052.052 Melaksanakan Administrasi Jabatan Fungsional					513.982.000	512.249.740	99,66%
1	Infrastruktur kompetensi industri	7	8	SKKNI	114,3%	5.229.500.000	5.095.065.369	97,43%
	4957.PBK.001.051 Menyusun RSKKNI Sektor Industri					3.229.500.000	3.146.479.321	97,43%
	4957.PBK.002.052 Menyusun Program Pelatihan Berbasis Kompetensi					2.000.000.000	1.948.586.048	97,43%
2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	20	38	LSP dan TUK	190,0%	2.572.112.000	2.501.496.757	97,25%
	4957.BDB.001.051 Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Industri					2.572.112.000	2.501.496.757	97,25%
3	Asesor kompetensi dan lisensi	145	191	Asesor	131,7%	2.000.000.000	1.977.916.211	98,90%
	4957.DCH.001.051 Menyelenggarakan Diklat Asesor Kompetensi					1.272.279.000	1.258.230.630	98,90%
	4957.DCH.001.052 Menyelenggarakan Diklat RCC Asesor Kompetensi					727.721.000	719.685.582	98,90%
4	Tenaga Kerja Industri yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	1500	4355	Nilai	290,3%	3.000.000.000	2.945.529.269	98,18%
	4957.PDI.001.051 Menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri					3.000.000.000	2.945.529.269	98,18%
5	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	21	185	Perusahaan	881,0%	7.874.282.000	7.080.800.124	89,92%
	4958.FAI.001.054 Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan dengan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Non-Pendidikan					2.058.541.000	2.032.005.437	98,71%
	4958.FAI.001.056 Menyelenggarakan Rintisan Gelar Dosen					139.300.000	137.504.357	98,71%
	4958.SAG.001.056 Fasilitasi Silver Expert					619.129.000	605.299.366	97,77%
	4959.FAI.001.054 Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan dengan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Non-Pendidikan					4.322.034.000	4.305.990.964	99,63%

	4959.SAG.001.054 Fasilitas Silver Expert					735.278.000	725.724.154	98,70%
6	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	334	336	Nilai	100,6%	4.706.049.000	4.645.385.811	98,71%
	4958.FAI.001.051 Meningkatkan Akreditasi Politeknik dan Akademi Komunitas					4.706.049.000	4.645.385.811	98,71%
7	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	170	324	Penelitian	190,6%	9.465.368.000	9.343.354.947	98,71%
	4958.FAI.001.052 Menyelenggarakan Penelitian Teknis Industri Terapan					7.499.690.000	7.403.015.462	98,71%
	4958.FAI.001.053 Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat					1.965.678.000	1.940.339.484	98,71%
8	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	60	86	Tenant	143,3%	2.800.835.000	2.762.101.015	98,62%
	4957.QDJ.001.051 Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri					2.800.835.000	2.762.101.015	98,62%
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	70	86,7	Persen	123,9%	138.338.135.000	136.216.067.196	98,47%
	4957.RBL.002.059 Peralatan Pelatihan Industri					2.549.370.000	2.545.436.978	99,85%
	4958.RBJ.001.058 Gedung dan Bangunan					22.519.721.000	21.728.337.437	96,49%
	4958.RBJ.002.059 Peralatan Pendidikan Vokasi					14.343.779.000	13.839.712.767	96,49%
	4959.RBI.001.058 Gedung dan Bangunan					91.475.588.000	90.685.752.698	99,14%
	4959.RBI.002.059 Peralatan Pendidikan Vokasi					3.526.690.000	3.496.239.206	99,14%
	6043.EBB.001.051 Layanan Sarana dan Prasarana BPSDMI Pusat					1.544.984.000	1.544.039.249	99,94%
	6043.EBB.001.052 Layanan Sarana dan Prasarana Politeknik Industri					2.378.003.000	2.376.548.861	99,94%
1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	76	77,75	Nilai	102,3%	3.865.592.000	3.813.751.692	98,66%
	6043.EBD.001.053 Pengelolaan keuangan					2.421.744.000	2.389.266.709	98,66%
	6043.EBD.002.053 Pengelolaan keuangan					669.185.000	660.210.758	98,66%
	6043.EBD.003.053 Pengelolaan keuangan					569.031.000	561.399.894	98,66%
	6043.EBD.004.053 Pengelolaan keuangan					205.632.000	202.874.330	98,66%
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	76	74,15	Nilai	97,6%	6.616.163.000	6.527.435.600	98,66%
	6043.EBD.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					4.284.687.000	4.227.226.333	98,66%

	6043.EBD.002.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					742.128.000	732.175.541	98,66%
	6043.EBD.003.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					804.436.000	793.647.947	98,66%
	6043.EBD.004.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					784.912.000	774.385.778	98,66%
3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	79	82,24	Nilai	104,1%	906.366.000	894.210.994	98,66%
	6043.EBD.004.055 Pelayanan umum dan perlengkapan					906.366.000	894.210.994	98,66%
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	71	71,69	Indeks	101,0%	7.795.487.000	7.690.944.036	98,66%
	6043.EBD.001.054 Pengelolaan kepegawaian					2.874.023.000	2.835.480.330	98,66%
	6043.EBD.002.054 Pengelolaan kepegawaian					2.225.512.000	2.195.666.319	98,66%
	6043.EBD.003.054 Pengelolaan kepegawaian					2.695.952.000	2.659.797.387	98,66%
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92	98,55	Persen	107,1%	6.288.239.000	6.203.909.292	98,66%
	6043.EBD.001.055 Pelayanan umum dan perlengkapan					4.280.000.000	4.222.602.189	98,66%
	6043.EBD.002.055 Pelayanan umum dan perlengkapan					596.497.000	588.497.556	98,66%
	6043.EBD.003.055 Pelayanan umum dan perlengkapan					1.411.742.000	1.392.809.547	98,66%
2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	2,89	3,445	Level	119,2%	4.807.263.000	4.742.794.221	98,66%
	6043.EBD.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					1.786.061.000	1.762.108.666	98,66%
	6043.EBD.002.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					1.341.406.000	1.323.416.802	98,66%
	6043.EBD.003.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					1.164.521.000	1.148.903.954	98,66%
	6043.EBD.004.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					515.275.000	508.364.800	98,66%
1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	76	86	Persen	113,2%	1.363.083.000	1.344.803.098	98,66%
	6043.EBD.004.054 Pengelolaan kepegawaian					1.363.083.000	1.344.803.098	98,66%
	6043.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan					317.334.890.000	314.824.640.447	99,21%
	6043.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor					122.785.318.000	121.814.035.612	99,21%

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDMI berusaha memaksimalkan pencapaian kinerja, baik terhadap output, maupun outcome. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan capaian efisiensi sumber daya pada BPSDMI, salah satunya karena adanya refocusing/realokasi anggaran/program/kegiatan yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan nasional atau isu aktual terkini.

Pada awal tahun 2023, BPSDMI telah menetapkan Perjanjian Kinerja beserta anggaran yang menyertainya sebesar Rp. 994.645.664.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk dapat mewujudkan capaian target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BPSDMI Tahun 2023.

Dengan adanya pengurangan pagu dari penarikan blokir automatic adjustment dan penambahan pagu Blu maupun PNBPN maka pagu akhir dari BPSDMI berubah menjadi Rp. 967.749.902.000,-. Dengan alokasi anggaran sebesar ini akan dapat mempengaruhi tingkat capaian target yang telah diperjanjikan. BPSDMI telah berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugasnya sehingga pada akhir tahun anggaran 2023 dapat merealisasikan 98,76% anggarannya untuk mencapai target realisasi fisik sebesar 100 (seratus) persen dalam usaha memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari data yang tersedia secara hitungan kasar dapat diperoleh kinerja efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2023 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kinerja} &= \frac{(\text{pagu awal}-\text{realisasi pagu akhir})}{\text{pagu awal}} \times 100 \% \\ \text{Efisiensi Anggaran} &= \frac{(994.645.664.000-967.749.902.000)}{994.645.664.000} \times 100 \% \\ &= -2.70\% \end{aligned}$$

Sebagaimana terlihat pada perhitungan di atas, nilai kinerja efisiensi anggaran BPSDMI Tahun 2023 adalah sebesar -2.70 %, dimana persentase tersebut ini termasuk anggaran yang tidak terealisasi sebesar 1,24% dari pagu akhir perubahan yaitu Rp. 12.031.090.898.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Indikator

Kode	Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Satuan	Pagu	Realisasi	Efisien Anggaran / target	Efisien Anggaran / realisasi target	Efisiensi
Tj	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional	1 Tersedianya SDM Industri yang kompeten	34000	45219	Orang	967.749.902.000	955.718.811.102	28.463.232	21.401.400	7.061.833
PERSPEKTIF STAKEHOLDER										
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	21,01	19,29	Juta Orang	5.037.498.000	5.018.242.036	239.766.683	261.145.568	- 21.378.885
		2 Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	15,20	13,80	Persen	4.769.614.000	4.687.326.713	313.790.395	345.624.203	- 31.833.808
		3 Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	117,5	118,6	Rp Juta /orang/ tahun	9.021.215.000	8.878.116.767	76.776.298	76.064.207	712.090
		4 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	26.500	33.094	Orang	177.177.734.000	174.413.385.679	6.685.952	5.353.772	1.332.180
		5 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	8100%	9143%	Persen	96.150.794.000	94.218.803.564	1.187.046.840	1.051.632.878	135.413.962
PERSPEKTIF CUSTOMER										
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	600	763	Orang	8.000.000.000	7.920.974.146	13.333.333	10.484.928	2.848.405
		2 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	21	24	Implementasi	2.114.781.000	2.083.798.360	100.703.857	88.115.875	12.587.982
		3 Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	90	92	Persen	5.725.194.000	5.694.324.435	63.613.267	62.001.235	1.612.032

Kode	Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Satuan	Pagu	Realisasi	Efisien Anggaran / target	Efisien Anggaran / realisasi target	Efisiensi	
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	87	98	Persen	9.734.379.000	9.701.571.480	111.889.414	98.916.563	12.972.850
		2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	80	94	Persen	2.270.011.000	2.254.688.821	28.375.138	24.146.484	4.228.653
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS											
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	7	8	SKKNI	5.229.500.000	5.095.065.369	747.071.429	653.687.500	93.383.929
		2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	20	38	LSP dan TUK	2.572.112.000	2.501.496.757	128.605.600	67.687.158	60.918.442
		3	Asesor kompetensi dan lisensi	145	191	Asesor	2.000.000.000	1.977.916.211	13.793.103	10.471.204	3.321.899
		4	Tenaga Kerja Industri yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	1500	4355	Orang	3.000.000.000	2.945.529.269	2.000.000	688.863	1.311.137
		5	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	21	185	Perusahaan	7.874.282.000	7.080.800.124	374.965.810	42.563.686	332.402.123
		6	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	334	336	Nilai	4.706.049.000	4.645.385.811	14.089.967	14.006.098	83.869
		7	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	170	324	Penelitian	9.465.368.000	9.343.354.947	55.678.635	29.214.099	26.464.537

Kode	Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Satuan	Pagu	Realisasi	Efisien Anggaran / target	Efisien Anggaran / realisasi target	Efisiensi		
		8	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	60	86	Tenant	2.800.835.000	2.762.101.015	46.680.583	32.567.849	14.112.734	
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH												
SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	70	87	Persen	138.338.135.000	136.216.067.196	1.976.259.071	1.595.595.559	380.663.512	
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	76	78	Nilai	3.865.592.000	3.813.751.692	50.863.053	49.718.225	1.144.828	
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	76	74	Nilai	6.616.163.000	6.527.435.600	87.054.776	89.226.743	-	2.171.967
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	79	82	Nilai	906.366.000	894.210.994	11.472.987	11.020.987	452.000	
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	71	72	Indeks	7.795.487.000	7.690.944.036	109.795.592	108.738.834	1.056.758	
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92	99	Persen	6.288.239.000	6.203.909.292	68.350.424	63.807.600	4.542.824	
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	3	Level	4.807.263.000	4.742.794.221	1.663.412.803	1.395.431.930	267.980.872	
SP9	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	76	86	Persen	1.363.083.000	1.344.803.098	17.935.303	15.849.802	2.085.500	

Kode	Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Satuan	Pagu	Realisasi	Efisien Anggaran / target	Efisien Anggaran / realisasi target	Efisiensi
		6043.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan				317.334.890.000	314.824.640.447			
		6043.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor				122.785.318.000	121.814.035.612			

3.4 Kendala dan Tindak Lanjut

3.4.1 Kendala

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan program dan tahun 2023 antara lain:

1. Pembayaran luncturan dana SBSN untuk penyelesaian Pematangan Lahan SMAK Bogor Tahun 2022 tertunda sehingga realisasi awal tahun terlambat.
2. Diklat 3 in1 Daerah Potensial tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena terdapat anggota yang tidak aktif.
3. Proses pengadaan belanja modal pada beberapa satker dilaksanakan pada Semester 2 sehingga realisasi tidak mencapai target semester I.
4. Terdapat sisa kontrak dari Pembangunan Poltek Cilegon yang tidak dapat dioptimalisasi
5. Persiapan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Politeknik STTT Bandung untuk water treatment process kurang matang sehingga selesai tidak tepat waktu
6. Adanya Blokir AA pada belanja pegawai yang dikembalikan ke BA-BUN menyebabkan kekurangan belanja pegawai sehingga pembayaran tunjangan kinerja pada beberapa satker terlambat
7. Perhitungan kebutuhan belanja pegawai yang dimintakan ke BA BUN terdapat kelebihan sehingga realisasi tidak optimal
8. Realisasi Capaian penerimaan PNBPN pada beberapa satker tidak tercapai sehingga realisasi anggaran tidak bisa maksimal

3.4.2 Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala pelaksanaan antara lain:

1. Pembayaran pematangan lahan SMAK Bogor telah selesai dilaksanakan
2. Membentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan tokoh aspirasi masyarakat dan Balai Diklat Industri untuk memahami ketersediaan

waktu dan mencari jadwal diklat yang paling sesuai dan menyusun rekomendasi tindak lanjut.

3. Mendorong satuan kerja agar melakukan belanja modal pada awal periode
4. Melakukan persiapan khususnya melengkapi Surat PU apabila terkait belanja modal gedung
5. Menghitung belanja gaji dengan seksama agar tidak terjadi selisih yang terlalu besar

BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) selama tahun anggaran 2023, relatif cukup baik meskipun ada beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 beberapa indikator mengalami peningkatan. Walaupun demikian, BPSDMI tidak akan berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Karena di masa yang akan datang, masih banyak tantangan yang akan dihadapi, seiring dengan adanya kebijakan- kebijakan baru khususnya di bidang pengembangan SDM Industri.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 merupakan laporan tahun ke empat periode Renstra 2020-2024. Untuk itu diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan balikan (feed back), dan mendorong aparat BPSDMI agar berusaha sungguh-sungguh, sehingga dapat mewujudkan BPSDMI menjadi lembaga yang dikenal berkualitas baik, dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri di lingkungan Kementerian. Di samping itu juga memiliki kepeloporan, daya saing, dan daya tarik dalam pengelolaan diklat. Aspirasi seperti ini menyiratkan pesan, agar BPSDMI mampu berinteraksi dan bersinergi secara produktif dengan lingkungan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi BPSDMI untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. BPSDMI akan selalu berusaha mengembangkan secara berkelanjutan program diklat yang profesional, pelayanan diklat yang prima, widyaiswara yang kompeten, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pembelajaran mutakhir. Dan juga secara berkelanjutan akan menyediakan sarana dan prasarana diklat yang nyaman.